



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIC INDONESIA**

**RISALAH
RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI V DPR RI
DENGAN DIRJEN CIPTA KARYA DAN DIRJEN PERUMAHAN
KEMENTERIAN PUPR RI**

- Tahun Sidang : 2022-2023
Masa Persidangan : I
Rapat Ke- : 11 (sebelas)
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat
Sifat Rapat : Terbuka
Hari, Tanggal : Rabu, 31 Agustus 2022
Waktu : Pukul 10.10 s.d. 15.50 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi V DPR RI, (Ruang KK V)
Gedung Nusantara DPR RI dan Secara Virtual Zoom
Cloud Meeting
- Ketua Rapat : Ir. Ridwan Bae (F-P. GOLKAR) – Wakil Ketua Komisi V DPR RI
- Acara : 1. Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2022 sampai bulan Agustus 2022;
2. Membahas alokasi anggaran menurut fungsi dan program masing-masing unit Eselon I K/L Mitra Kerja Komisi V DPR RI dalam RAPBN TA. 2023
- Sekretaris Rapat : Nunik Prihatin Budiastuti, S.H., Kabag Komisi V DPR RI
- Hadir : A. Anggota DPR RI:
51 dari 55 orang Anggota dengan rincian:
1. FRAKSI PDI-PERJUANGAN (F-PDIP)
11 dari 11 orang Anggota
1. Lasarus, S.Sos., M.Si.
2. Bob Andika Mamana Sitepu, S.H.
3. Mochamad Herviano
4. Hj. Sadarestuwati, S.P., M.MA.
5. Sukur H. Nababan, S.T.
6. Ir. Sudjadi
7. Sarce Bandaso Tandiasik, S.H., M.H.
8. Sri Rahayu
9. H. Irmadi Lubis
10. Ir. Effendi Sianipar
11. Harvey B. Malaihollo
2. FRAKSI PARTAI GOLKAR (F-PG)
5 dari 8 orang Anggota
1. Ir. Ridwan Bae
2. Drs. Hamka B Kady, M.S.
3. DR. H. Ali Mufthi, S.AG., M.Si.
4. H. Tubagus Haerul Jaman, S.E.

5. Muhammad Fauzi, S.E.
3. FRAKSI PARTAI GERINDRA
(F-GERINDRA)
7 dari 7 orang Anggota
 1. H. Andi Iwan Darmawan Aras, S.E., M.Si.
 2. Ir. Sumail Abdullah
 3. Sudewo, S.T., M.T.
 4. Iis Rosyita Dewi, S.Hum., M.M.
 5. Ir. Eddy Santana Putra, M.T.
 6. Drs. H. Mulyadi, M.MA.
 7. Hj. Novita Wijayanti, S.E., M.M.
4. FRAKSI PARTAI NASDEM (F-NASDEM)
6 dari 6 orang Anggota
 1. Roberth Rouw
 2. Drs. H. Tamanuri, M.M.
 3. H. Syarif Abdullah Alkadrie, S.H., M.H.
 4. Drs. H. Soehartono, M.Si.
 5. Sri Wahyuni
 6. Drs. Fadholi, M. Ikom.
5. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (F-PKB)
6 dari 6 orang Anggota
 1. H. Ruslan M. Daud
 2. H. Irmawan, S.Sos., M.M.
 3. H. Dedi Wahidi, S.Pd.
 4. Sofyan Ali, S.H.
 5. Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz, M.M.
 6. H. Syafiuddin, S.Sos.
6. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT (F-PD)
5 dari 5 orang Anggota
 1. Dr. H. Irwan S.IP., M.P.
 2. Willem Wandik
 3. drh. Jhonni Allen Marbun, M.M.
 4. Lasmi Indaryani, S.E.
 5. Ir. H. Ishak Mekki, M.M.
7. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (F-PKS)
4 dari 5 orang Anggota
 1. H. Suryadi Jaya Purnama, S.T.
 2. Ir. H. Sigit Sosiantomo
 3. H. Syahrul Aidi Maazat, Lc., M.A.
 4. KH. Toriq Hidayat, Lc.

8. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL
(F-PAN)

5 dari 5 orang Anggota

1. H.A. Bakri H. M., S.E.
2. Athari Ghauthi Ardi
3. Hj. Hanna Gayatri, S.H.
4. H. Boyman Harun, S.H.
5. Mesakh Mirin, SKM.

9. FRAKSI PARTAI PERSATUAN
PEMBANGUNAN (F-PPP)

2 dari 2 orang Anggota

1. H. Syaifullah Tamliha, S.Pi., MS.
2. Dr. H. Muh Aras, S.Pd., M.M.

B. UNDANGAN:

1. Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR RI (Ir. Diana Kusumastuti, M.T.)
2. Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR RI (Iwan Suprijanto, S.T., M.T.)

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT (Ir. RIDWAN BAE / F.P. GOLKAR):

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua.

**Yang terhormat Pimpinan Anggota Komisi V DPR RI,
Yang terhormat Dirjen Cipta Karya dan Dirjen Perumahan Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat beserta jajarannya,
serta hadirin yang kami hormati,**

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat bertemu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita dalam keadaan sehat walafiat secara fisik dan virtual dari tempat masing-masing.

Menurut laporan dari Sekretariat Komisi V, saat ini rapat Komisi V DPR RI telah diikuti 32 orang, terdiri dari fisik 15 orang dan 12 orang virtual, dengan jumlah fraksi 9, sehingga telah memenuhi kuorum. Oleh karena itu sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 281 Peraturan DPR RI dan tentang Tata Tertib, izinkanlah kami membuka rapat dengar pendapat pada hari ini. Dan sesuai ketentuan Pasal 276 Ayat 1, RDP Komisi V DPR RI pada hari ini dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 10.10 WIB)

Kami ucapkan terima kasih kepada para Dirjen Kementerian PUPR beserta jajarannya yang telah memenuhi undangan kami dalam rapat dengar pendapat pada hari ini secara fisik dan menghadirkan para Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Seluruh Indonesia secara virtual. Dengan agenda membahas:

- Evaluasi pelaksanaan APBN tahun anggaran 2022 sampai bulan Agustus 2022, dan
- Alokasi anggaran menurut fungsi dan program masing-masing unit Eselon I mitra kerja Komisi V DPR RI dalam Nota Keuangan RAPBN Tahun Anggaran 2023.

Pak Ketua, Pimpinan, Anggota Komisi V DPR RI, dan para Dirjen Kementerian PUPR yang kami hormati,

Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan Menteri PUPR pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 yang lalu, telah disepakati bersama diantaranya pagu Nota Keuangan dalam RAPBN Tahun Anggaran 2023 Kementerian PUPR adalah sebesar 125,22 triliun. Dari alokasi tersebut, anggaran untuk Dirjen Cipta Karya sebesar 25,03 triliun yang akan digunakan untuk mendukung kegiatan antara lain:

- Pembangunan dan peningkatan SPAM, penataan permukiman kumuh perkotaan, rehabilitasi dan renovasi sarana prasarana sekolah atau madrasah dan dukungan pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat. Sementara realisasi anggaran Dirjen Cipta Karya dalam Tahun Anggaran 2022 per Agustus 2022 adalah sebesar 45,65%.
- Selanjutnya anggaran Dirjen Perumahan sebesar 6,98 triliun, yang akan dipergunakan untuk mendukung kegiatan antara lain: pembangunan rumah susun, pembangunan rumah khusus dan bantuan perumahan swadaya. Sementara realisasi anggaran Dirjen Perumahan dalam APBN tahun anggaran 2022 per Agustus 2022 adalah sebesar 57,31%.

Sejalan dengan itu, dalam kesempatan ini kami ingin tegaskan kembali agar dalam proses penyusunan anggaran tahun 2023, masing-masing unit organisasi Eselon I benar-benar dapat memperhatikan dan mengakomodir saran dan masukan dari Komisi V DPR RI. Selanjutnya, berdasarkan pengawasan yang dilakukan oleh Komisi V DPR RI, terdapat sejumlah isu strategis yang perlu mendapatkan perhatian dari Dirjen Cipta Karya dan Dirjen perumahan, antara lain:

1. Perlu peningkatan koordinasi dalam pelaksanaan program infrastruktur berbasis masyarakat dan program Padat Karya tunai di daerah-daerah sebagaimana saran dan masukan Komisi V DPR RI.
2. Perlunya transparansi data rumah tidak layak huni untuk mendukung penyediaan perumahan agar lebih tepat sasaran.
3. Diperlukan, meningkatkan berbagai upaya strategis dalam mengatasi *backlog* perumahan.

Saudara-saudara yang kami hormati,

Selanjutnya, kami berikan kesempatan kepada para Dirjen Kementerian PUPR untuk menjabarkan pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2022 sampai Bulan Agustus 2022, Alokasi anggaran menurut fungsi dan program anggaran K/L 2023 masing-masing unit Eselon I mitra kerja Komisi V DPR RI dalam Nota Keuangan RAPBN Tahun Anggaran 2023.

Demikian pengantar kami dipersilakan kepada Dirjen Cipta Karya dan Dirjen Perumahan untuk menyampaikan penjelasannya. Mungkin duluan Cipta Karya ya, silakan, Ibu. Tapi sambil menyampaikan itu, Bu, Ibu mungkin bisa memperkenalkan juga dari apa namanya, Balai-balai Cipta Karya yang sempat hadir melalui virtual. Kami persilakan, Bu Dirjen.

DIREKTUR JENDERAL CIPTA KARYA KEMENTERIAN PUPR RI (Ir. DIANA KUSUMASTUTI, M.T.):

Baik, terima kasih kepada Pimpinan Komisi V DPR RI, atas kesempatan diberikan kepada kami.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya,
Om Swastiastu, namo budhaya, salam kebajikan,

Bapak-Ibu Pimpinan Komisi V dan juga para anggota Komisi V yang hadir secara fisik maupun secara virtual,

Perlu kami sampaikan, Bapak, bahwa hari ini kami hadir bersama seluruh jajaran di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya, direktur-direktur. Namun kami mohon maaf, Direktur Air Minum, Bapak Anang, hari ini mengikuti kunjungan Presiden di Saumlaki, mewakili dari Direktorat Jenderal Cipta Karya. Dan hari ini juga kami hadir bersama seluruh Kepala Balai, namun secara virtual, mulai dari Aceh sampai dengan ke Papua. Ini mungkin semuanya hadir di sini, bisa ditunjukkan mungkin, hadir, Aceh, Pak Deni. Mohon izin, Bapak, perlu kami sebutkan satu-satu? Baik, *makasih*.

Pak Deni dari Aceh, hadir, Pak Deni? Angkat tangan, Pak Deni. Mohon dibuka *speaker* nya, Pak Deni, Aceh, oke. Dari Sumatera Utara, Pak Safril, iya tolong lambaikan tangannya, Pak Safril, iya Pak Safril, iya baik. Kemudian Sumatera Barat, Pak Kusworo, Pak Kusworo, oh sedang diklat, tapi ada yang hadir mewakili, diklat, *nah*, ini Pak Kusworo, Bapak, hadir, iya lagi diklat. Kemudian dari Jambi, Bu Asna, Bu Asna hadir? Terima kasih. Riau, Pak Khalil Kastela, Riau. Riau, Pak Khalil Kastela, iya. Kemudian dari Bangka Belitung, Bu Miarka, Bu Miarka? Iya. Dari Sumatera Selatan, Pak Kusuma. Pak Kusuma? Iya, Pak Kusuma, ya hadir. Dari Kepri, Pak Fasri, Kepri, Pak Fasri, hadir? Oke. Kemudian dari Bangka Belitung sudah, Jambi sudah, Bengkulu, Pak Daniel Kudu dari Bengkulu, Pak Daniel? Iya. Kemudian dari Lampung, Ibu Duni, Lampung, ini ada Pak Tamanuri, *nah*, Bu Duni hadir, baik.

Dari Jakarta Metro, Pak Albert? Jakarta Metro, Pak Albert, iya hadir. Kemudian Jawa Barat, Pak Oskar, iya, Pak Oskar. Dari Banten, Pak Yosa, Banten, Pak Yosa, iya. Kemudian dari Yogyakarta, Bu Tri. Yogyakarta, Bu Tri, Bu Tri, tadi saya lihat hadir Bu Tri, oke. Jawa Tengah, Pak Cakra, *nah*, ini Bu Tri, iya. Cakra, dari Jawa Tengah, iya. Jawa Timur, Pak Reva. Pak Reva. Jawa Timur. iya hadir.

Kemudian Kalimantan Barat, Pak Deva, Kalbar, Pak Deva, iya. Kalimantan Utara, Pak Nuris, ini juga sedang Diklat PIM, Pak Nuris, iya hadir. Kalimantan Selatan, Pak Davis. Kalimantan Selatan. Pak Davis. iya. Kemudian Kalimantan Selatan, Barat, Timur, Timur. Kalimantan Timur. Pak Indra. Pak Indra, Kalimantan Timur, Kalimantan Timur, Pak Indra. Kalimantan Timur, Pak Indra, oke.

Saya lanjut dulu Bali, Pak Nyoman, Pak Nyoman, Bali, iya hadir. NTB, Bu Ika sedang menghadiri dengan, mengantar kejagung, Pak, yang hadir tapi di sini tim, Bu Ruli, Bu Andria, hadir di sini, iya. Kemudian NTT, Pak Norman, hadir iya.

Kemudian dari Sulawesi Utara, Pak Komang. Utara, Pak Komang, Sulawesi Selatan Ini Pak Asiri iya, Pak Asiri, Komang iya, Utara. Sulawesi Barat, Pak Baskoro, Pak Baskoro, Sulawesi Barat hadir, oke. Kemudian Sulawesi Tengah, Pak Sahabudin. Pak Sahabudin. Sulawesi Tengah oke, ini sedang pada diklat. Kemudian Sulawesi Tenggara, Pak Firman, eh iya salah saya, Pak Wayan, iya Pak Wayan, iya Pak Wayan Krisna.

Kemudian Maluku, Maluku, Pak Reza, oh lagi di Saumlaki, Pak Reza, Maluku bersama-sama Pak Anang. Maluku Utara, Pak Firman, Maluku Utara, Pak Firman, ya Pak Firman, oke. Papua Barat, Pak Marsudi. Pak Marsudi, Papua Barat, oh iya Papua Barat, Pak Marsudi hadir, dan Papua, Pak Sagrim. Pak Sagrim iya, Pak Sagrim hadir, Pak Roberth Rouw. Baik.

KETUA RAPAT:

Bu, Bu , ada dua hal yang membanggakan kita. Pertama, Ibu menghawal semua temannya saya lihat, itu luar biasa itu.

DIREKTUR JENDERAL CIPTA KARYA KEMENTERIAN PUPR RI (Ir. DIANA KUSUMASTUTI, M.T.):

Terima kasih, Bapak.

KETUA RAPAT:

Yang kedua, ada lima orang perempuan Balai, saya catat betul, tadi kalau tidak salah, Kepala Balai di seluruh Indonesia. Ini luar biasa ini buat Ibu Dirjen, tepuk tangan kembali buat Bu Dirjen.

F- PKB (H. SYAFIUDDIN, S.Sos.):

Komunikasi ke bawah 99%, tapi ke samping, belum, belum, belum.

DIREKTUR JENDERAL CIPTA KARYA KEMENTERIAN PUPR RI (Ir. DIANA KUSUMASTUTI, M.T.):

Baik. *Nah*, ini Pak Firman, Bapak, tadi Pak Firman dari Maluku Utara, iya sedang diklat juga, Bapak, mohon izin.

Iya mohon izin, Bapak, jadi sesuai dengan,

F- PD (Dr. H. IRWAN, S.IP., M.P.):

Interupsi, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Iya, silakan, Pak.

F- PD (Dr. H. IRWAN, S.IP., M.P.):

Demi azas keadilan, sebelum Kaltim kelihatan, jangan dimulai dulu, Pimpinan.

DIREKTUR JENDERAL CIPTA KARYA KEMENTERIAN PUPR RI (Ir. DIANA KUSUMASTUTI, M.T.):

Oke, Kalimantan Timur, Pak Indra. Pak Indra, sudah gabung belum? Sudah gabung sebenarnya, ada di dalam Zoom, supaya Pak Irwan tahu, Pak Indra. Pak Indra, tolong suaranya.

KETUA RAPAT:

Lanjut, Bu, sambil lihat sebentar, karena *udah* kelihatan. Iya silakan, Bu. Maaf, Pak Irwan, ya *gitu* ya, iya, silakan.

DIREKTUR JENDERAL CIPTA KARYA KEMENTERIAN PUPR RI (Ir. DIANA KUSUMASTUTI, M.T.):

Baik, Bapak, kami akan menyampaikan bahan, yang pertama adalah kita terkait dengan masalah Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun 2022 sampai dengan bulan Agustus Tahun 2022. Kemudian selanjutnya nanti kami akan menyampaikan terkait dengan masalah Program Pelaksanaan, Program Rencana alokasi Direktorat Jenderal Cipta Karya Tahun 2023.

**Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati,
Pimpinan beserta seluruh Anggota Komisi V,**

Alokasi DIPA Direktorat Jenderal Cipta Karya Tahun 2022 ini adalah sebesar 12,51 triliun, yang terdiri dari 10,07 triliun dan juga PHLN 2,44 triliun. Namun di dalam perjalanannya, terdapat tambahan rupiah murni sebesar 3,52 triliun dan juga pinjaman hibah luar negeri sebesar 0,54 triliun. Sehingga pagu DIPA Direktorat Jenderal Cipta Karya Tahun 2022 saat ini sebesar 16,57 triliun. Ini terdiri dari rupiah murni sebesar 13,59 triliun dan juga program hibah luar negeri sebesar 2,98 triliun. Penambahan pagu terhadap DIPA awal tahun 2022 ini adalah akibat adanya tambahan anggaran untuk dukungan Presidensi G20 dan *event* internasional, ini sesuai dengan Pepres 116, 116 tahun 2021. Yaitu berupa rupiah murni sebesar 1,135,51 miliar dan juga tambahan PHLN sebesar 542,03 miliar. Dan ini untuk antara lain ISWMP, EIRR, kemudian juga Erik untuk *solid waste management*,

F- PDIP (LASARUS, S.Sos., M.Si.) – KETUA KOMISI V DPR RI:

Triliun, kali, Bu, ya? Bukan miliar ya, triliun kali ya?

DIREKTUR JENDERAL CIPTA KARYA KEMENTERIAN PUPR RI (Ir. DIANA KUSUMASTUTI, M.T.):

Kalau untuk PHL nya, miliar, Bapak, 542 miliar untuk PHLN-nya. Namun rupiah murninya itu sebesar satu triliun, 1 triliun 135 miliar, untuk rupiah murninya. Ini untuk Presidensi G20 dan juga *event-event* internasional.

Nah, dan juga ada tambahan sebesar 32,231 miliar, ini untuk penanganan pasca bencana di Nusa Tenggara Barat. Dan nanti, ini melalui BUN, dan nanti juga akan ada tambahan lain lagi setelah nanti ada audit dari BPKP untuk NTT, demikian juga untuk yang pasca bencana Semeru di Lumajang. Dan juga ada tambahan sebesar 2 triliun 358 miliar, ini untuk dukungan terhadap IKN, ya.

Sebagai informasi, untuk rincian dukungan kegiatan pembangunan IKN, ini untuk air minum itu sebesar 294,90 miliar. Ya ini untuk pembangunan instalasi pembangunan air, kemudian juga jaringan distribusi utama, pipa transmisi, ya dan juga jaringan distribusi pembagi untuk sistem pengelolaan air minum di Sepaku. Kemudian untuk bidang sanitasi, ini sebesar 291,91 miliar, ini untuk pembangunan IPAL ya, zona 1, 2 dan 3 di KIPP (Kawasan Inti Pusat Pemerintahan) dan juga pembangunan tempat pembuangan sampah terpadu, ya di kawasan inti pusat pemerintahan, ya.

Kemudian untuk PKP (Pengembangan Kawasan Permukiman) itu sebesar 333,76 miliar. Ini antara lain adalah untuk penyiapan KIPP *Niland Development* tahap 1 yang kemarin sudah tanda tangan kontrak bersama, kemudian juga untuk penataan sumbu kebangsaan tahap pertama.

Kemudian untuk Direktorat Bina Penataan Bangunan, ini sebesar 1 triliun 405,8 miliar, ini untuk bangunan gedung pusat pemerintahan. Kemudian juga ada kantor presiden, gedung sekretariat presiden, gedung untuk istana, kemudian juga gedung di kawasan blok kementerian koordinator ya, 1 dan 2.

Kemudian juga gedung Kementerian Sekretariat Negara, gedung kantor kementerian/lembaga, serta gedung dan kawasan beranda nusantara, serta rencana pengembangan kawasan KIPP dan ada juga untuk *urban design development* untuk kawasan inti pusat pemerintahan.

Di samping itu juga ada bidang perencanaan dan pengendalian itu sebesar 32,86 miliar. Ini antara lain untuk manajemen konstruksi induk, kemudian juga khususnya untuk pembangunan KIPP, untuk Amdal induk dan juga untuk operasional satgas otorita, eh satgas dari perencanaan maupun pelaksanaan IKN.

Kemudian Bapak-Ibu sekalian, kita sampaikan terkait dengan progres serapan keuangan yang saat ini mengacu pada data e-monitoring ya, per 30 Agustus 2022. Yaitu Direktorat Jenderal Cipta Karya sudah sebesar 45,65%. Apabila ini disandingkan dengan rencana keuangan, ini terdapat deviasi yang positif, Bapak, 0,43% positifnya. Dan progres keuangan ini juga lebih tinggi dari progres keuangan Kementerian PUPR yang sebesar 42,94%. Adapun capaian progress fisik sampai dengan saat ini mencapai 48,89%.

Dan juga perlu kami laporkan untuk kegiatan Padat Karya sampai dengan akhir bulan Agustus angka serapan keuangan ini mengacu pada data e-monitoring, itu juga sudah menunjukkan sebesar 50,15% ya, serta progres fisik sebesar 17,28%. Dan kami laporkan *kenapa* keuangannya lebih kecil, karena saat ini memang keuangan yang diserap terlebih dahulu dan ini nanti akan berprogres sesuai dengan pelaksanaan yang ada di lapangan. Dan nanti jumlah tenaga kerja yang saat ini terserap sebanyak 23.648 orang. Apabila kita bandingkan, saat ini kami laporkan pada RDP sebelumnya tanggal 28 Juni, progres itu masih 2,71%, ya dan fisiknya masih 0,51%. Sehingga kalau kita lihat, dalam waktu dua bulan ini sudah dilakukan percepatan pelaksanaan dan diharapkan nanti pada bulan November, ini kita bisa dapat selesai semuanya.

Kemudian selanjutnya, kami sampaikan juga progres pelaksanaan kegiatan untuk mendukung Presidensi G20 dan juga *event* internasional. Progress keuangan ini sudah sebesar 68,50% dari total alokasi anggaran 1,17 triliun dan progres fisiknya sebenarnya sudah, semuanya mendekati selesai, yaitu 93,56%. Adapun progres untuk masing-masing lokasi, mungkin bisa kita lihat di sini, untuk penataan koridor kawasan Mandalika, progres fisiknya sudah 85,58% ya, kita tinggal mendukung untuk yang segmen ketiga. Kemudian penataan kawasan mangrove dan revitalisasi bangunan VVIP, Bandara I Gusti Ngurah Rai, ini progres fisiknya sudah 79,41% dan kita harapkan ini nanti semuanya bisa selesai di akhir September atau pemanfaatannya, termasuk untuk TPST, di pertengahan Oktober 2022.

Kemudian untuk penataan kawasan dan renovasi bangunan di Taman Mini Indonesia Indah, progres fisik rata-rata sudah 96,98%. *Nah*, ini untuk agenda di Taman Mini, untuk G20 sudah dilaksanakan di 26, nanti akan dilanjutkan lagi untuk *event-event*, *set event* G20 dan *soft launching* Taman Mini di Oktober 2022.

Untuk meningkatkan fasilitas pendukung pariwisata di Loh Buaya, Pulau Rinca di Labuan Bajo, ini progresnya sudah 93,55%.

Berikut, ini juga merupakan infrastruktur di bidang Cipta Karya yang dikerjakan pada periode 2020-2021, yang siap untuk diresmikan tahun 2022 ini. Dan ini belum kita resmikan ini sudah kami usulkan untuk diresmikan, antara lain yaitu adalah Pasar Aksara di Kota Medan ya. Kemudian SPAM IKK, di Medan ini selain Aksara, juga ada air minum di Mebidang ya. Kemudian SPAM IKK di Way Sepagasan, ini juga di Kabupaten Pringsewu, ini juga belum diresmikan. PLBN Serasan di Natuna, ini sudah selesai dan belum diresmikan. Kemudian penataan kawasan Situ Bagendit ya, ini di Kabupaten Garut. Kemudian juga untuk penataan kawasan *rest area* di Puncak, Kabupaten Bogor. Kemudian juga SPAM Cibolerang di Garut, serta revitalisasi rumah Cimanggis di Kota Depok, ya. Juga penataan kawasan Borobudur di Kabupaten Magelang, ini juga sudah selesai, *concourse* nya. Kemudian penataan kawasan wisata laut, ini di Kabupaten Pekalongan ya, Pekalongan, ini juga belum diresmikan. Masjid Baiturrahman di Semarang, ini juga sudah selesai, sudah merubah wajah di Masjid Baiturrahman. Kemudian TPST Kabupaten Banyumas, ini sudah selesai, kemarin diresmikan oleh Ketua DPR, MPR. Kemudian juga TPA sampah di Karimun Jawa, Stadion Gelora Bangkalan, Kemudian juga TPA sampah di Kabupaten Kediri untuk, kemudian ada pembangunan asrama mahasiswa nusantara, ini di Kota Surabaya. Kemudian penataan kawasan kumuh di Kota Malang. SPAM regional Banjarbakula Kalimantan Selatan, ya. Kemudian Ipaka *Hole* di Samarinda dan juga pembangunan PLBN Yetetkun di Kabupaten Boven Digoel. Dan ada satu lagi untuk yang di Lasem ya, Lasem ini juga sudah selesai juga. Adapun daftar lengkap infrastruktur yang siap diresmikan, secara resmi juga akan kami sampaikan lebih lanjut ya, ada di paparan kami.

Bapak-Ibu sekalian,

Selanjutnya, kami akan melanjutkan untuk rencana alokasi Direktorat Jenderal Cipta Karya Tahun 2023. Kami laporkan bahwa usulan pagu indikatif tahun 2023 sesuai dengan surat Menteri PUPR kepada Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas tanggal 5 April ini sebesar 22,05 triliun. Dan berdasarkan dari surat bersama pagu indikatif tahun 2023 tanggal 18 April 2022, pagu indikatif Direktorat Jenderal Cipta Karya ini dialokasikan sebesar 14,25 triliun.

Selanjutnya sesuai dengan Surat Bersama pagu anggaran tahun 2023 tanggal 27 Juli 2022 dan juga surat Menteri PUPR tentang penyesuaian pagu anggaran tahun 2023 ini menjadi sebesar 25,03 triliun. Ini terdapat tambahan anggaran sebesar 10,386 triliun ya. Dan ini untuk dukungan pembangunan IKN, serta tambahan anggaran sebesar 600 miliar ya, ini untuk penuntasan kegiatan-kegiatan strategis, ya. Seperti MYC ya, lanjutan yang sudah selesai yang harus kita bayarkan di tahun 2023, serta juga terdapat pengurangan Pagu PHLN ini sebesar 211 miliar, ini pada saat *trilateral meeting* kemarin, ya. Adapun tambahan anggaran, ini dalam rangka untuk dukungan kegiatan

pembangunan IKN sesuai dengan yang kemarin disampaikan oleh Bapak Menteri, ini kami alokasikan untuk kegiatan-kegiatan, untuk air minum, ini sebagian besar to MWC lanjutan, ya, sebesar 622,55 miliar, ini untuk pembangunan pipa, kemudian jaringan distribusi utama, kemudian pipa transmisi dan juga jaringan distribusi pembagi, SPAM Sepaku ya.

Kemudian untuk Direktorat sanitasi ini sebesar 816,48 miliar. Ini antara lain untuk pembangunan IPAL di zona 1,2,3, kawasan inti pusat pemerintahan. Kemudian juga pembangunan untuk jaringan perpipaan air limbah ya pembangunan TPST satu di kawasan inti pusat pemerintahan dan juga pembangunan unit pengurukan residu untuk pengolahan SPAM IKN. Untuk bidang pengembangan kawasan permukiman, ini sebesar 1.212.000.000.000, ini antara lain untuk penyiapan *land development* di kawasan inti pusat pemerintahan. Kemudian juga penataan sumbu kebangsaan tahap 1 dan tahap 2, serta sistem kebakaran di kawasan inti pusat pemerintahan, dan juga ada MK induk di sini.

Kemudian di Direktorat Bina Penataan Bangunan, ini ada sebesar 7.692.000.000.000, ini untuk bangunan gedung di pusat pemerintahan. Kemudian gedung Sekretariat Presiden, Kantor Staf Khusus Presiden, kemudian juga Wisma Negara, kawasan, gedung kawasan di Kementerian Koordinator ya, tahap 1 dan tahap 2, kemudian juga gedung Kementerian Sekretariat Negara, gedung kantor kementerian/lembaga, masjid negara ya, kemudian juga kawasan Beranda Nusantara dan rencana pengembangan kawasan di KIPP, serta untuk *urban design development* di KIPP yang 1B dan juga 1C.

Kemudian untuk bidang perencanaan pengendalian, ini sebesar 40,24 miliar ini untuk MK induk, KIPP, dan juga operasional dari satgas IKN yang ada di Kementerian PUPR. Nah, tambahan anggaran ini untuk penuntasan kegiatan strategis MWC lanjutan, ini antara lain untuk SPAM regional Mebidang, kemudian juga SPAM KIT Batang ya, kemudian juga ada IPAL yang ada di kawasan terpadu Batang dan juga penataan kota lama Medan Kesawan, penataan kawasan Dieng, dan juga penyelesaian untuk pembangunan PLBN yang ada di Jagoi Babang, Labang, dan juga untuk penataan Pura Besakih, pembangunan Pasar Induk di Batu, Pasar Mardika dan juga Pasar Tanjungpinang, Pasar Tempe Di Wajo ya, kemudian juga ada tadi satu lagi adalah Pasar Sanggeng, nantinya.

Kemudian untuk struktur anggaran, pagu anggaran kita sebesar 25,03 triliun ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Untuk program dukungan manajemen ini sebesar 0,94 triliun. Kemudian ini nanti akan kita gunakan untuk pemenuhan wajib berupa gaji ya, tunjangan dan juga operasional perkantoran. Kemudian untuk program perumahan permukiman sebesar 24,08 triliun, ini terdiri dari rupiah murni 22 triliun, kemudian PHLN sebesar 2,08 triliun. Kemudian anggaran rupiah murni program perumahan permukiman yang sebesar 22 triliun ini kita gunakan untuk anggaran pendidikan ini sebesar 2,78 triliun, ini sudah termasuk untuk kegiatan *multiyears contract* untuk fungsi

pendidikan dan ada PHLN juga sehingga mungkin kira-kira sebesar 3 triliun nantinya. Kemudian untuk kegiatan optimalisasi aset, ini untuk OPOR, sistem penyediaan air minum, dan juga untuk TPA ini sebesar 0,15 triliun dan juga untuk cadangan darurat ya, untuk mobilisasi peralatan tanggap darurat ini sebesar 0,06 triliun. Kemudian untuk kegiatan dengan skema SBSN ini untuk SPAM Jatiluhur ini sebesar 0,48 triliun. Kemudian untuk kegiatan yang berupa IBM (Infrastruktur yang Berbasis Masyarakat) ini sebesar 2,45 triliun. Ini terdiri dari alokasi BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) sebesar 2,11 triliun dan juga untuk yang berupa *safe guarding*-nya ini sebesar 0,3 triliun. Dan pemenuhan kegiatan direktif penugasan pemenuhan RPJMN ya, ini sebesar 16,09 triliun. Ini terdiri dari 3,44 triliun ini merupakan paket kontrak tahun jamak ya, dan alokasi untuk kegiatan baru, SWC, ini sebesar 2,27 triliun. Dan yang sudah siap *readiness criteria*-nya dan nanti kita akan melaksanakan dengan menggunakan lelang dini di tahun 2022, serta untuk dukungan IKN ini sebesar 10,38 triliun.

Bapak-Ibu sekalian,

Untuk kegiatan air minum kami akan detailkan ya. Untuk kegiatan air minum, ini tahun 2023 alokasinya sebesar 4,16 triliun, ini antara lain untuk pembangunan dan peningkatan sistem penyediaan air minum, dengan sasaran *output* sebesar 2.206 liter per detik, ya. Ini antara lain untuk SPAM IKK Lotu di Nias Utara, kemudian SPAM Gunungsitoli, kemudian SPAM Kaldera, Motung, untuk Kabupaten Toba, kemudian ada SPAM mendukung Bakamla, kemudian ada SPAM Wirotho Agung di, SPAM Tual ya di Dulahlaut, kemudian SPAM di Rindam ya, mendukung Rindam Pattimura, kemudian juga SPAM Kopassus Batujajar-Bandung Barat, kemudian juga dukungan air minum untuk penanganan pasca abrasi Pantai Amurang ya, dukungan air minum untuk permukiman eks Timor Timur dan juga SPAM untuk Sekolah Pendidikan Polisi ya, Polda Maluku Utara, juga untuk perpipaan Katulampa untuk mendukung Istana Bogor, juga untuk SPAM regional Mebidang, Regional Benteng Kobema Wosokusas ya, SPAM Maminasata, SPAM Sengkang, SPAM KIT Batang, kemudian Ipahuntaptondo dan Duyu di kota Palu, kemudian juga SPAM Bintang Bano, ini menindaklanjuti dari bendungan Bintang Bano, SPAM Tarutung, kemudian juga SPAM Seropan-Gunung Kidul dan juga IPAL jaringan perpipaan Sepaku mendukung IKN, ada satu lagi yang mungkin lupa tertulis ya adalah SPAM Dairi.

Kemudian untuk pembangunan perluasan SPAM, ini ada pembangunan jaringan transmisi untuk mendukung SPAM regional Jatiluhur tahap 1, ini untuk distrik Cilincing, Pondok Kopi, dan juga Pondok Kelapa. Kemudian juga ada jaringan perpipaan untuk percepatan SPAM regional unggulan di Provinsi Jawa Timur, ya. Ini ada juga untuk jaringan distribusi utama untuk SPAM yang di Kota Semarang Barat ya, kemudian juga ini mendukung KPBU dan juga SPAM Kaligoro di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Kemudian optimalisasi SPAM, ini dengan sasaran *output* sebesar 1.050 SR, ini untuk SPAM IKK Gunung Kerinci, SPAM Air Seruk Kabupaten Belitung, SPAM IKK Pekkae/Tenate Rilau,

Barru, Kabupaten Barru, kemudian SPAM Kaimana, SPAM Air Bangis dan juga SPAM IKK Tapalang.

Selanjutnya untuk kegiatan bidang , di tahun 2023 ini alokasinya 4,08 triliun, ini antara lain untuk sistem pengelolaan air limbah domestik ya. Ini untuk melayani 16.600 KK, antara lain untuk Jakarta *Sewerage System*, Pekanbaru *Waste Water Treatment Plant*, kemudian perpipaan air limbah kota Jambi area barat, perpipaan air limbah zona utara di Pekanbaru, kemudian perpipaan air limbah di Kota Palembang, air limbah di Kota Makassar, IPAL RTH Kemayoran, juga IPAL untuk KIT Batang ya, juga ada optimalisasi IPLT Duri-Bengkalis, optimalisasi IPLT Kabupaten Maros, Palopo, IPLT Jugil, Lombok Utara dan juga IPLT Samosir dan pembangunan IPAL untuk mendukung IKN.

Untuk sistem pengelolaan persampahan, ini untuk melayani 26.500 KK ini antara lain adalah alat berat untuk TPA di pesisir selatan TPA Samosir, TPA di sampah regional Mamitarang, *solid waste treatment* Metro Bandung, kemudian juga TPST RDF untuk TPA regional Kebun Kongok, kemudian, ini di NTB, kemudian juga perluasan TPA Ijbalit-Lombok Timur, serta untuk pembangunan TPST mendukung IKN.

Kemudian untuk bidang pengembangan kawasan permukiman tahun 2023, ini alokasinya sebesar 2,49 triliun. Ini antara lain untuk permukiman kumuh perkotaan, yang ditangani secara terpadu ini seluas 300.006,90 Ha, ya. Ini antara lain untuk peningkatan kualitas kumuh di Kampung Inggris, Kediri, kemudian juga peningkatan kualitas kumuh di Lagasa, Kabupaten Muna, kemudian peremajaan kawasan kumuh Kedaung-Tangerang, peremajaan kumuh di Belawan Bahari di Kota Medan.

Kemudian untuk penataan kawasan strategis pariwisata, KSPN dan juga kegiatan strategis lainnya, ini seluas 430 Ha, ya. Ini antara lain untuk penataan kawasan *Waterfront City* Pangururan dan Tele di KSPN Toba, penataan kawasan Wangi-Wangi Wakatobi, kemudian juga penataan kawasan Seruni, ini di KSPN Bromo-Tengger-Semeru dan juga penataan kawasan Kaimana dan ada penataan kawasan Waduk Gajah Mungkur di Wonogiri, penataan kawasan Dieng, serta penataan kawasan Gedong Songo, dan terakhir adalah penataan untuk kawasan di IKN, ini di kawasan KIPP dan juga penataan Sumbu Kebangsaan.

Untuk kegiatan penataan bangunan tahun 2023, alokasinya 9,46 triliun. Ini antara lain untuk pengembangan penyelenggaraan bangunan gedung seluas 10.750 m² antara lain untuk TSTA Polung di Sumatera Utara, gedung parkir motor kantin DPR RI yang akan kita lakukan 2023, Mako Paspampres, kemudian ada juga *house screen* Politeknik, ada juga untuk Dinas ESDM, ini akibat dampak untuk Balekambang di Jawa Tengah, kemudian juga lapas di kelas II Sorong, kemudian *Youth Creative Hub* Inspiratif, kemudian ada SPKKL di Natuna, Rumah anak Asmat ya, kemudian juga Masjid Baiturrahman, eh Baitul Arham ya, ini di Sumenep ya, kemudian Graha Pemuda Kompleks Katedral di Jakarta, kemudian Sasana Kusuma Bangsa Makopasus dan juga

gedung AMC Rumah Sakit Anutapura di Sulawesi Tengah, serta *rehabilitation of hospital*-Undata, ini di Sulawesi Tengah.

Kemudian pengembangan penyelenggaraan penataan bangunan lingkungan di 20 kawasan, ini masih ada perbaikan untuk *backpack* di Meniting, Senggigi, kemudian Borasi di Papua Barat, PLBN ini juga penyelesaian-penyelesaian ini di Jagoi Babang dan Long Nawang dan Long Midang, serta Labang. Kemudian ada sarpras PLBN Napan, ini NTT, Rumah Betang di Lunsar Hilir, kemudian Desa Sumberejo Ngablak, kemudian Pura Besakih, kemudian juga Fort Willem di Ambarawa, Taman Balekambang, penataan Kawasan Wisma Negara Tenjoresmi, kemudian revitalisasi RTH di Dolokgede Bojonegoro, serta kawasan religi untuk umat Buddha, Jumprit, ya dan juga RTH Borasi ini di Papua Barat, serta pembangunan IKN, ini berupa kawasan dan bangunan pemerintahan, Kantor Kemenko, Kemensesneg, masjid negara, dan juga beranda nusantara. Selanjutnya kegiatan prasarana strategis, ini khususnya dengan fungsi pendidikan tahun 2023. Ini alokasinya 3 triliun ya, antara lain untuk rehabilitasi, renovasi, prasarana sarana sekolah madrasah yang tersebar di seluruh Indonesia, termasuk juga renovasi SMA Taruna Nusantara.

Kemudian pembangunan rehabilitasi perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi keagamaan Islam nusantara. Ini ada gelanggang inovasi dan kreativitas UGM, Universitas Negeri Padang, FIA Universitas Indonesia, kemudian Universitas NU (Nahdhatul Ulama) dan juga Universitas Andalas, Institut Teknologi Kalimantan, IAIN Metro, Universitas Malikulsaleh, Universitas Negeri Gorontalo, UIN Antasari Banjarmasin, STT Sapta Taruna, dan juga ini ada Bank Genplasma Nuftah Padi ini di Sukamandi, kemudian juga ISI Yogyakarta, IAIN Batusangkar, Politeknik Negeri Kupang, Universitas Riau, dan juga kampus lapangan geologi di Karangsambung. Untuk kegiatan bidang prasarana strategis khususnya,

F- P. GERINDRA (SUDEWO, S.T., M.T.):

Pimpinan. Izin sebentar, Bu.

KETUA RAPAT:

Sebentar, Bu, silakan, Pak Dewo.

F- P. GERINDRA (SUDEWO, S.T., M.T.):

Bu Dirjen tadi *kayaknya* menyebut SMA Taruna Nusantara, betul ya, Bu? Betul. Oh apa kegiatan apa itu, Bu?

DIREKTUR JENDERAL CIPTA KARYA KEMENTERIAN PUPR RI (Ir. DIANA KUSUMASTUTI, M.T.):

Renovasi, Pak.

F- P. GERINDRA (SUDEWO, S.T., M.T.):

Terima kasih, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Kalau yang itu kan bisa ditanyakan sebentar dalam pertanyaan, tapi *ndak* apa-apa, sudah lewat, Pak, terus. Silakan, Bu Dirjen.

DIREKTUR JENDERAL CIPTA KARYA KEMENTERIAN PUPR RI (Ir. DIANA KUSUMASTUTI, M.T.):

Mohon izin, kami lanjutkan.

Untuk kegiatan prasarana strategis dalam rangka fungsi permukiman tahun 2023 alokasinya 0,56 triliun, ini antara lain untuk: rehabilitasi Pasar Gede Klaten tahap 2, Pasar Mardika, Pasar Thumburuni di Fakfak, kemudian Pasar Induk Kota Batu, Pasar Tempe Sengkang di Wajo, ini lanjutan, Pasar Alesa-Nias Utara, Pasar Baros-Serang, Pasar Banjarsari-Pekalongan, Pasar Tanjung Pinang, dan juga ada Pasar Sanggeng, ya. Kemudian pembangunan prasarana olahraga, ini untuk *indoor multifunction stadium* yang ada di Senayan dan juga *venue* untuk panjat tebing, ini juga di GBK juga.

Terakhir Bapak-Ibu sekalian, ini untuk rencana program infrastruktur yang berbasis masyarakat tahun 2023. Kami merencanakan alokasi untuk bantuan atau masyarakat itu sebesar 2,11 triliun, sesuai dengan apa yang disampaikan Bapak Menteri pada saat raker, dan nanti perkiraan untuk tenaga kerja itu sebesar 62.000 orang. Ini terdiri untuk kegiatan Pamsimas di 1.725 desa dengan serapan 17.150, kemudian kegiatan Sanimas di 1.156 lokasi dengan rencana serapan 17.790 orang, kegiatan sanitasi di pendidikan keagamaan, ini di 1.381 lokasi dengan rencana serapan 5.780 orang, kegiatan TPS3R di 106 lokasi dengan rencana serapan 1.590 orang, kegiatan PISEW 450 Kecamatan dengan rencana serapan 13.518 orang, serta untuk penanganan ekstrem, ini di 70 lokasi dengan rencana serapan 6.095 orang. Sampai dengan saat ini, kami masih melakukan penajaman, perbaikan, sesuai dengan hasil evaluasi pelaksanaan IBM di tahun 2022. Sekaligus saat ini menindaklanjuti raker kemarin, kami langsung rapim bersama Bapak Menteri PUPR. Kami sudah melakukan *exercise* dan sekaligus kami akan menunggu arahan Bapak Menteri lebih lanjut, terkait dengan infrastruktur yang berbasis masyarakat secara keseluruhan di Kementerian PUPR.

Secara garis besar, kami juga perlu sampaikan *timeline* untuk pelaksanaan kegiatan infrastruktur berbasis masyarakat tahun 2023 ini, kami akan melakukan penjaringan dan verifikasi usulan, sampai dengan akhir bulan Oktober 2022, ya, ini kita harapkan semua usulan ini sudah masuk dan ini sudah final, sehingga nanti kita bisa masukkan kepada DIPA tahun 2023. Dan kami nanti akan melakukan persiapan SK lokasi dan juga penyusunan juknis, ini kami akan lakukan sampai dengan 2, eh, Desember 2022. Rekrutmen, mobilisasi pelatihan TFL fasilitator, karena DIPA-nya sudah, ada kami

harapkan nanti di bulan Februari ini sudah masuk semuanya. Dan kami akan lakukan sosialisasi penyusunan DED, RAB dan juga penyusunan RKM ini sampai dengan akhir bulan Juni, sehingga nanti penyusunan PKS konstruksi untuk pencairan BLM ini kami lakukan sampai dengan akhir bulan Agustus 2023. Serah terima kami nanti bisa lakukan sampai dengan akhir Oktober '23.

Nah, Bapak-Ibu sekalian, untuk tahap penyiapan pelaksanaan program infrastruktur berbasis masyarakat di tahun 2023 ini, kami berharap nanti bisa disusun sesuai dengan *timeline* ya, pentahapan kegiatan dan periode usulan kegiatan IPM, ini sudah bisa kita mulai bulan September 2022. Kami nanti berharap sudah bisa masuk semuanya dan nanti kami berharap usulan tersebut dapat disampaikan akhir bulan Oktober. Dan selanjutnya nanti kami akan bahas dan kami nanti akan mengundang TA-TA dari seluruh Anggota, bersama-sama untuk melakukan tes infrastruktur yang berbasis masyarakat, untuk dapat kami programkan di DIPA awal 2023. Kami berharap nanti dapil-dapil bisa mengutus TA-TA-nya untuk kami lakukan semacam konsinyasi ya, di bulan September 2023. Mudah-mudahan nanti semuanya sudah rampung semuanya, sehingga masuk di dalam DIPA 2023 ini dan bisa kita lakukan pelaksanaannya. Masuk, jadi kita tidak perlu revisi lagi di awal tahun 2023, ini akan melakukan percepatan-percepatan. Demikian.

Mohon maaf, tadi kami menyampaikan, bahwa progres di 2023 untuk infrastruktur berbasis masyarakat kita sudah mulai, jadi masih merupakan rembuk-rembuk warga dan ini sudah kita mulai, tapi pelaksanaan belum kami bisaayangkan progres-progres pembangunannya.

Mungkin demikian Pimpinan dan Bapak-ibu sekalian yang bisa kami laporkan, eh laporkan, kurang lebihnya kami mohon maaf dan kami nanti bisa diskusi selanjutnya. Terima kasih dan,

*Wabillahi taufiq walhidayah,
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

KETUA RAPAT:

Pak Ketua, mungkin ada?

F- PDIP (LASARUS, S.Sos., M.Si.) – KETUA KOMISI V DPR RI:

Iya, baik.

KETUA RAPAT:

Silakan.

F- PDIP (LASARUS, S.Sos., M.Si.) – KETUA KOMISI V DPR RI:

Sedikit, Bu Sekjen, Bu Dirjen. Pertama, soal *timeline* tadi, Bu, ya terkait dengan usulan ini, mungkin teman-teman sekalian ya, ini saya rasa supaya kita

ada ada kesepahaman, keseragaman, karena ini nanti terkait dengan ada verifikasi, Pak, ada masa verifikasi, nanti kemudian SK, dan seterusnya, *gitu loh*. Supaya di 2023 ini kalau bisa lebih cepat kan lebih baik penyelesaiannya. *Nah*, yang bersifat teknis, apa namanya, bersifat administratif maksud saya, usulan ini kan sifatnya administratif. *Nah*, itu tadi kalau saya tidak salah Ibu kasih tenggat waktu kan bulan September, Bu, ya, September 2022.

DIREKTUR JENDERAL CIPTA KARYA KEMENTERIAN PUPR RI (Ir. DIANA KUSUMASTUTI, M.T.):

September masuk, kemudian nanti kita akan melakukan konsolidasi dan,

F- PDIP (LASARUS, S.Sos., M.Si) – KETUA KOMISI V DPR RI:

Selesai di bulan Oktober? Oke, baik.

DIREKTUR JENDERAL CIPTA KARYA KEMENTERIAN PUPR RI (Ir. DIANA KUSUMASTUTI, M.T.):

Karena Oktober itu DIPA RKA K/L harusnya sudah masuk semuanya.

F- PDIP (LASARUS, S.Sos., M.Si.) – KETUA KOMISI V DPR RI:

Oke baik, ini ini saya rasa perlu kita pahami bersama, teman-teman. Karena kadang-kadang keterlambatan usulan dari kita, itu akhirnya mengganggu *ritme* di sana sebetulnya, *gitu* kan. Saya rasa per hari ini sudah siaplah, Bu, ya nanti kita berharap usulan-usulan ini bisa di sampaikan di bulan September dan di bulan Oktober itu sudah bisa diolah, diselesaikan oleh kementerian, sehingga SK bisa cepat dikeluarkan, itu yang pertama saya rasa ini perlu kesepahaman. Khusus untuk yang Cipta Karya dan juga lain-lain, saya pikir juga sama, Pak, ya. Karena diperlukan verifikasi juga nanti, itu SK itu kan dikeluarkan setelah verifikasi, Bu, nanti kan begitu. Verifikasi, usulan, abis diusulkan, teman-teman di balai kan verifikasi. *Nah*, kalau tempatnya memenuhi *readiness criteria* yang sudah ditetapkan oleh PU, baru di SK-kan kan begitu prosesnya, ini perlu dipahami, ini makan waktu ini, teman-teman sekalian. Supaya kita lebih cepat lebih baik, *gitu loh*, supaya teman-teman di lapangan bisa cepat memverifikasi lokus dari kegiatan-kegiatan yang diusulkan.

Kemudian yang kedua, Bu, saya mau tanya ini, yang di sini di pengembangan penyelenggaraan, sebelum ini lewat, takutnya nanti kita lupa, kan ini sifat data ya. Bangunan di lingkungan 20 kawasan ini, saya tidak melihat progres penanganan terkait dengan pos lintas batas di Sungai Kelik, Bu, Sungai Kelik di Kalimantan Barat ya. Kalau saya *ndak* salah, penlok-nya sudah itu, penetapan lokasinya sudah, tapi saya belum lihat progres-nya ini. Karena di sana, saya lihat medannya agak, konturnya itu berbukit-bukit ya, itu perlu *land clearing* dulu, perlu apa namanya *cut and fill* dulu, dan seterusnya. Saya berharap, 2022 ini kemarin ditangani. Dulu saya pernah bawa rombongan ke

sana, Bu, ya, dari termasuk dari Balai, Kepala Balainya juga ikut, Pak Deva dulu, ya. Saya harap untuk tahun 2022 ini, 2023 ini, hendaknya masuk, Bu, dalam apa namanya program di Cipta Karya ya, ini banyak dipertanyakan oleh masyarakat perbatasan sana. Karena di sini masih, orang masih melintas lewat jalan darat aja, ya, ini masih jalur daratnya masih, jalur apa nama, orang sana bilang itu jalur tikus, Bu, masih sampai berfungsi sampai hari ini.

Kemudian ini yang NU ini, saya *pengen* tahu *nih*, apakah usulan kita *nih* masuk, karena saya ada usulkan ya Universitas Nahdhatul Ulama Pontianak, apakah ini yang Pontianak atau yang bukan? Ini saya *pengen* tahu.

F- P. GERINDRA (Ir. EDDY SANTANA PUTRA, M.T.):

Interupsi, Pimpinan. Ini sudah masuk materi?

F- PDIP (LASARUS, S.Sos., M.Si.) – KETUA KOMISI V DPR RI:

Belum, belum, ini karena data ini, Pak, ya nanti kalau memang sudah masuk, ya sudah *gitu loh*, nanti saya *ndak* perlu tanya lagi. Silakan, Bu.

KETUA RAPAT :

Ya, langsung, Bu, atau nanti dijawab sebentar, mau dijawab sekarang? Sebentar ya. Oh mau di jawab sekarang, silakan.

DIREKTUR JENDERAL CIPTA KARYA KEMENTERIAN PUPR RI (Ir. DIANA KUSUMASTUTI, M.T.):

Baik, Bapak.

Jadi untuk PLBN ada dua hal, Bapak, yang PLBN ini, ada dua PLBN yang sampai dengan saat ini tidak bisa kita lakukan, itu karena masalah lahan, Pak. Yang pertama adalah Seklik tersebut, yang kedua adalah Oepoi, Bapak. Ini terkait dengan masalah lahan dan masalah perbatasan tersebut. Karena masalah lahan akhirnya tidak beres, kami tidak bisa masuk, Bapak, untuk hal tersebut, sehingga kami sudah berkomunikasi dengan teman-teman BNPP bahwa sepakat untuk ini sementara kita pending, Pak.

F- PDIP (LASARUS, S.Sos., M.Si.) – KETUA KOMISI V DPR RI:

Persoalannya di lahan ya?

DIREKTUR JENDERAL CIPTA KARYA KEMENTERIAN PUPR RI (Ir. DIANA KUSUMASTUTI, M.T.):

Lahan, Bapak. Oepoi juga masalah lahan juga, masalah perbatasan kita rebutan lahan dengan ini, Pak, yang Oepoi ini dengan NTT, NTT, Pak, mohon maaf Oepoi ini di NTT, Pak. Jadi dengan Timor Leste, ini masih belum.

Mohon izin, Bapak, untuk yang NU Pontianak, sampai dengan saat ini kami belum usulkan karena masalah *readiness criterianya*, Bapak, yang belum siap, Bapak. Kami belum mendapatkan untuk DED-nya, mungkin juga lahannya juga, kami mohon bantuan untuk percepatan.

Makasih, Bapak.

KETUA RAPAT:

Baik, *makasih*, Bu Dirjen. Selanjutnya kami persilakan, Pak Iwan, Dirjen Perumahan.

DIREKTUR JENDERAL PERUMAHAN KEMENTERIAN PUPR RI (IWAN SUPRIJANTO, S.T., M.T.):

Terima kasih, Pimpinan.

Bismillahirrohmanirrohim,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Shalom, om swastiastu, namo budhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua,

Yang saya hormati dan saya banggakan, Bapak-Ibu Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi V DPR RI, baik yang hadir secara fisik di ruangan ini, maupun secara virtual,
Yang saya hormati pula Bu Dirjen Cipta Karya beserta seluruh jajaran, dan Yang saya banggakan, para pejabat tinggi di lingkungan Dirjen Perumahan,
beserta seluruh jajaran balai dan satker yang saya minta hadir secara virtual,

Sebelum saya memulai atau menyampaikan paparan ini, izinkan saya melaporkan bahwa pada saat ini ada empat direktur yang tidak bisa hadir mendampingi saya. Jadi mohon izin, ada tiga direktur yang saat ini harus isoman, Pak, tapi mengikuti secara virtual. Jadi Pak Direktur SSPP, Pak Edward Abdurrahman, hadir secara virtual, mungkin bisa ditayangkan. Kemudian Ibu Direktur Rumah Khusus, Bu Yusniwati, juga hadir secara virtual. Satu lagi adalah Pak Direktur Rumah Umum dan Komersial, Pak Fitrah Nur, juga hadir secara virtual, serta ada Pak Direktur Rumah Susun, yang mungkin bersama Pak Anang, Direktur Air Minum, saat ini mewakili saya untuk ke Saumlaki dalam rangka kunjungan Bapak Presiden ke Maluku.

Kemudian mohon izin, saya menyapa para Kepala Balai yang hadir bersama di dalam acara ini, pertama, Kepala Balai Sumatera 1, Pak Tengku Faisal mohon bisa ditampilkan, oke, Pak Faisal. Kemudian Kepala Balai Sumatera 2, Pak Iswanto. Sumatera 3, Pak Zubaidi, Sumatra 3, oh ini Pak Zubaidi di mana? Masih di *unmute*, kalau tadi laporannya ada Pak Zubaidi ya. Kemudian Sumatera 4, Pak Tambat Yulis, Sumatera 4, oke. Sumatera 5, Pak Joni Rahman. *Loh*, wah ini bukan istrinya Pak, masalahnya. Oke, mohon maaf.

Kemudian Kepala Balai Kalimantan 1, Pak Andi Suganda, Kalimantan 1. Kalimantan 2, Pak Hujurat, oke, Pak Hujurat, belum ada? Konfirmasinya sudah ada tadi, mohon bisa ditayangkan, oh iya kita lewati dulu.

Jawa 1, Pak Fista, Jawa 1 kok *delay* ya, oke, Pak Fista. Jawa 2, Pak Egi, Jawa 2, Jawa Barat, Bu. Jawa 1 Banten dan DKI, oke. Jawa 3.

Masuk Sumatra 5 Pak, Sumatra 5. Jadi, sudah, Pak, yang tadi, Pak, Sumatera Selatan, Lampung dan Bangka Belitung, oke.

Jawa 3, Jawa 3 ini Jawa Tengah dan DIY.

F- P. NASDEM (Drs. H.TAMANURI, M.M.):

Pak, interupsi, Pak, disebutkan, Pak, Jawa 3 apa, Sumatera, itu *loh* jangan, Bapak yang tahu, sebutkan, jadi *enggak* perlu bertanya.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Sumatera sudah lewat, Pak.

DIREKTUR JENDERAL PERUMAHAN KEMENTERIAN PUPR RI (IWAN SUPRIJANTO, S.T., M.T.):

Baik, Jawa 3, ini untuk Jawa Tengah dan DIY. *Nah*, ini Pak Salahuddin Rasidi. Kemudian Jawa 4, ini untuk Jawa Timur dan Bali, Pak Sultan Sidik, oke.

Kemudian Nusa Tenggara 1. Oh, Pak Sultan yang menghadap kamera, Bu, yang langsung menghadap kamera. *Nah*, sebelahnya itu Kasatkernya untuk Jawa Timur, Pak. Kemudian Nusa Tenggara 1, Bu Rini Diah Marwati, oke, ini hanya untuk NTB. Kemudian Nusa Tenggara 2, untuk NTT, Bu Yublina, oke. Kemudian Sulawesi 1, ini untuk Gorontalo dan Sulawesi Utara, Pak Reky Walter, ya sedang mengikuti diklat. Kemudian Sulawesi 2, Pak Bachtiar, ini juga sedang mengikuti diklat, ini wilayahnya adalah Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat. Lalu Sulawesi 3, ini Pak Iskandar Ismail, ini untuk wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara. Sulawesi 3, mohon ditampilkan, Sulawesi 3 oke ini mohon lebih cepat ya.

Kemudian berikutnya Maluku, membawahi Maluku dan Maluku Utara, Pak Wayan Suardana. Selanjutnya Papua 1, *nah*, ini untuk Papua, Provinsi Papua, Pak Faisal Sudarno, Papua 1. Terakhir, Papua 2, ini untuk wilayah Papua Barat, Pak Yance, Pak, bisa, oke.

Baik, tadi yang Sumatera 5 dan Sumatera 3 tadi, Sumatera 3 ini wilayahnya Sumatera Barat, Riau dan Kepulauan Riau, dan Kepri, Pak Zubaidi. Oke, nanti mungkin kami sampaikan.

Baik, Bapak-Ibu sekalian,

Selanjutnya kami ingin menyampaikan, yang tadi ada secara garis besar ada dua hal yang ingin kami sampaikan, kaitan dengan evaluasi pelaksanaan Tahun Anggaran 2022 dan rencana program dan anggaran tahun 2023. Pertama, untuk evaluasi dan progres tahun 2022, perlu kami sampaikan bahwa pagu awal Direktorat Jenderal Perumahan Tahun 2022 adalah 5,1 triliun, yang dalam perkembangannya dalam RDP terakhir kami laporkan menjadi 6,9 triliun, karena ada tambahan *loan* NAHP yang digunakan untuk program penanganan kemiskinan ekstrem, sesuai dengan Inpres Nomor 4 Tahun 2022. Yang kemudian pada RDP kesempatan hari ini, kami sampaikan bahwa pagu Direktorat Jenderal Perumahan saat ini adalah 7,596 triliun ya, dengan penambahan anggaran yang baru terbit revisinya. Pertama adalah alokasi untuk pembayaran bencana Siklon Seroja yang ada di NTT, kurang lebih 193 miliar dan alokasi untuk dukungan pembangunan infrastruktur IKN, ya, yang dilaksanakan secara MWC tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Di mana alokasi pada tahun 2022 ini ada 479 miliar yang diamanatkan kepada kami, sehingga total adalah 4, apa, menjadi 7,59 triliun.

Progres keuangan pada, sampai dengan hari ini, yang kita bisa, yang kami laporkan tanggal 30 jam 4 sore, adalah 57,31%, progres fisik 52,14%, ini jauh lebih tinggi dibanding tahun lalu. Jadi kami ucapkan terima kasih, Bapak-Ibu sekalian, dukungannya, dari evaluasi tahun lalu. Kami, Direktorat Jenderal Perumahan, hanya mampu menyerap 82%, jadi yang paling rendah di Kementerian PUPR. Tapi dengan dukungan Bapak-Ibu sekalian, dengan kami upayakan ada perubahan tata kelola dan sebagainya, *Alhamdulillah* hari ini malah sudah 58 sebenarnya, Pak, secara progres secara *real-time*, dan ini yang tertinggi di Kementerian PUPR saat ini, Pak. Jadi kami ucapkan terima kasih.

Dan syukur *alhamdulillah* kami perlu sampaikan juga, khusus untuk kegiatan Padat Karya sampai dengan, mungkin bisa ditayangkan progres Padat Karya yang BSPS. Dengan strategi, kemarin kita lakukan, berarti SK secara bertahap, saat ini sudah dilaksanakan, realisasinya 90,98%, jadi dari 103.000 unit, sudah 93.709. SK terakhir sudah saya tandatangani terakhir minggu yang lalu, semoga di lapangan minggu ini 100% sudah bisa terealisasi. Ini di luar kegiatan yang terkait dengan penghapusan kemiskinan ekstrem yang memang baru berjalan. Ini kami sampaikan juga daya serapnya sudah 96, 96,33%, penyerapan tenaga kerja juga sudah 187.418 orang, ya.

Kemudian mungkin satu hal yang lagi yang kami laporkan di sini adalah kegiatan kontraktual ya, paket-paket kontraktual. Baik itu yang SWC, MWC baru, maupun MWC lanjutan, total adalah sebanyak 400 paket, yang kami laksanakan dengan nilai 1, hanya 1,9 triliun. Jadi paket kontraktual DJP dengan alokasi anggaran tadi 7,5, hanya 1,9 triliun. Di mana 324 paket sudah terkontrak dengan nilai 1,597 triliun, 21 paket dalam tahap persiapan kontrak dengan Pagu DIPA hanya 95 miliar ya, kemudian ada 55 paket yang saat ini sedang proses tender senilai 218, ini mayoritas yang sedang proses tender ini paket-

paket OPOR dan paket-paket yang MWC baru 2022 dan meluncur ke 2023. Karena ini penugasan-penugasan baru ataupun yang secara kesiapannya baru dimulai di semester II 2022.

Selanjutnya, kami ingin menyampaikan rencana anggaran, rencana program dan anggaran tahun 2023. Pertama, isu strategis yang kami hadapi pada Tahun Anggaran 2023 yaitu: Pertama, adalah anggaran kami alokasikan untukantisipasi kegiatan yang diusulkan sebagai kegiatan tahun jamak atau MWC. Kemudian kegiatan prioritas, termasuk OPOR tahun 2023, direktif presiden dan direktif menteri, penanganan bencana, kemudian aspirasi dan hasil kunjungan kerja, kemudian pembangunan ibukota negara, karena saat ini juga sudah masuk DIPA, penanganan penghapusan kemiskinan ekstrem, dan kegiatan baru yang bersifat prioritas. Kami laporkan bahwa berdasarkan pagu indikatif ya, jadi kalau yang sekarang sudah pagu anggaran, pagu indikatif sebagaimana RDP yang lalu, alokasi Dirjen Perumahan adalah 5,9 triliun. Alokasi untuk rumah susun adalah 1,887 triliun, untuk membangun 3.187 unit, termasuk di antaranya adalah kegiatan-kegiatan yang meluncur dari tahun 2022 – 2023 secara MWC, termasuk program OPOR sebanyak 83 *tower*.

Kemudian di dalamnya ini juga ada 66 *tower*, yang merupakan kegiatan aspirasi. Kemudian pembangunan rumah khusus, ini 404 triliun, ini untuk membangun rumah khusus sebanyak 2.484, di dalamnya ini termasuk ada *loan* CSRAP untuk penyelesaian pembangunan huntap di Sulawesi Tengah, Palu, Sigi, dan Donggala. Kemudian pembangunan perumahan untuk ex-pengungsi warga, ex-pengungsi Timor-Timur, kemudian penanganan bencana, tadi juga bersama dengan Cipta Karya untuk yang di Amura dan beberapa daerah lainnya, serta kegiatan OPOR untuk rumah khusus sebanyak 382 unit.

Kemudian untuk BSPS, ini ada alokasi 3,721 triliun, untuk bantuan rumah swadaya sebanyak 103.000 *unit* melalui skema BSPS dan ini alokasi termasuk biaya perencanaan, pengendalian, monev atau semacam *safe guard*-nya, begitu.

Bapak-Ibu sekalian,

Perlu kami sampaikan ini alokasi ini masih alokasi semula, di mana tadi juga sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Dirjen Cipta Karya, bahwa usulan dari Bapak-Ibu sekalian, yang pada Raker kemarin disampaikan, telah dibahas bersama kami. Secara prinsip kami sampaikan, bahwa Bapak Menteri sangat mendukung ya kegiatan yang diusulkan, dan untuk itu menugaskan kepada kami para Dirjen untuk melakukan *exercise*. Masing-masing direktorat jenderal telah melakukan *exercise*, telah melakukan *exercise*, Pak, dan menghasilkan skenario yang hari kemarin dipimpin oleh Kepala Biro Perencanaan, mewakili Bapak Sekjen, untuk dilakukan konsolidasi antar direktorat jenderal sebelum dimintakan arahan kepada Bapak Menteri. Karena konsekuensi dari usulan tadi, berpotensi adanya pergeseran anggaran antar program ya, antar unor.

Jadi mohon izin, karena Bapak Menteri sedang beristirahat, maka keputusan akan kami sampaikan nanti kemudian atau setidaknya pada Raker dengan Bapak Menteri PUPR.

Kemudian untuk alokasi anggaran yang lain, kaitan dengan PSU, untuk rumah umum, sebesar 407 miliar, ini untuk pembangunan PSU perumahan MBR sebanyak 27.825 unit dan lima lokasi PSU jalan akses perumahan. Ini dalam rangka tadi yang disampaikan yang diawali oleh Bapak Pimpinan, perlu adanya strategi untuk mengatasi *back log* perumahan. Jadi stimulan PSU rumah umum ini adalah upaya stimulasi kepada para pengembang MBR, untuk mendorong penyediaan perumahan khususnya bagi MBR untuk percepatan menutup *back log* perumahan yang ada. Alokasi lain adalah dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya, yaitu sebesar 519 miliar, yang terdiri dari belanja operasional dan non operasional sebesar 305 miliar, dan dukungan lain, 214 miliar.

Perlu kami laporkan, pada, sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Menteri, bahwa pagu anggaran dari Dirjen Perumahan bertambah 1,037 triliun. Di mana penambahan tersebut, ada penambahan pagu PHLN, tapi sebenarnya ini hanya penyesuaian angka terkait dengan kurs, dari Rp10.377.915.000,00 menjadi 10.380.000.000, ya ini merupakan pembulatan.

Kemudian penambahan anggaran untuk dukungan IKN sebagai bagian dari MWC, kalau tahun ini dialokasikan tadi 479 miliar, maka di 2023, alokasinya adalah 537 miliar. Kemudian ada penambahan anggaran dalam rangka penuntasan proyek strategis infrastruktur, yang awalnya ini digunakan untuk yang semula untuk penghapusan kemiskinan ekstrem, itu kami tidak bisa alokasikan, belum bisa alokasikan, maka ini dialokasikan tambahan sebesar 500 miliar. Ini yang kemudian, tetapi saya sampaikan tadi, ini yang kami masukkan sebagai *exercise* tadi, Pak, sebagai *exercise* untuk dukungan yang BPS tadi. Jadi pada kesempatan nanti, akan, komposisinya perubahan dengan alokasi anggaran, apabila tidak terjadi pergeseran maka alokasi yang tadi, penghapusan kemiskinan ekstrem menjadi bagian dari BPS, sehingga saya sangat berharap dari usulan-usulan BPS tadi sebagian besar di antaranya minimal 20% diantaranya, bisa merupakan kontribusi membantu kami untuk penanganan kemiskinan ekstrem, begitu.

Dan dengan penyesuaian pagu anggaran tersebut menjadi 6,9 triliun, maka distribusi per sektor, perlu kami sampaikan adalah, untuk rumah susun ya 1,942 triliun untuk membangun 3.535 unit rumah susun. Ini mungkin kami sebutkan, beberapa di antaranya Bapak-Ibu sekalian, karena jumlahnya sangat banyak ya, ini rumah susun RSUD Raden Mataher Jambi, ini MWC 2022–2023, rumah susun Institut Teknologi Keling Kumang, ini di Kalimantan Barat, ini juga MWC 2022–2023, rumah susun Ponpes Kasyiful Anwar, rumah susun Ponpes Al-Anwar Bangkalan, Rusun STAIN Kendari Kampus 2, Rusun Kementerian Keuangan di Jayapura dan Merauke, kemudian Rusun Kolaborasi di Kedawung dan Tangerang, ini *kayak* rumah susun kaitan dengan penanganan penataan kumuh, berkolaborasi dengan Direktorat Jenderal Cipta Karya, dan ini juga termasuk beberapa anggaran kegiatan MWC lainnya.

Jadi, kemudian ada program Opor sebanyak 82 *tower*, serta untuk dukungan IKN, ini untuk yang terkait dengan rumah susun, adalah kami membangun hunian pekerja konstruksi di IKN, yang akan menampung minimal 15.600 orang pekerja, ini MWC tahun 2022—2023. Tapi *Inshaallah* ini secara bangunan fungsional akan kita selesaikan sebelum akhir 2022 ini. Karena ini adalah fasilitasi untuk tenaga kerja yang akan bekerja pada proyek-proyek dari beberapa direktorat jenderal yang terkait dengan dukungan IKN ini, jadi ini harus kami selesaikan.

Mungkin sedikit ditampilkan, untuk yang, untuk hunian pekerja konstruksi. Ini adalah teknologi modular yang cepat bangun yang kami siapkan, bangunannya 4 lantai, nanti modelnya barak, ada 22 *tower* yang fasilitasnya nanti kami lengkapi. Ada fasilitas kesehatan, ada fasilitas akomodasi untuk kantin dan sebagainya, pertokoan, tempat ibadah, dan sebagainya, ini adalah cara kerja baru di dalam kita membangun di IKN.

Jadi ini kan kita bangun secara cepat dengan teknologi. Dan secara teknologi ini adalah teknologi produk dalam negeri, teknologi anak bangsa dan ini yang kita prioritaskan untuk kita gunakan. Karena banyak tawaran-tawaran dari beberapa negara lain, meskipun cepat, untuk bisa mendukung IKN. Jadi kami berusaha mengutamakan dan memprioritaskan untuk itu.

Selanjutnya kami sampaikan, untuk pembangunan rumah khusus ini senilai 1,391 triliun, ini memang bertambah. Di mana tambahannya salah satunya juga tadi untuk dukungan IKN yang ditugaskan ke kami yaitu pembangunan rumah tapak jabatan Menteri di IKN, jadi itu sebanyak 36 unit. Kemudian yang rumah khusus ini, tadi saya sampaikan jumlahnya 26.260 unit, antara lain untuk, ini sebenarnya bukan antara lain, tapi mayoritas untuk masyarakat yang terdampak bencana alam dan konflik sosial. Jadi kami menyelesaikan untuk yang di Sulawesi Tengah, karena satu bulan lagi ini sudah ulang tahun yang ke-4, *gitu* ya, penanganan yang gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah, ini harus kita tuntaskan. Kemudian di Amurang-Minahasa Selatan, kemudian eks warga, eks-pengungsi Tim-Tim, ini PR yang harus kita tuntaskan janji Presiden sebelumnya dan Presiden saat ini, ini kurang lebih juga 2.100 yang harus kita tuntaskan. Kemudian ada bencana yang di Lebak, dan ada beberapa konflik sosial, termasuk di Sampang ya, yang harus kita selesaikan, iya. Ini antisipasi juga, termasuk yang di Papua, Pak, karena komitmennya ini perlu kami sampaikan dengan Pak Menko Polhukam, bahwa penanganan untuk di Papua. Pertama, ada prasyarat bahwa situasi kondusif, kemudian penyelesaian tentang rumah adalah salah satu solusi, Pak, ya, karena sebelumnya dibangun, kemudian dibakar lagi, ini jadi masalah. Karena itu dengan Pak Mahfud waktu itu, disampaikan demikian. Tapi kami alokasi, apa, antisipasi untuk penanganan tersebut, Pak, misalnya Dialimo, Yahukimo, kemudian beberapa daerah yang lain yang telah kami koordinasikan.

Kemudian yang ketiga adalah yang BSPS, jadi seperti saya sampaikan tadi, ini alokasi masih, masih sebagaimana yang lalu, yaitu sebesar 2,72 triliun untuk 103.000 ini melalui skema BPS ya, yang kita harapkan nantinya,

apabila ini bisa disetujui untuk ditambahkan yang tadi, penambahan alokasi anggaran tadi. Kami berharap bahwa BSPS yang ini nantinya 20%-nya juga berkontribusi untuk penanganan kemiskinan ekstrem sebagaimana amanat Inpres Nomor 4 Tahun 2022. Di mana penangananan kemiskinan ekstrem ini menggunakan data BKKBN, ya, dalam koordinasi Kementerian PMK. Jadi data BKKBN nanti per dapil akan kami sampaikan kepada Bapak-Ibu sekalian. Sebagaimana tadi Bu Dirjen juga sampaikan, kami juga akan menyelenggarakan ada forum koordinasi dan konsultasi, mungkin setelah acara ini *gitu*, nanti ada undangan menyusul dalam rangka konsolidasi penyiapan hal ini.

Kemudian yang keempat, ada bantuan PSU untuk rumah umum sebesar 400,7 triliun, tadi untuk membangun MBR sebanyak 27.825, 3 lokasi PSU jalan akses dan kami mendorong ada program baru yaitu 100 unit rumah inti tumbuh modular tahan gempa. Jadi ini sebagai bantuan stimulan nontunai, begitu.

Terakhir adalah dukungan manajemen tugas teknis lainnya sebesar 516 miliar, terdiri dari belanja operasional dan dukungan lainnya.

Kemudian kalau melihat komposisi anggaran, mungkin ini yang *committed*, ini terkait dengan MWC, OPOR, dan sebagainya, ini sebesar 1,87 triliun atau 26,84% yang lainnya. Kemudian yang prioritas nasional direktif, jadi ini termasuk aspirasi, ini yang paling besar ini, 4,69 triliun atau 67,32% dan kegiatan prioritas pembangunan lainnya, ini khususnya PSU ini hanya 400 miliar atau hanya 5,84%. Padat Karya, yang tadi saya sampaikan, di mana untuk biaya intinya sendiri itu 2,45 ya, untuk 103.000 unit yang akan menyerap 206.000 tenaga kerja, ya.

Terakhir Bapak-Ibu sekalian, ini terkait dengan koordinasi kita. Kami ingin menyampaikan skenario pelaksanaan tahun anggaran 2023. Kami perlu sampaikan, karena pertama, mempertimbangkan agenda politik nasional tahun 2023, maka kami, walaupun tahun 2022 ini progres dengan perubahan skenario secara progres sudah membaik, tapi saya ingin di tahun 2023, memperhatikan manajemen risiko juga yang kami sudah bahas bersama dengan para direktur. Maka, kami melakukan skenario sebagai berikut, jadi dengan mempertimbangkan agenda tadi, maka kegiatan Dirjen Perumahan kami upayakan dapat dilaksanakan secara masif pada semester I 2023. Sehingga tadi segala usulan dan semuanya, kami harapkan final sudah masuk. Jadi di sini kami *deadline* yang kami sampaikan sebagaimana pada pertemuan yang lalu pada tanggal 15 September 2022, ini semata-mata agar terakomodir pada konsep rancangan DIPA yang akan difinalisasi pada bulan Oktober. Jadi setelah masuk, ada proses verifikasi dan sebagainya, karena kami juga persiapkan. Jadi kalau yang BSPS ini terkait dengan proses SK dan sebagainya, tapi khusus untuk yang rumah susun, rumah khusus, yang melalui proses pengadaan barang dan jasa, kami di 2023 dengan menggunakan desain *prototype* mengupayakan bahwa untuk tahun 2023, kami akan lakukan secara e-katalog. Jadi meminimalisir adanya tender, Pak, jadi ini sedang kita upayakan untuk masuk dengan pola e-katalog, jadi bisa tinggal klik saja.

Kemudian saya mohon juga bahwa seluruh usulan tersebut, mohon kiranya dipastikan memenuhi seluruh *readiness criteria*, baik teknis maupun administrasi, karena ini merupakan data pendukung dari DIPA itu sendiri. Karena itu nanti kami akan adakan forum, sehingga nanti mungkin tenaga ahli dan sebagainya bisa terlibat dan data tersebut bisa kita verifikasi, untuk memastikan pemenuhan *readiness criteriannya*, karena ini data pendukung juga ini di dalam konsep DIPA.

Kemudian kami memberikan ruang, apabila terdapat perubahan penerima bantuan, kami ini masih dimungkinkan, sepanjang ini dalam satu provinsi, karena kalau luar provinsi ini kan harus revisi DIPA, *gitu*, Pak. Dan paling lambat bisa disampaikan pada akhir bulan Desember, jadi ini kalau ada pergeseran dan sebagainya. Sehingga kami harapkan Januari itu sepenuhnya kita bisa 100% kita mulai. Dan kemudian, tadi saya sampaikan, mengingat keterbatasan alokasi anggaran, di mana tahun 2023 tadi kalau semula tidak teralokasi, yang kedua sebenarnya sudah ada tambahan, tapi nanti kita coba untuk itu dialokasikan untuk mendukung usulan Bapak-Ibu sekalian. Karena itu, kami mohon dukungan pula, sebaliknya kami agar alokasi BSPS ini juga dapat mendukung kegiatan penghapusan penanganan kemiskinan ekstrem ini, setidaknya minimal 20% dari kuota yang ada, ini sesuai dengan Inpres dengan data BKKBN.

Kemudian perlu kami sampaikan juga, tipologi rumah susun dan teknis, ini sudah kami evaluasi desain *prototype*-nya dan sudah kami finalkan dan sepenuhnya *prototype* desain itu ditentukan oleh Ditjen Perumahan. Dan saya mohon juga nanti khusus untuk yang Bapak-Ibu sekalian, kiranya karena saya melihat juga ada dinamika pergantian antar waktu dan sebagainya, kiranya usulan-usulan mungkin bisa dilakukan konsolidasi dari masing-masing fraksi, begitu.

Mungkin satu hal Bapak-Ibu sekalian, kami juga terus sampaikan terkait dengan rumah susun, saya agak lupa. Mohon kiranya usulan rumah susun ini di luar rumah susun MBR dan rumah susun ASN di kabupaten/kota. Jadi ini kami evaluasi Bapak-Ibu sekalian, saat ini saya masih punya PR banyak untuk serah terima aset ya, terutama, dan ini menjadi temuan BPK dan menjadi atensi rusun-rusun yang MBR dan ASN, ini yang belum bisa serah terima. Jadi ada pergantian apa, pimpinan daerah, "*Nah*, ini kan usulan bupati sebelumnya", yang ini belum bisa menerima. Ini cukup banyak, Pak, ini yang yang menyandera kami dan yang menjadi objek BPK juga, ini saya kira, kiranya menjadi perhatian.

Rusun dan Rusus ASN ini juga demikian. Di Kaltara itu ada beberapa juga masih belum bisa kami serah terima kan, *gitu*, karena ditolak oleh Pemerintah Daerah. Implikasinya apa? Rumah-rumah ini kan tidak ada perawatan, tidak ada pemeliharaan, ada kerusakan, dan itu menjadi beban lagi masuk ke dalam OPOR, kalau diserahkan. Makanya beberapa diantaranya akhirnya kami tarik dan kami manfaatkan sendiri untuk ASN kita, misalnya di Kaltara kemarin, sudah saya putuskan untuk, karena tidak bersedia menerima, ya, walaupun dulu juga diusulkan, karena itu kita manfaatkan untuk

kepentingan staf kami sendiri. Jadi kepala balai, satker, baik itu perumahan maupun *temen-temen* dari Cipta Karya, Bina Marga, dan sebagainya, kami fasilitasi di sana, termasuk untuk rumah susun. Jadi ini mungkin menjadi perhatian kita, jadi di luar itu kami persilakan, mohon ini ini menjadi perhatian kita bersama.

Mungkin demikian Bapak-Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan, terima kasih.

*Wabillahi taufik wal hidayah,
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

KETUA RAPAT:

Terima kasih, Pak Dirjen, Pak Iwan.

Mungkin ada interupsi dari, Pak,

F- PDIP (LASARUS, S.Sos., M.Si.) – KETUA KOMISI V DPR RI:

Iya saya interupsi, Pak, terkait dengan kemiskinan ekstrem tadi, Pak Dirjen, supaya nanti penyamaan persepsi dengan kita.

Tolong data BPS tadi cepat disampaikan ke kami, Pak, supaya nanti usulan kita ini bisa mengisi apa namanya, yang bagian dari keppres itu, yang dimaksud dengan kemiskinan ekstrem tadi, sehingga nanti *match* antara program kita dengan pengentasan terhadap kemiskinan ekstrem tadi, Pak, ya. Jadi saya rasa itu penting sekali, supaya teman-teman juga, yang usulan itu nanti adalah juga bagian dari pengentasan kemiskinan ekstrem tadi *gitu loh*, kan itu yang Bapak tadi minta bantu. *Nah*, data itu penting, Pak, karena ketika kita mengusulkan tidak sama dengan yang disampaikan oleh BPS, nanti kemiskinan ekstremnya kan tidak tersentuh, Pak, nanti jatuhnya. Jadi mungkin teman-teman sekalian, itu adalah bagian dari, *gitu loh*, tinggal penempatannya saja, nanti kita cek di seluruh dapil kita masing-masing ya. Terutama, Pak, menurut saya Pak Iwan, Pak Dirjen, mungkin perlu disampaikan lengkap *aja*, Pak, untuk di dapil, kan datanya jelas *nih* kita di sini. Saya Kalbar I, Kalbar II kebetulan ada semua, Pak, di sini, jadi Kalimantan Barat itu *clear*, seluruh kabupaten/kota itu ada anggota DPR-nya. Saya di Kalbar I dan Pak Syarif di apa, saya di Kalbar, saya ambil contoh *nih*. Saya di Kalbar II, Pak Syarif di Kalbar I, berarti yang masuk katagori kemeiskinan ekstrem di Kalimantan Barat itu kita bantu intervensi, *nah*, itu kita kalau bisa kita dahulukan *gitu*. Supaya nanti Bapak tidak perlu lagi, nanti kan kalau misalnya sekian 103.000 misalnya, tadi ini kalau saya *enggak* salah ya, yang sudah kita anggarkan misalnya, contoh. Bapak kan tidak perlu lagi cari dana ke mana-mana misalnya, untuk menutup kemiskinan ekstrem ketika *match* nanti program ini. Itu yang saya baca dari apa yang tadi Bapak sampaikan kepada kita, sehingga untuk mempermudah cepat kirim kepada kami di daerah kami masing-masing itu di mana wilayah yang perlu kita intervensi yang bagian dari bunyi dari keppres

merupakan, yang dimaksud sebagai daerah yang berkategori kemiskinan ekstrem tadi.

Saya rasa itu *aja*, Pak Ridwan, interupsi dari saya, supaya nanti ini *nyambung*, sehingga tidak timbul beban lagi *gitu loh*, Pak. Saya rasa itu *aja* yang mau saya tanggapi dulu.

Terima kasih, Pak Ridwan.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, Pak Ketua.

Saya kira menjadi perhatian itu, Pak, saya juga setuju itu, pandangan tadi yang disampaikan oleh Pak Ketua.

DIREKTUR JENDERAL PERUMAHAN KEMENTERIAN PUPR RI (IWAN SUPRIJANTO, S.T., M.T.):

Baik, Pak, jadi prinsipnya siap, Pak. Kebetulan data sudah sudah kami siapkan, itu per provinsi, per kota/kabupaten ya Pak Arsyad ya, sudah ada, *by name by address*, karena itu data sesuai dengan Inpres, data BKKBN itu yang digunakan, jadi nanti akan kami sampaikan.

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih, Pak Dirjen.

Dari daftar penanya ini sudah ada 25, Pak, yang ingin bertanya. Sementara waktu kita ini sekarang tinggal 2 jam, dari jam, berarti tinggal 120 menit ya, Pak, ya, 120 menit. Maksud saya, kalau orang bertanya 5 menit saja dari 20 berarti sudah 125 menit, mungkin kita baca empat, empat menit saja, Pak, barangkali per orang kalau bisa ya dengan sangat hormat, tidak kita batasi tapi kita sarankan paling tinggi 4 menit ya, kita selesai. Jadi, hormat-menghormat tiadakan saja, supaya, misalnya saya hormati ini, hormati anggota Ketua, dan seterusnya, *enggak* usah lah, langsung pada intinya saja, supaya lebih cepat, iya iya langsung tutup, ya.

ANGGOTA KOMISI V DPR RI:

Kalau *gitu, gini*, Pak Ketua, yang mau *nyerahkan*, jangan nanya lagi.

KETUA RAPAT:

Iya kalau ada yang menyerahkan, silakan, kita dahulukan yang menyerahkan kalau begitu, supaya tidak bertanya lagi, siapa yang menyerahkan.

ANGGOTA KOMISI V DPR RI:

Iya, jangan menyerahkan, karena yang menyerahkan ini yang banyak waktunya ini.

KETUA RAPAT:

Kalau ada yang mau menyerahkan, berangkat sekarang, lebih bagus kami persilakan dulu, ya? Terakhir yang menyerahkan ya terakhir, oke.

Kami persilakan pertama, Pak Irwan, silakan, Pak Irwan.

F- PD (Dr. H. IRWAN, S.IP., M.P.):

Terima kasih, Ketua.

Baik, sesuai perintah Ketua, kami langsung pada pokok masalah.

Bu Dirjen dan Pak Dirjen,

Tadi disampaikan khususnya Bu Dirjen Cipta Karya, bahwa tahun ini ada tambahan 2 triliun terkait IKN. Kemudian untuk perencanaan tahun depan, ada 10 triliun, ya bangun istana, bangun kantor menteri, ya. Namun pada apa namanya, rancangan kegiatan yang coba disusun kawan-kawan Cipta Karya untuk tahun 2023, kami melihat Kalimantan Timur ini benar-benar, belum, belum ada *gitu*. Perlu saya ingatkan, bahwa IKN ini kan Badan Otorita, nanti malah di luar Provinsi Kalimantan Timur. *Nah*, sementara Kalimantan Timur saat ini dengan 10 kabupaten/kota, 129.000 km², meninggalkan juga banyak masalah. Kalau kemudian fokus kita pada pembangunan IKN ini fungsional 2024, hanya malah meninggalkan kesenjangan baru di Kalimantan Timur. Sehingga menurut saya, perlu juga diperhatikan untuk 2023, beberapa infrastruktur-infrastruktur terkait Cipta Karya, harus segera dibangun juga *gitu loh*, agar kesenjangan, ya *gimana* ya, perasaan mendengar mau bangun istana, bangun kantor menteri, sementara bangun IPA-nya *enggak* bisa, ya. Kemarin saya sampaikan, ada program Cipta Karya di Bontang terkait apa namanya, pemukiman kumuh terpadu, sudah pernah dilaksanakan dan tidak sebut, saya sebut mangkrak, tetapi tidak berlanjut, ini minta tolong dilanjutkan, Bu. Karena ini juga bicara mengenai kemiskinan, *gitu loh*. Pengentasan, itu masyarakatnya malah miskin ekstrem *tuh*, di pesisir di Bontang itu. Tapi kalau itu tuntas, itu menjadi kawasan wisata yang baru dan juga menjadi satu pemukiman yang apa namanya, sehat untuk di Kota Bontang. Sehingga saya minta ini atensi khusus Pimpinan, untuk kelanjutan pembangunan kota skala kawasan di Kota Bontang ini dilanjutkan, di Lok Tuan ya, di Selambai Lok Tuan.

Kemudian pembangunan IPA air bersih di Makamulu, ini kabupaten perbatasan ya, langsung dengan Malaysia, 15 jam baru sampai ke sini. Sampai sekarang, sejak Indonesia merdeka, langsung menggunakan air Mahakam, air Mahakamnya keruh, hutannya ditebang, tanahnya ditambang, untuk kemudian kontribusi PDB Nasional, tetapi belum punya IPA satupun di kabupaten ini, sehingga maksud saya, meng-*create* kegiatan prioritas untuk tahun depan

khususnya di Kaltim. Karena saya terpilih dari Kalimantan Timur, *gitu*. Ke depan juga terpisah dari IKN, sehingga ini betul-betul diperhatikan. Termasuk juga saya rehab sekolah. Kalau pendidikan ini *ndak* tuntas, ya infrastruktur pendidikan tidak tuntas di Kaltim, ini juga ada kesenjangan baru *gitu loh*, dengan hadirnya nanti fasilitas-fasilitas pendidikan di IKN. Menurut saya *sih*, ini lah prioritas kawan-kawan Cipta Karya khususnya Balai Prasarana Pemukiman Wilayah di Kaltim, kita dorong hal-hal yang prinsipal seperti ini, air bersih, ya, kemudian kota tanpa kumuh, termasuk rehab sekolah, tolong menjadi atensi, Bu Dirjen.

Kemudian untuk perumahan, ini kan masyarakat berpenghasilan rendah ini kan ada juga yang *income*-nya tidak tetap *gitu*, sementara perumahan yang ada itu untuk mereka yang memang punya penghasilan tetap. *Nah*, solusi dari Dirjen Perumahan ini apa? Untuk kemudian mengakomodir masyarakat berpenghasilan rendah yang penghasilannya tidak tetap, sementara mereka mempunyai kesulitan dalam proses KPR dan BI *checking*. *Nah*, ini harus ada solusi juga, jangan sampai punya rumah masyarakat berpenghasilan rendah yang punya penghasilan tetap saja.

Kemudian terkait PSU, di Kaltim banyak perumahan-perumahan yang sudah dilaksanakan perumahan Pak Jokowi ini yang PSU-nya belum selesai, mudah-mudahan bisa terus didorong, terkait prasarana, sarana, dan utilitas ini.

Kemudian yang terakhir 19 paket pekerjaan, telah ditandatangani di IKN. *Nah*, kami mengingatkan agar pemberdayaan pelaku usaha lokal menjadi prioritas *gitu*, dalam pelaksanaannya, jangan sampai lagi-lagi jadi penonton ya, pelaku usaha di sana. Kemudian yang kedua, penggunaan tenaga kerja lokal ya, kemarin kami mengapresiasi Kementerian PUPR sudah kemudian apa namanya, *me-launching* 1.500 tenaga *skill*, rencananya Pak Menteri ke sana, tiba-tiba batal karena istirahat ya. Saya juga ikutan batal juga, Bu, berangkat, padahal sudah ada masuk dalam rombongan juga tadinya.

Kemudian material lokal yang paling penting, ini juga sesuai dengan pesan Pak Presiden juga, material lokal, tapi kalau bisa material lokal yang ada di Kalimantan Timur. Termasuk juga yang paling penting adalah aspek lingkungan, bagaimana kemudian Kementerian PUPR dengan ditandatanganinya paket ini, memperhatikan empat aspek ini. Sehingga kemudian keadilan juga kesejahteraan ada manfaatnya, kontribusinya bagi Kalimantan Timur.

Mungkin itu Pimpinan, terima kasih banyak.

Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh,

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Lewat satu menit, tapi tidak apa-apa, lewat satu menit. Silakan, Pak, berikutnya Pak Tamanuri, siap-siap Pak Soehartono, silakan, Pak.

F- P. NASDEM (Drs. H.TAMANURI, M.M.):

Ibu Dirjen yang saya hormati,

Ini pekerjaan SPAM yang ada di Bandar Lampung sudah cukup lumayan lama, tapi sampai sekarang ini nampaknya belum ada penyelesaian. Sedangkan ini adalah harapan daripada masyarakat kota Bandar Lampung untuk menggunakan air yang baik, itu pertama.

Kemudian untuk dua-duanya, Pak Iwan sama Ibu, ini kecil kelihatannya, tapi manfaatnya sangat besar bagi kami. *You*, tolong jangan macam-macam ngomong itunya, maksudnya jangan macam-macam, kecil tapi manfaatnya sangat besar. Itu pendamping-pendamping yang di tingkat desa, di tingkat kecamatan, tolong ini dikasih 50:50 lah, 50% dari yang ditentukan oleh apa balai, 50% kami yang dari kami, yang usulan kami, untuk pendamping. *Nah*, itu, iya kecil kecil tapi akibatnya besar. Kemudian kami, ya kami akan upayakanlah semaksimal mungkin, walaupun waktu yang disampaikan oleh Ibu tadi, September-Oktober, tapi mudah-mudahan kami bisa laksanakan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Wah luar biasa, cuma dua menit, terima kasih, Pak.

Pak Soehartono silakan, siap-siap Cen Sui Lan. Urut, *nah*, *gimana* cara *ngomongnya* dua menit ini.

F- P. NASDEM (Drs. H. SOEHARTONO):

Untuk Bu Dirjen, singkat jelas, *gitu*. Jadi banyak proyek yang dikerjakan oleh internal Dirjen Cipta Karya lewat balai-balai, salah satunya adalah untuk perbaikan rumah sakit, pasar daerah, pasar ya, yang dimiliki daerah baik kabupaten maupun kota, universitas, dan sarana dan prasarana olahraga. Lah yang terakhir ini sarana dan prasarana olahraga ini untuk menarik, dan kebetulan saya belum pernah mengusulkan. Oleh karena itu, saya pikir yang dilaporkan Bu Dirjen ini, ini semua sebagian besar ya, itu usulan dari para balai, mungkin seperti itu, mungkin. *Nah*, nanti kita tambah usulannya beberapa anggota yang mempunyai kepentingan sesuai dengan apa yang kita baca di sini. "Oh ternyata Cipta Karya bisa membantu untuk rumah sakit, ternyata Cipta Karya bisa membantu untuk sarana dan prasarana olahraga, kampus dan sebagainya", ini jadi wacananya semakin luas. Jadi kalau ada usulan dari anggota yang semakin luas, ya, itu risiko dari apa RDP hari ini. Karena kita tahu bahwa ternyata Cipta Karya banyak sekali yang bisa kita usulkan lewat balai-balai. Sementara ini saya baca ini paling inisiatif balai, itu yang pertama, Bu Dirjen.

Yang kedua, tadi Bu Dirjen menyinggung tentang infrastruktur berbasis kerakyatan atau masyarakat. Saya baca di dalam ajuan Bu Dirjen ini, klasik, seperti yang lalu-lalu ya seperti ini *gitu*. Walaupun ada usulan dari Komisi V ini yang diberikan kepada menteri terkait infrastruktur berbasis kerakyatan. Izinkan, Ketua, saya boleh tanya sama Pak, Bu Dirjen, boleh, Pak?

KETUA RAPAT:

Silakan.

F- P. NASDEM (Drs. H. SOEHARTONO):

Apakah Bu Dirjen itu belum pernah diajak bicara tentang perubahan infrastruktur berbasis kerakyatan oleh Pak Menteri, belum?

DIREKTUR JENDERAL CIPTA KARYA KEMENTERIAN PUPR RI (Ir. DIANA KUSUMASTUTI, M.T.):

Sudah, Bapak.

F- PDIP (LASARUS, S.Sos., M.Si.) – KETUA KOMISI V DPR RI:

Wes pasti sudah lah, *masak* belum.

F- P. NASDEM (Drs. H. SOEHARTONO):

Kalau sudah, berarti ini mudah-mudahan lama atau memang Bu Dirjen mempunyai keyakinan untuk bertahan seperti ini? Ini kita pikirkan secara bersama dan saya akan menunggu hasil keputusan dari Pak Menteri, tanggapannya tentang usulannya Komisi V. Saya tidak ingin mengusulkan apa, infrastruktur berbasis kerakyatan sebelum ada *deal gitu*, itu *aja* untuk apa, Bu Dirjen.

Untuk perumahan, saya ingin menanyakan tentang Program Sejuta Rumah oleh Presiden, di sini kategorinya masuk PSU rumah umum, Pak, ya? Ini belum ada perincian bagaimana ke depan ini? Misalnya menyangkut subsidi pemerintah itu per unit menjadi berapa, harga jual itu menjadi berapa, dan kemudian aturan-aturan lain yang mengikat dari Pak Dirjen, tentu ada yang terkait dengan FLPP ini. Ini tolong ini dijelaskan, karena saya mendapat banyak pertanyaan dari para pengembang yang ada di daerah saya, Pak, sehingga harga jual itu pagunya sudah naik, apakah subsidi dari pemerintah naik, kita belum tahu.

Kemudian yang terakhir, saya mendukung sekali kepada Pak Dirjen untuk e-katalog. E-katalog itu dapat mempercepat jalannya proyek, karena tidak melalui tender yang berbelit-belit, tidak melalui tender yang banyak makan waktu. Cuma, e-katalog ini yang terbuka, Pak, jangan kemudian apa, rekan-rekan Anda dijadikan satu, suruh bikin e-katalog, saya minta diumumkan secara terbuka. Karena apa? Apa yang saya katakan itu berdasarkan keluhan

dari masyarakat jasa konstruksi, Pak. Karena kelompok yang mengerjakan PSU ini, rumah susun, dan sebagainya, orangnya ya itu-itu saja. *Nah*, oleh karena itu diadakan perbaruan, pembaruan dan pengumuman secara terbuka.

Itu *aja*, Pak, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, Pak Soehartono.
Bu Cen Sui Lan, siap-siap Pak Bakri.

F- PG (CEN SUI LAN):

Terima kasih, Pimpinan.

**Yang saya hormati Pimpinan dan teman-teman Anggota Komisi V,
Yang saya hormati Bu Dirjen, Pak Dirjen dan jajaran,**

Saya langsung Pak Iwan ya, Pak Dirjen dulu ya. Tadi pemaparan Bapak saya ingin menanyakan mengenai relaksasi yang sudah diajukan ke Pak Menteri, tanggapan Pak Menteri sangat apa, Pak Iwan, sangat mendukung atau sangat apa? Sangat mendukung? Ada tetapinya ya? Tetapi karena nanti ada perubahan anggaran, berarti itu masih bersayap, kalau menurut saya. Jadi saya ingin menanyakan, saya berpatokan yang pada saat, pada hasil materi hari ini. Dengan penambahan anggaran Bapak sekitar 1 triliun, itu rumah BSPS itu tetap 103.000 unit, benar ya? Benar? *Nah*.

KETUA RAPAT:

113, 113.

F- PG (CEN SUI LAN):

103? 103, berarti ada penambahan 1 triliun itu tidak ada penambahan di BPS. *Nah*, saya ingin tahu itu kira-kira untuk anggota berapa dan itu rumah susunnya berapa? Saya rasa semua ini *kepingin* tahu, belum ada kejelasan. Karena belum ada kejelasan, bagaimana kita mau mengajukan yang *timeline-timeline* itu? Belum tahu kita apa yang mau kita dapat, sampai saat ini. *Timeline*-nya bulan September, *udah* mau, besok sudah 1 September. Kita ini sama sekali *blank*, belum tahu apa yang mau kita ajukan, mau berapa banyak barang itu. Jadi tolong diperjelas *aja*, karena saya melihat itu yang lain itu masih abu-abu, itu masih jauh dari harapan.

Ke Bu Dirjen, Bu Dirjen, tahun 2022 banyak teman-teman itu tidak mendapat program KOTAKU secara menyeluruh, termasuk saya. Ada juga PAMSIMAS yang tidak diakomodir, bagaimana itu? Itu kan sebenarnya sudah punya jatah kita punya, *kenapa* bisa tidak terakomodir, alasannya apa? PAMSIMAS, SANDES, banyak sekali, rata-rata teman-teman ada itu, cuma

mereka tidak membicarakan *aja* dan saya kebetulan ada juga, karena itu saya bicarakan. Itu *aja*, Bu Dirjen dan Pak Dirjen.

Terima kasih, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Jadi yang sudah bertanya ya, jangan lagi diulang ya, yang sudah bertanya, mudah-mudahan pertanyaan secara umum tadi jangan lagi diulang teman-teman yang lain.

Silakan, Pak Bakri.

F- PAN (H. A. BAKRI HM., S.E.):

Ya, terima kasih, Pak Ketua.

Bu Cen ini sudah disampaikan semua keinginan kawan-kawan ini. Saya kembali ke Dapil, tadi saya lihat,

KETUA RAPAT:

Mic-nya, Pak Soehartono, *mic*-nya, Pak.

F- PAN (H. A. BAKRI HM., S.E.):

Iya, tadi saya lihat pemaparan dari Bu Dirjen, banyak sekali, Bu, ya tentang sarana prasarana olahraga, *Islamic Center*, ini Jambi ini kebetulan tahun 2023 ini juga ada kegiatan yang dibiayai oleh APBD, tidak salah mungkin nanti APBN bisa masuk di pembangunan *Islamic Center*, termasuk juga stadion, Bu, nanti usulannya akan saya sampaikan kepada Ibu.

Terus yang kedua, itu Danau Sipin, itu sudah sekarang menjadi tempat wisata yang sangat diminati, Bu. Dan di sana juga Cipta Karya pernah membuat kegiatan berupa sarana prasana ya, untuk peristirahatan dan SDA pun juga banyak mengalokasikan anggaran di sana. *Nah*, ada di daerah sana itu daerahnya agak kumuh, *nah*, saya berharap di tahun 2023 ini Danau Sipin itu ada daerah-daerah yang kumuh, sehingga betul-betul di danau Sipin itu bisa menjadi wisata yang bersih, tidak ada lagi daerah yang kumuh. *Nah*, saya berharap mudah-mudahan ini bisa dianggarkan untuk tahun akan datang.

Terus yang kedua, di Jambi itu ada satu kabupaten, satu kota, sampai hari ini belum selesai masalah sampah, persampahannya, Bu, yaitu Kabupaten Kerinci dan Sungai Penuh. *Nah*, saya tidak tahu, provinsi juga memang sudah sering mencoba memfasilitasi. Saya berharap ini tidak mungkin dibiarkan, Bu, karena sampah ini menjadi penyakit nanti ini. *Nah*, saya berharap mungkin ada tim khusus dari kementerian yang turun, mau tidak mau harus, Bu, ini harus

diselesaikan. Ada tim khusus mungkin dari kementerian, dari Bu Dirjen, yang turun ke Kerinci *eh* Kabupaten Kerinci ataupun Kota Sungai Penuh, untuk memfasilitasi. Siapa tahu tangan dinginnya Bu Dirjen ini ke Kerinci, Sungai Penuh bisa terwujud, dan ini tidak mungkin dibiarkan, Bu. Sampai hari ini belum ada tempat sampah di sana. Jadi sampahnya berserakan *aja* di mana-mana, oleh sebab itu mohon ini menjadi perhatian.

Terus yang terakhir, Bu Dirjen, masalah rehabilitasi sekolah, terima kasih, Bu, *alhamdulillah* tahun kemarin sudah berjalan dengan baik. Walaupun saya bilang perlu adanya pengadaan bangku ataupun apa semuanya, sehingga betul-betul sekolah dengan anak-anak yang menggunakan bangku baru itu sepertinya bagus, ini jangan sampai anak-anak malahan sekarang itu belajarnya di lantai, karena dia bilang lebih bagus di lantai daripada belajar di kursi penyot, Bu, jadi mudah-mudahan ini bisa terealisasi.

Kalau di perumahan, saya terima kasih, Pak Dirjen, atas nama masyarakat Provinsi Jambi, *Alhamdulillah* tahun ini ada Rusunawa untuk Rumah Sakit Umum Raden Mattaher dan juga rumah Rusunawa untuk Kejaksaan, ya. Dan harapan saya tadi saya lihat juga berkelanjutan untuk *multiyears contract*. Itu *aja* mungkin, Pak Ketua, dari saya, terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam,

Terima kasih, Pak Bakri.

Pak Syafiuddin, siap-siap Pak Suryadi.

F-P KB (H. SYAFIUDDIN, S.Sos.):

Terima kasih.

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Bil ikhtishor,*

KETUA RAPAT:

Sebentar, sebentar, Pak, ya ada interupsi, Pak Syafiuddin, sebentar, silakan, Pak.

F- P. NASDEM (ROBERTH ROUW) – WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:

Eggak jalan nih, jalan? Oh iya dikecilin, kali.

Iya, Pimpinan, saya cuma ingatkan kita supaya, mungkin kita juga harus punya satu kesepakatan bahwa waktu kita itu tidak lagi kita membahas

anggaran ini, waktu kita itu dibatasi, ya. Jadi supaya kita tuntas *gitu*, ya kan kayak kemarin kita bahas itu, dari ini selesai, sampai selesai, itu itu enak *gitu* ya kan. Artinya dengan Kementerian, Pak Menteri, dari jam sekian sampai selesai, bahwa itu tuntas, *gitu*, tuntas ya kan. Tetapi jadi kalau saya melihat *cuman* dua jam ini, terlalu sempit kita, *enggak* mungkin bisa, apa, semua kita bisa masuk. Maka menurut saya, kita lebih bagus kita *break* makan siang dulu lah. Kita sepakat supaya jangan kita nanti berserak-serak terus sakit, mitra juga sakit, ya kan, kita istirahat makan *aja* lah ya kan ya. Pimpinan, saya usul itu, tanya teman-teman lah.

KETUA RAPAT:

Jadi soal panjang, soal pendek, kan tergantung Bapak-Bapak ini sebenarnya. Mau bertanya, kalau memang penting, silakan. Kalau tidak penting, buat apa bertanya hanya untuk memperpanjang waktu, *gitu*, ya, ya? Kan kalau Bapak, maksudnya kita untuk mempersingkat waktu, kita kan ada Bina Marga jam 2, barangkali bagi yang mau makan, pergilah makan, bagi yang bertanya, silakan bertanya, *gitu*, supaya kita lebih cepat semua, ya?

Saya kira *gitu*, Pak, kita lanjut, Pak, ya?

F- PKB (H. SYAFIUDDIN, S.Sos.):

Pak Syafiuddin Bu, eh Pak, Pak Syafiuddin ya?

KETUA RAPAT:

Silakan, Pak Syafiuddin.

F- PKB (H. SYAFIUDDIN, S.Sos.):

Iya, lanjut dulu lah. Terima kasih, Pimpinan.

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Bil ikhtishor,*

Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Dirjen Perumahan dan Bu Dirjen Cipta Karya, saya mengapresiasi terhadap apa namanya Padat Karya yang kemarin-kemarin 2022, atau yang tahun ini, 2022 ini sangat membantu untuk penanganan miskin ekstrem. Namun kalau bisa, karena di Madura ini dua kabupatennya ini miskin ekstrem, Bu, dari empat kabupaten, ya mudah-mudahan lebih banyak untuk ditambah program-program Padat Karya yang menyentuh terhadap apa namanya, kebijakan yang disampaikan oleh presiden melalui Inpres Nomor 4 Tahun 2022.

Kepada Bu Dirjen, terkait dengan, saya mempertanyakan aset-aset BPWS, Bu. Banyak aset-aset BPWS yang sebetulnya *leading sector*-nya di Dirjen Cipta Karya ini, seperti ada pembangunan SPAM yang menghabiskan anggaran sekitar puluhan miliar pada waktu BPWS, itu di pocong, juga di

Kecamatan Labeng sekarang ini sangat mubazir, Bu. Maksud saya, kebijakan pemerintah pusat ini, apakah ini diteruskan oleh pemerintah pusat atau kalau memang ini mubazir, silakan dihibahkan ke pemerintah daerah, apakah itu pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten, supaya lebih bermanfaat. Karena antara terkait *output* dan *outcome*-nya kan tidak sebanding ini, Bu.

Yang kedua, ada Tanean Lanjhang lagi, pembangunan Tanean Lanjhang di situ. ini peninggalan-peninggalan dari BPWS, Bu, yang sekarang mangkrak dan saya khawatir karena ini bangunan nanti pas apa namanya, menjadi besi tua, lagi-lagi nanti yang disalahkan orang Madura, orang Madura ini kan senang ke besi tua, Bu. Jadi perawatan-perawatan itu, tolong kalau memang ini *leading sector*-nya Cipta Karya, maka ada sebuah inovasi dari Cipta Karya bagaimana pengembangan ini sesuai dengan karakter yang sudah dilakukan oleh BPWS kemarin, *gitu*, Bu. Jadi terkait ini dihibahkan atau tetap dilanjutkan oleh pemerintah pusat melalui PUPR melalui bidang Cipta Karya ini.

Terus yang terkait dengan apa namanya, usulan saya kepada Menteri kemarin pada waktu Pak Menteri hadir, ada pembangunan *Islamic Center*, Indonesia, apa namanya, *Islamic Science Park*, *gitu*, kalau Bahasa Inggrisnya *gitu*, saya lebih ingin mengatakan *Islamic Center aja*. Ini saya lagi-lagi memang dipertanyakan oleh beberapa tokoh ya, Pak-Bu, ya, terkait dengan pembebasan lahan ini juga peninggalan BPWS. BPWS kita menyepakati kalau *ndak* salah APBN 2021 kemarin, ini sudah ada pembebasan lahan. Ini juga apakah masih akan diteruskan oleh pemerintah pusat atau *gimana*? Karena ini juga tercantum di Perpres 80, pembangunan *Islamic Center* yang ada di apa namanya, pintu gerbang Madura itu di dekat Suramadu. Dan *Insya Allah* pasti banyak masyarakat yang punya tanah lahan di situ, sudah tidak mempersulit lagi, mereka sudah banyak yang datang ke saya untuk menjual tanah itu kepada negara.

Yang kedua, tokoh-tokoh ini, Bu, kemarin juga berkumpul *roadshow* di pemerintah provinsi, di pemerintah kabupaten, 4 kabupaten ada beberapa tokoh perantauan. Saya malu, Bu, tokoh peraturan ini malah mau urunan, mau *song osong lombhung* bahasa Maduranya, untuk membangun *Islamic Center* ini, apabila pemerintah memang tidak mau membangun. Karena ini menjadi apa namanya simbol, ikon Madura yang sangat religius ini. Kalau ini *Islamic Center* ini betul-betul berhasil dibangun, maka saya juga sebagai Anggota DPR RI Dapil Madura, ini menjadi embrio, bagaimana pembangunan Madura akan berkelanjutan. Banyak tokoh di perantauan itu yang kaya-kaya sekarang, Bu, jujur *aja*, artinya ratusan miliar dia punya, dengan hanya berdagang besi tua itu, Bu. Ada yang namanya Haji Rawi, ada yang namanya Haji Zaini Zaidi, ini ratusan miliar dia punya. PT. Logam Jaya. Ada yang namanya Haji Hamzah, ada Haji Hafidz, semuanya datang ke saya, ini *gimana*, mempertanyakan pemerintah ini *gimana*, presiden *gimana*. Perpres 80 sudah jelas di situ bahwa ingin membangun *Islamic Center* walaupun skema pembiayaan itu atau skema pembangunan itu melalui KPBU.

Saya berharap bahwa pemerintah nol koma sekian persen lah, ada peletakan batu bersama (suara kurang jelas) di situ. Dan kita menyepakati anggaran 2023 ini ada menyisihkan anggaran APBN sekian miliar, seumpama. Selebihnya mari kita sesuai skema ini KPBU, silakan *enggak* apa-apa, investor di mana terserah, yang penting keterlibatan partisipasi masyarakat Madura sudah ada *good will*, Bu, baik itu ada di daerah Bangkalan ataupun ada di perantauan. Lagi-lagi, jabatan saya tinggal dua tahun, Bu, 2024 ini sudah selesai, mudah-mudahan bisa jadi lagi, sehingga bisa bertemu dengan sahabat-sahabat dan pimpinan-pimpinan Komisi V beserta semua Mitra Komisi V. Tapi saya agak malu kalau sampai 2024 sesuai dengan apa, Perpres ini tidak selesai, tidak ada apa namanya, kemajuan, tidak ada secara simbolis bahwa presiden apa namanya, melanjutkan pembangunan Madura ini, saya agak malu, Bu. Dan *insya Allah* Pak Presiden sudah ada *good will*, apa lagi ya sudah tertera di Perpres 80, saya berharap pembantu Presiden ini juga menyemangati terhadap adanya Perpres ini.

Mungkin itu, Ketua, mohon izin, nanti menyampaikan aspirasi, karena ada puting beliung, Bu, di Bangkalan kemarin. Dan banyak sekolah-sekolah yang sudah 80% rusak ini sudah dibawa angin puting beliung. Salah satunya di SDN Bayoneng Laok, ini saya malu juga, klebun-klebunnya, kepala desanya, datang ke rumah. "Pak Syafi kan di Komisi V, dekat dengan Bu Dirjen Cipta Karya", tapi ini kan sudah 100 bukan 100% lagi, Pak, kena puting beliung, habis 110% malahan, Bu, kasihan sekarang ini ada di tenda-tenda siswa-siswanya. Makanya izinkan saya untuk menyampaikan tambahan aspirasi, Pak, selain ke Menteri kemarin.

KETUA RAPAT:

Nanti terakhir, Pak. Biar sama semua.

F-PKB (H. SYAFI UDDIN, S.Sos.):

Oh terakhir? Terima kasih, Pimpinan. Mungkin seperti itu kurang lebihnya saya mohon maaf.

*Wallahul muwafiq ila aqwamitthoriq,
Wassalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh,*

KETUA RAPAT:

Waalaikumsalam,

Ada satu yang masih menjadi penasaran Pak Robert sebagai Wakil Ketua, dia mempertanyakan bahwa bagaimana teman-teman dari pemerintah, dalam hal ini Pak Dirjen dan Bu Dirjen punya anggota, mungkin juga perlu makan barangkali, atau kalau kita perlu makan, berarti kita beristirahat sekarang atau jam 1 sekalian. Lanjut atau mau makan?

F-P. NASDEM (ROBERTH ROUW) – WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:

Break aja, masak kita makan itu,

KETUA RAPAT:

Iya? Lanjut? lanjut, iya lanjut lanjut ya? Oke.

F- PD (WILLEM WANDIK, S.Sos.):

Pak Ketua, Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Iya, lanjut, lanjut ya? Oke.

F- PD (WILLEM WANDIK, S.Sos.):

Ya, Pak Willem, silakan.

F- PD (WILLEM WANDIK, S.Sos.):

Saya interupsi, saya *nangkap* apa yang menjadi pikirannya Pak Robert. Saya lihat karena kita rapat dengan menteri itu waktunya sangat terbatas, dengan harapan waktu kita lebih luas, lebih banyak, lebih leluasa, itu dengan para Dirjen, Eselon I, tapi karena kita dibatasi, makanya Pak Robert menyampaikan itu.

Demikian, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Pak Willem, tidak dibatasi untuk berbicara, Pak. Tadi hanya berupa perhitungan 4 menit kalau bisa, tapi kalau Bapak mau panjang betul, mau panjang karena memang perlu, silakan, tidak dilarang tentang itu, Pak. Tapi Bapak jangan misalnya tiada perlunya, hanya memperpanjang waktu mau bicara terus menerus *gitu*, kepentingan yang tidak ada, *gitu*, karena itu yang kita batasi ya, sepakat ya, dan Pak Dirjen setuju bahwa kita lanjut.

Baik, lanjut Pak. Pak Suryadi Jaya Purnama, siap-siap Pak Irmawan.

F- PKS (H. SURYADI JAYA PURNAMA, S.T.):

Baik, terima kasih, Pak Ketua.

Saya langsung saja, pertama saya apresiasi laporan juga sekaligus, kami di NTB koordinasinya cukup bagus, terutama kepala balai yang ada di bawah Direktorat Jenderal Cipta Karya dan Perumahan, ada Bu Ika dan Bu Rini, walaupun ada catatan, tapi secara umum berjalan. Ini penting kami

sampaikan, karena suksesnya program kita di daerah itu selain faktor teknis tapi juga faktor koordinasi. Oleh karena itu, ini harus terus diingatkan, karena ada juga kepala balai yang berbeda dari yang lain, nanti akan kami sampaikan kepada dirjenya, itu yang pertama.

Yang kedua, saya mulai dari Direktorat Jenderal Perumahan, Pak Iwan. Saya awali dengan realisasi kita di tahun 2021 yang 66% untuk rumah swadaya dan 62% untuk rumah khusus, saya kira menjadi catatan, kami perlu kepastian tentang strateginya untuk 2022 ini. Jangan sampai terulang, capaian kita yang tidak sesuai dengan target, itu yang pertama, ini hanya catatan saja.

Berikutnya, tadi kami mendengar paparan terkait dengan rumah tapak menteri di IKN. Saya mempertanyakan, ini *kenapa* dimasukkan pada kategori rumah khusus? Karena kalau kita membaca spesifikasinya, itu tidak masuk kriteria rumah khusus sesuai dengan Permen Nomor 7 Tahun 2022, sehingga nanti akan ada masalah. Karena dikategorikan rumah khusus, tetapi spesifikasinya berdasarkan regulasi yang dibuat, itu tidak sesuai ya, sehingga ini memang perlu menjadi perhatian ya. Adapun dasar hukum dari ini kan sebenarnya di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 ini, di IKN ya, dalam lampiran itu sangat detail, tetapi tidak masuk sebagai kriteria rumah khusus, ya.

Berikutnya, masih tentang rumah tapak menteri ini, saya melihat ada perbedaan, tadi yang disampaikan pada halaman 19, jumlah angkanya dengan yang ditayangkan di LPSE, Pak. Jadi harga perkiraan sendiri itu 509 miliar, berbeda dengan yang Bapak sampaikan, saya kira ini perlu diklarifikasi angkanya.

Berikutnya, berdasarkan rapat kita pada bulan Juni 2022, itu rumah khusus jumlahnya sangat sedikit ya, sekitar 2.400, tetapi ada perubahan pagu kemudian meningkat menjadi 26.000. Ya ini kan ada penambahan yang 23.000 lebih *gitu*, yang sebenarnya kesepakatan kita yang akan diperbanyak itu adalah rumah swadaya. Tapi ini ada penambahan rumah khusus sebesar 23.000. *Nah*, ini kami perlu detailnya ya, padahal dari pagu awal hasil raker kita pada bulan Juni 2022, jumlahnya hanya 2.000 unit itu, meningkat cukup besar ya. Dan ini bagaimana apa namanya, alokasinya? Tadi sempat disebut tentang di tempat bencana, tapi saya kira juga harus perlu lebih detail, Pak.

Berikutnya, masih di perumahan, kami mendapatkan masukan dari beberapa organisasi pengembang yang program yang dari pemerintah, PSU, Pak. Prasarana dan Sarana Utilitas ini, itu hanya beberapa pengembang yang mendapatkan program ini, sehingga menimbulkan kecemburuan. Kriterianya juga sangat tidak jelas, sehingga terjadi, ya seperti tadi, kecemburuan. Oleh karena itu program ini mungkin bagusya dialihkan ya. Misalnya khusus untuk membantu pemasangan listrik, sehingga penerima manfaatnya lebih luas, jangkauannya lebih banyak dan harga perumahan ini bisa diturunkan secara merata, bukan di 1-2 pengembang, karena bantuan PSU ini sangat terbatas jumlahnya dan ini menimbulkan kecemburuan di internal para pelaku

pengembang perumahan. Saya kira ini menjadi catatan, Pak Iwan, supaya lebih kondusif dalam pelaksanaannya. 2:06:02

Berikutnya di Direktorat Jenderal Cipta Karya, Bu, karena ini nanti saya akan masuk ke daerah, berangkat dari postur anggaran pagu 2023 sebesar 25 triliun lebih, ini 43% nya untuk IKN sebesar 10,38 triliun. Saya membayangkan, satu direktorat jenderal, anggarannya 43% terpusat di satu tempat bahkan bukan di satu provinsi ya, sementara ada 34 provinsi ini yang belum kita akomodir secara proporsional. Ya ini kalau 10 triliun kita bagi 34, itu hampir 300 miliar, 300 miliar bagi daerah lain ini sangat membantu ya. Artinya target pemerataan dari IKN ini justru tidak tercapai, malah hak-hak daerah lain ini terfokus ke satu tempat. *Nah*, oleh karena itu kami perlu mendapat perhatian khusus, terutama daerah-daerah yang secara infrastruktur sangat kurang seperti di NTB, ya, ini akan kami usulkan, di antaranya adalah beberapa pulau-pulau kecil di Lombok ini, ya mereka masih susah air bersih, kemudian lingkungannya, sehingga ada usulan penataan kawasan di beberapa Gili, ya nanti itu sebenarnya sudah kami sampaikan, nanti akan kami susulkan lagi ya supaya menjadi perhatian agar tidak ada kecemburuan.

Ada satu tempat yang nilainya 10 triliun, tapi di tempat-tempat lain, itu minum saja sangat susah begitu, ya. Termasuk juga di Lombok Timur itu, penataan kawasan Kota Selong, ini belum selesai 100%, yang tujuannya agar terlihat indah, tidak kumuh lagi, tetapi karena pembangunannya tidak tuntas, akhirnya justru jadi tidak indah *gitu*, sehingga ini memang harus prioritaskan program-program yang bisa fungsional 100%. Memulai pekerjaan baru, tapi tidak selesai, yang lain baru tapi tidak selesai semuanya, akhirnya tidak jelas kriteria indikator keberhasilannya, sehingga ini perlu diprioritaskan, termasuk juga beberapa sarana dan prasarana olahraga, ya.

Kami *insyaAllah* di NTB akan menjadi tuan rumah PON 2028. Oleh karena itu, supaya tidak menjadi beban anggaran nanti pada tahun-tahun menjelang pelaksanaan, mungkin dari sekarang perlu dipersiapkan sarannya. Nanti secara tertulis dengan pemda dan pihak terkait akan menyampaikan usulan, yang penting nanti di alokasi anggarannya juga bisa dialokasikan lebih awal. Supaya, apa namanya, tidak terjadi ketimpangan anggaran yang begitu besar di Direktorat Jenderal Cipta Karya.

Barangkali demikian, Pak Ketua, terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh,

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Suryadi.

Pak Irmawan, siap-siap Pak Ishak Mekki.

F- PKB (H. IRMAWAN, S.Sos., M.M.):

Terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Saya langsung saja *nih*, Pak Pak Dirjen Perumahan, Ibu Dirjen Cipta Karya. Terkait dengan kegiatan dua dirjen ini di Aceh untuk tahun 2022, saya pikir tidak ada masalah, semua berjalan dengan baik, meskipun ada beberapa kegiatan yang sampai hari ini belum terlaksana 100%, baik itu kegiatan yang Padat Karya maupun yang kontraktual.

Kemudian, Pak Dirjen Perumahan, yang ingin saya sampaikan, pertama adalah karena ada beberapa BPS yang tahun 2022 hasil verifikasi kemarin tidak memenuhi syarat, Pak, sehingga sampai hari ini tidak bisa ditindaklanjuti. Karena menurut keterangan kepala balainya, harus di SK-kan kembali oleh Dirjen. Jadi biar ini tidak mubazir biar bisa terlaksana dengan baik saya pikir beberapa titik yang belum terlaksana ini bisa untuk diterbitkan SK-nya kembali.

Kemudian Pak Dirjen, di Aceh banyak pondok-pondok pesantren yang kondisinya sampai hari ini masih banyak yang tidak memenuhi standar lah. Jadi masih banyak sekali membutuhkan pembangunan-pembangunan rusunawa. Saya berharap di tahun 2023 ini, agar dapat dialokasikan lebih banyak lagi, Pak, anggaran rusunawa untuk pondok-pondok pesantren, sehingga pondok-pondok pesantren yang ada di Aceh juga bisa memenuhi standar, sama seperti pondok-pondok yang ada di republik ini.

Kemudian kepada Dirjen Cipta Karya, di sini ada saya lihat pembangunan SPAM air bersih yang anggarannya 4,16 triliun, tetapi saya tidak melihat ada untuk Aceh di sini, Bu. Sementara di Aceh ada beberapa, ada beberapa kabupaten yang sangat membutuhkan pembangunan SPAM ini, yaitu terutama di Kabupaten Gayo Lues dan Kabupaten Aceh Tenggara. Jadi saya berharap dari angka yang 4,16 triliun ini, agar dapat dialokasikan minimal satu atau dua lah, untuk pembangunan SPAM di Kabupaten Aceh Tenggara dan Kabupaten Gayo Lues.

Saya pikir hanya itu *aja*, Pimpinan, sekian, terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

KETUA RAPAT:

Walaikumsalam,

Terima kasih, Pak Hermawan.

Pak Ishak Mekki silakan, siap-siap Bu Sri Rahayu.

F- PD (Ir. H. ISHAK MEKKI, M.M.):

Bismillahirrahmanirrahim,

Saya langsung saja ke Dirjen Perumahan. Pertama, saya sampaikan bahwa kemarin, tahun 2001 dapat rusun tiga lantai. *Nah*, ini, itu tahun 2001 sekarang sudah tahun 2022, hampir berakhir, hampir berakhir. *Nah*, pihak pondok minta serah terimakan rusun yang sudah dibangun tahun 2021 kemarin. Tapi sampai sekarang belum diserahkan, karena masih banyak kekurangan volume-volume yang belum diselesaikan, volume belum diselesaikan dan mengakibatkan daripada menyusahkan pondok, bukan membantu pondok, kalau ini tidak diselesaikan dengan segera, karena banyak yang bocor, banyak yang runtuh, dan sebagainya. Dan informasinya, khusus untuk di Pondok Bait Qur'an di Sumatera Selatan, itu di sub-kan, di sub-kan, yang pemenang tendernya belum pernah datang melihat. *Nah*, kita informasikan bahwa ini kurang karena ada laporan dari pondok, minta diperbaiki. Justru yang datang, personil daripada balai. Dan memperbaikinya sedikit-sedikit, belum tuntas, dan sampai sekarang. Dan sekarang pihak pondok, ya kalau memang itu tidak diselesaikan, ya tetap minta diserahkan dan akan diperbaiki oleh pondok, tapi minta dibuatkan BA, Berita Acara serah terimanya.

Kedua, Cipta Karya, Dirjen Cipta Karya. Saya ingin tahu saja, tadi sudah sinergi di setiap dirjen bahwa pembangun IKN itu semua mengalokasikan yang cukup besar, semua yang mengalokasikan cukup besar, dan itu titik-titik yang fokus pusat IKN-nya, IKN-nya, seperti gedung dan sebagainya, istana, dan sebagainya. Baik itu dari Perumahan, Cipta Karya, Bina Marga, air bersih, waduk, dan sebagainya. *Nah*, saya ingin bertanya kemarin itu yang berkembang, itu dana pembangunan IKN itu diharapkan dari investasi dari pihak luar. *Nah*, sampai sekarang apakah ada pihak luar sudah berinvestasi mengerjakan bagian dari proyek IKN ini?

Ini saja mungkin, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, Pak Ishak Mekki.

Ibu Sri Rahayu, silakan, Bu. Siap-siap Pak Syahrul Aidi.

F- PDIP (SRI RAHAYU):

Terima kasih, Pimpinan.

Langsung saja, saya hanya usul, khususnya adalah untuk sanitasi pendidikan keagamaan ya, Bu, ya. Ini kan salah satu, salah satu syaratnya kan harus ada yang nginap di situ. *Nah*, menurut saya ini perlu diperbaharui syarat dari yang harus ada di situ. Karena yayasan-yayasan atau lembaga-lembaga pendidikan swasta maupun negeri, khususnya swasta, itu juga banyak muridnya, tetapi sanitasinya juga kurang, sehingga menurut saya yang penting itu adalah lembaga pendidikan. Oleh karena itu, perlu ada pembaruan untuk ini, jangan sampai dibatasi padahal mereka membutuhkan *gitu*, dan kalau

muridnya misalnya 670 misalnya atau 750, dengan hanya beberapa sanitasi yang ada, itu kan juga perlu ada bantuan.

Kemudian yang kedua, menurut saya sebagaimana yang disampaikan oleh kawan-kawan, bahwa PISEW ini menjadi sangat penting, karena dana desa sekarang sudah tidak, tidak mampu untuk memberikan kontribusi dalam pembangunan jalan, dan pemda setempat juga sangat terbatas anggarannya. Maka PISEW ini program yang perlu mendapatkan perhatian, perlu ditambahkan.

Kemudian untuk Pak Dirjen Perumahan. Saya hanya ingin bertanya, Pak, dari renstra yang Bapak buat sampai tahun 2024 ini ya, saya hanya melihat tahun 2021. Tahun 2021 ini, karena tahun 2022 kan belum ya, Pak, ya belum ada laporan. Tahun 2021 ini ada di DIPAnya 192, 192.430 unit, kemudian yang rumah swadaya, Pak, BSPS, kemudian capaiannya 127, padahal DIPAnya sejumlah itu dengan anggaran empat koma sekian. Saya ingin penjelasan saja, anggarannya ini 2,823 T yang yang telah tercapai atau yang telah direalisasi. Lalu kemana? Kan sayang begitu, sayang. Apa ada kendala-kendala yang menyangkut hal ini sehingga tidak bisa tercapai. Kalau targetnya ya itu di situ ada, target renstra, kemudian DIPA, dan capaian.

Kemudian yang kedua, Pak, saya ingin penjelasan, dari rumah susun, anggaran yang disampaikan atau direncanakan *tuh* 4,8, kemudian setelah dilelang 3,8, saya bisa, *enggak* bisa membayangkan, kalau kurangnya saja 1 M dengan anggaran 4,8 kemudian turun menjadi 3,8, bagaimana penjelasan itu? *Quality*-nya bagaimana, apakah juga luasannya juga berkurang, atau seperti apa, saya minta penjelasan, Pak. Kebetulan itu aspirasi dari kami, dari saya, sehingga saya mempertanyakan *quality* dan kuantitas dari unit yang, atau kamar-kamarnya mungkin, atau apanya yang kurang, saya kurang tahu. Sehingga ini dalam pikiran saya, bahwa itu pasti akan mempengaruhi kualitas yang ada. Ini kalau dari itu kan hampir hampir 75% ya yang, yang yang terealisasi untuk lelangnya itu, sehingga masih jauh untuk itu. Dan kalau kita lihat dari tahun 2022 menuju 2023, itu jumlahnya menurun *loh*, Pak, jumlah yang dimasukkan di dalam rencana anggaran justru menurun, 103.000 kan? Kalau di tahun 2022 itu di dalam DIPAnya 172, tetapi di dalam targetnya renstra 118, artinya turun dari tahun 2022. Oleh karena itu, perlu Bapak-bapak sekalian untuk melihat kembali mana kira-kira yang bisa dibawa ke situ.

Terima kasih, Pimpinan, itu saja.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, Bu Sri.

Berikutnya Pak Syahrul Aidi, siap-siap Pak Ruslan M Daud.

F- PKS (H. SYAHRUL AIDI MAAZAT, L.c., M.A.):

Terima kasih, Pimpinan.

Langsung saja, pertama, Dirjen Cipta Karya. Bu, tadi dari pemaparan Ibu, saya belum dapat itu yang kemarin, SPAM IKK Desa Suka Ramai Tapung Hulu Bu, Kabupaten Kampar dan SPAM IKK Pelalawan. Kebetulan sudah dibangun oleh *intake*-nya oleh SDA. Dan ini sangat dibutuhkan sekali, karena kondisi masyarakat, kalau hujan, tidak hujan dua minggu saja mereka harus mengeluarkan anggaran satu juta per rumah tangga untuk kebutuhan airnya. Mudah-mudahan bisa selesai, Bu, 2023 ini bisa dinikmati, sehingga dapat *coat-tail effect* juga bagi kami untuk bisa terpilih lagi.

Kemudian terima kasih rehab SD-nya sudah jalan Bu, cuma yang madrasah dan SMA, Bu, belum, kita belum dapat. SK terakhir di bulan Juli kemarin saya dapat, kebetulan Riau tidak ada, madrasah untuk Riau, mudah-mudahan 2023, janji Bu Direktur, mudah-mudahan bisa terealisasi. Dan SD-nya juga masih banyak ada kemarin SD yang tertimpa oleh pohon, belum terakomodir.

Kemudian ini saya menyampaikan terima kasih dari Forum Komunikasi Pondok Pesantren Riau terhadap Program Sanitasi Lembaga Pendidikan Keagamaannya. Hanya saja masalahnya, sanitasinya dibangun, air bersihnya tidak ada, Bu, jadi tidak terfungsikan. *Nah*, saya mengusulkan, mana tahu kita punya untuk beberapa pesantren yang sudah dibangun sanitasinya, hanya saja airnya tidak, mana tahu ada program semacam PAMSIMAS lah, kalau di desa, berbasis desa selama ini, kita buat berbasis pondok pesantren. Karena kalau mengandalkan, ada juga pondok pesantren mengandalkan dari apa namanya, dari PDAM, itu mereka dapatnya kecil bagiannya, Bu, sementara yang tinggal di situ kan ratusan bahkan ribuan. Mudah-mudahan ada program untuk pondok pesantren itu dalam bentuk penyediaan air minum atau air bersih.

Kemudian untuk kemiskinan ekstrem, kemiskinan ekstrem yang ada di Cipta Karya ini, apa bentuknya? Saya punya PR, Bu, di Kabupaten Kampar itu ada di Kecamatan Kampar Kiri Hulu, dari 24 desa yang ada di kecamatan itu 23-nya adalah desa sangat tertinggal. Miris juga, Riau yang katanya kaya, ada desa yang sangat tertinggal, ada 28 desa yang sangat tertinggal, bukan lagi tertinggal, *nah*, adanya itu di Kampar 23 desa.

Nah, ternyata yang menyebabkan desa itu sangat tertinggal adalah akses mereka, akses mereka selama ini adalah melalui sungai. Ternyata ada jalan keluarnya sekarang, pemerintah sedang membangun jalur daratnya, Bu. KLHK memberikan izin untuk membangun semenisasi satu meter setengah, itu sudah dibangun oleh pemerintah daerah, tetapi panjang, Bu, lebih kurang 30 kilo. Tak kuat pemerintah daerah untuk melanjutkannya. Ada jembatan yang 5 meter itu puluhan, ada jalan, ada jembatan yang 20 meter ke atas.

Nah, saya berharap dari dirjen itu bisa masuk, untuk membantu pemerintah daerah mengentaskan kemiskinan ekstrem di 23 desa tersebut. Bentuknya mungkin PISEW dalam bentuk skala besar, begitu. Apakah seperti ada kita kalau KOTAKU dalam skala kecil, dananya 750, dulu 1 miliar, ada penanganan kumuh dalam skala kawasan kan, sampai 10 miliar. *Nah*, saya

berharap untuk kemiskinan ekstrem, untuk itu bisa dalam bentuk kawasan atau sifatnya kontraktual.

Kemudian untuk perumahan. Untuk perumahan, Pak, kemarin *Alhamdulillah* sukses, tetapi ada keterlambatan di pihak bank untuk mencairkan anggaran, Pak, di Riau, khususnya. *Nah*, saya lihat banknya ini bukan banknya Bank BNI, tetapi yang menanganinya itu dari Sumbar, Pak, atau wilayahnya. Apa tidak lebih baik kemudian, biar jarak koordinasinya itu lebih cepat, kita menggunakan bank daerah, Pak. Karena ada selentingan yang mengatakan, karena bank ini tidak mendapatkan apa-apa, mereka memperlambat itu biar *ngendap*, dugaannya seperti itu, Pak. Sehingga Kemarin banyak yang mengeluhkan, toko bangunan banyak yang mengeluhkan, Pak, dia sudah mengeluarkan bahan sampai 75%, *nunggu* sampai 2 bulan-3 bulan, *enggak* cair-cair.

Kemudian yang terakhir adalah, ini ada kontradiktif *nih* antara program yang ada di Perumahan dengan apa namanya Cipta Karya. Di Perumahan, kita tidak punya regulasi untuk *developer* membangun rumah, masih dibiarkan membuat sanitasinya itu perorangan, setahu saya begitu. Jadi kalau ada bangunan rumah bersubsidi lah contohnya, itu sanitasinya belum terpusat, Pak. Saya *ngusulkan*, jangan, supaya nanti jangan menambah pekerjaan dari Cipta Karya. Cipta Karya sekarang sanitasi, kan kita buat komunal, ya kan, terpusat, di desa-desa kita bangun terpusat. Sementara perumahan baru saja, sudah perorangan, begitu. *Nah*, maksud saya, tolong dibuatkan regulasinya agar pembangunan rumah-rumah perumahan yang dibangun oleh *developer* atau apapun, itu baru dapat izin oleh pemerintah daerah, harus dengan menyatakan bahwasanya mereka siap untuk membangun sanitasi yang komunal.

Itu saja barangkali dari saya, terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh,

KETUA RAPAT:

Pak Ruslan M Daud, belum ada? Pak, apa, Ibu Sadar, Sadarestuwati, silakan.

F- PDIP (Hj. SADARESTUWATI, S.P., M.MA.):

Terima kasih, Pimpinan.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Selamat siang salam sejahtera untuk kita semua,

**Pimpinan dan seluruh anggota Komisi V yang saya hormati,
serta Mitra Komisi V,**

Langsung saja, Ibu, untuk Cipta Karya, memang daerah banyak sekali, Bu, usulan untuk sekolah-sekolah yang sangat tidak layak, sangat amat tidak

layak, terutama di daerah-daerah yang sudah masuk pelosok, banyak sekali. Jadi bukan hanya di kabupaten saya saja, tetapi khususnya di dapil saya, ini bahkan hampir roboh juga ada. Akan tetapi yang kesulitan kami, setiap mau mengajukan kan harus melalui Kementerian Pendidikan. *Nah*, yang saya maksudkan, apakah bisa tanpa harus melalui Kementerian Pendidikan, kami mengajukan? Karena kalau hanya terfokus pada sekolah-sekolah negeri saja, sementara, mohon maaf, sekolah swasta yang khususnya, khususnya yang seperti Madrasah Ibtidaiyah (MI) ya, juga SD-SD yang di pelosok, seperti di tempat saya, ada yang mereka tidak bisa menempuh dengan kendaraan tapi harus jalan kaki, itu saja sekolahannya, ampun, sudah. Ini beberapa kali saya mengajukan untuk fasilitas rehab, tapi juga belum, mungkin juga karena apa, mungkin saya harus melalui Kementerian Pendidikan, itu yang membuat tidak bisa. Akan tetapi karena itu, salah satu persoalan besar, mungkin bisa dibuatkan prioritas tersendiri.

Kemudian yang kedua, berkaitan dengan sanitasi pesantren, Ibu. Benar tadi disampaikan oleh Bu Sri Rahayu, bahwasanya tidak sedikit pondok-pondok kecil tetapi mempunyai jamaah yang sangat besar dan mereka, mereka ngaji dan apa, ya melakukan apa namanya, pengajian-pengajian rutin itu di pondok tersebut, tetapi tidak mempunyai sanitasi. Ya mohon maaf, sangat amat terbatas dan ini boleh dibilang jorok lah. Tetapi ketika saya mengajukan, juga tidak bisa, karena terkendala harus ada, yang, santrinya yang menginap di situ. Santri ada, tetapi jumlahnya tidak banyak, hanya jamaahnya memang sangat banyak, itu di Nganjuk, saya beberapa kali *ngajukan* dan tetap tidak bisa.

Kemudian di sekolah-sekolah, juga seperti itu. Maka dari itu, saya mohon juga ada prioritas untuk apa, untuk yang, yang seperti itulah kondisinya. Mungkin nanti *dirubah* untuk regulasinya, aturannya yang *dirubah*, sehingga bisa memberikan kesempatan buat yang lainnya juga. Karena kalau untuk pondok pesantren semuanya, saya kira sekarang juga untuk di Jawa dengan banyaknya program ini, saya kira mungkin 1-2 tahun sudah, sudah penuh, barangkali ya.

Kemudian, Ibu, untuk mana tadi, untuk Perumahan dulu *deh*, untuk Perumahan dulu. *Nuwun sewu*, Pak Dirjen, untuk perumahan khusus, untuk perumahan khusus itu, kalau boleh kami meminta kriteria-kriterianya, agar kami bisa juga memberikan, apa, kepada masyarakat. Seperti halnya beberapa waktu yang lalu, saya juga menerima pengajuan dan ini, ini bukan dari masyarakat dapil saya, tetapi dari dapilnya kakanda saya, kakak Wandik ini, yang mengajukan perumahan yang apa, akibat banjir ya, kakak? *Nah*, itu sampai sekarang juga belum terlaksana.

Saya kira memang banyak hal, Pak Dirjen, yang harus lebih dilonggarkan khususnya untuk daerah-daerah yang memang rawan termasuk di tempatnya kakak Wandik ini yang rawan konflik juga, ya. Saya kira ini perlu di apa, utamakan, kasihan juga nanti kalau, apa, mungkin dari rumah khusus, mungkin pengadaan rumah khusus untuk PNS atau apa yang bertugas di sana, saya kira ini juga sangat penting, karena keselamatan, untuk keselamatan mereka.

Kemudian juga saya, tadi saya sama Bu Sri Rahayu bilang, ini sebanyak, berapa tadi, berapa ribu unit rusun itu, itu unit yang dimaksud itu unit kamarnya, oh unit kamarnya. Terus untuk *tower*, untuk *tower* untuk 2023 ini apakah *tower* yang bisa kami dapatkan itu tetap seperti kemarin, dengan 3 lantai, atau dibatasi hanya 3 lantai saja, kemudian lebih banyak 2 lantai atau seperti apa? Supaya kami tidak apa namanya, tidak bingung lagi, ketika, “*Loh* ini dapatnya cuman 2 lantai, Bu”, begitu, karena ini juga kami minta ada kejelasan juga, Pak.

Dan kami terima kasih banyak atas program-program, khususnya juga BPS Rusun untuk pondok pesantren yang sudah berjalan, BPS-nya *Alhamdulillah* masyarakat senang sekali, mungkin Bapak kalau lihat, juga ikut senang karena bangunannya luar biasa, bagus-bagus dan kita *enggak nyangka* mereka sampai jual ini, jual itu, untuk bisa membuat rumah dengan mendapatkan subsidi dari pemerintah ini. Terima kasih begitu juga dengan Bu Dirjen Cipta Karya, terima kasih banyak atas semua program-program yang sudah diberikan untuk dapil saya, khususnya. Dan tentunya ini tidak cukup, kami terus akan meminta lagi, meminta lagi, dan terus, tentunya bukan untuk saya, tetapi untuk seluruh warga masyarakat.

Terima kasih, Pimpinan.

Wassalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh,

KETUA RAPAT:

Waalaikumsalam,

Terima kasih, Bu Estu.

Pak Eddy Santana, belum ada? Ibu Eem, silakan Bu Eem.

F- PKB (NENG EEM MARHAMAH ZULFA HIZ., M.M.):

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Salam sejahtera untuk kita semuanya,

Om swastiastu, namo buddhaya,

Pimpinan Komisi V beserta anggota Komisi V yang saya hormati dan saya banggakan,

Ibu Dirjen Cipta Karya dan Bapak Dirjen Penyediaan Perumahan beserta jajaran yang hadir yang saya banggakan,

Pertama, mengamati paparan dari Pak Dirjen dan Bu Dirjen, sebenarnya saya agak kecewa. Apa, karena apa? Ini masih angka-angka yang lama, belum ada perubahan ya. Belum, artinya ini belum mengakomodir apa yang menjadi usulan-usulan masyarakat di daerah pemilihan kami, Pak. Padahal kita mengakomodir usulan-usulan itu adalah jelas dasarnya, itu adalah kerja-kerja

konstitusi kita, seperti itu. Oleh karena itu, saya berharap pada Pimpinan, nanti untuk di kesimpulan, saya kira angka-angka ini jangan kemudian menjadi draf di kesimpulan. Apa, walaupun tadi Pak Dirjen Penyediaan Perumahan menyampaikan sudah melakukan *exercis,e* tapi memang kan kalau belum termanifestasikan, saya kira ini harus, harus ini dulu, ya apa, harus jelas dulu seperti itu. Itu yang pertama.

Terus kemudian yang kedua, saya juga ingin menanyakan terkait hasil kunjungan kunsfik kami ke Maluku Utara, terutama untuk Kabupaten Halmahera Selatan, Pak, beberapa permohonannya itu juga saya lihat belum apa, ada di dalam draf ini, itu kan. Padahal itu jelas kalau kunsfik itu jelas ada tatibnya, kita jelas juga itu dalam rangka menjalankan konstitusional kita. Kalau kita, karena menurut Pak Bupati sana, selama Maluku Utara, dulu kan Maluku, menjadi Maluku Utara, itu tidak pernah ada pembangunan ke sana, ketika berpisah. Dan kalau kita bicara Maluku Utara, basis terbesar masyarakatnya ada di Halmahera Selatan, tetapi selama ini pembangunan di Maluku Utara lebih banyak ke Morotai, seperti itu. Saya juga agak kecewa ketika kemarin apa, apa, KaBalainya bilang, "Ya ini kita dari sananya, ya *enggak* ada untuk yang itu, hanya untuk daerah terluar *aja*" itu kita juga jawabannya, kecewa. Padahal kita datang ke sana jelas *gitu*, itu ada dasar konstitusinya, itu yang pertama. Termasuk mungkin mohon nanti sekolah-sekolah yang rusak di sana mohon diakomodir, terus kebutuhan air minum, air baku, seperti itu, mohon juga bisa diakomodir, itu.

Terus kemudian untuk, saya *tuh* pernah dulu ngusulkan MTSN kota Bogor, ya dulu ketika atapnya roboh, kita langsung *nge-WA* Pak, apa, *nge-WA* KaBalainya dan langsung melakukan kunjungan. Tetapi sampai hari ini, realisasinya progresnya memang sudah, sudah dicek, sudah didatangi, tetapi kami belum menerima laporannya, apakah ini akan kemudian masuk di sana atau tidak, *gitu kan*, kami belum, belum dapat laporan.

Terus untuk rumah, Pak, ya, tadi saya juga menyinggung, apa, ada sinyal dari Pak Aidi Mazaat ya. Kalau saya berharap mitra perbankannya lebih baik pakai bank nasional *aja*, Pak, jangan bank daerah, ya. Jadi kita kalau bank daerah itu agak, agak *ribet gitu* kan, dan mereka juga biasanya terkooperasi oleh pejabat di daerahnya masing-masing, tapi kalau bank nasional, tidak. *Kayak* kemarin kita kalau yang BNI waktu di Kota Bogor pakai BNI, lancar, Pak. Tapi kalau yang di apa, Bank BJB, yang BJB itu lambat, terus kemudian nanti yang datangnya itu kadang satpamnya ini dan lain sebagainya. Jadi *kayaknya* mereka tidak memperlakukan kita manusiawi *gitu*, beda dengan yang BNI, kalau BNI, mereka, pejabatnya yang seperti itu. Jadi kalau saya berharap, nanti apa, Kementerian PUPR dalam hal mengambil mitra untuk finansialnya keuangannya, tolong lebih baik pakai bank nasional *aja*, bisa BRI, bisa Mandiri, bisa BNI dan sebagainya, tapi jangan bank daerah, seperti itu. Karena bank nasional kan sudah semua jaringan sudah banyak di mana-mana, apalagi BRI, sudah banyak di mana-mana. Jadi justru akan lebih mudah ketimbang bank-bank daerah, seperti itu. Dan kerjanya lebih cepat juga, Pak, *gitu kan*, mereka bawa mobilnya langsung untuk melayani dan lain sebagainya, seperti itu. Beda dengan BJB, *wah* itu apa, lambat sekali seperti itu.

Terus kemudian untuk Cipta Karya, ini memang itu kan sekolah-sekolah untuk negeri, tetapi kalau yang misalkan karena bencana, sekolah-sekolah yang terkena bencana walaupun swasta, *gitu*, saya berharap itu juga bisa diakomodir. Saya dulu sebenarnya Kasatker Cipta Karya di Jawa Barat dan KaBalai nya juga pernah ikut juga, Pak, PPK-nya ikut juga, dan menyaksikan sekali, menyaksikan sendiri, kita ke daerah-daerah apa, daerah-daerah stunting ya, dari sini *aja* 9 jam, padahal itu ada di Cianjur, saya mau ke sana itu harus melalui Bandung dan di sana tidak ada sinyal. Jadi mereka ketika kemarin sekolah secara *online*, mereka tetap sekolah, walaupun masa pandemi *gitu kan*, mereka akhirnya tidak sekolah, *gitu kan*. Nah, di sana sekolahnya itu karena SD itu jauh, sekolah negeri itu jauh, dan tidak mungkin ditempuh, akhirnya ada yang swasta dan ternyata yang swasta juga memprihatinkan, Pak, atapnya sudah sudah apa, tidak hanya bocor ya, kalau bocor kan mungkin ada beberapa yang ini, *udah, udah rubuh* sebagian *gitu kan*.

Nah, ini kan kalau kemudian kita tidak perhatian terhadap hal yang seperti itu, mereka itu juga walaupun masyarakat itu di pelosok desa, mereka punya hak untuk mendapatkan pendidikan, *gitu kan*. Ya memang negeri tidak ada di sana, *gitu*, kalau ke negeri ya mereka bisa berangkat misalkan habis Subuh, *nyampenya* bisa misalkan jam 11 dengan jalan kaki dan lain sebagainya, seperti itu.

Jadi tolong juga ada perhatian lah, hal-hal yang wilayahnya seperti itu. Jangan kemudian dipukul rata. Saya beberapa kali kan, ini bukan negeri, terus kemarin tidak mau menangani, tapi tolong sisi kemanusiaan, oke ada, ada kebijakan, tapi diatas kebijakan juga harus ada kebijaksanaan. Karena kebijakan itu *dibikin* juga karena sebenarnya kan dalam rangka untuk bagaimana kita bisa bijaksana dalam menangani masyarakat dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi di negeri ini. Semua anak-anak Indonesia itu ada juga anak negeri kita, Warga Negara Indonesia dan kita punya kewajiban untuk mencerdaskan bangsa itu adalah termaktub di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar, seperti itu, itu jelas, Pak. Jadi jangan kemudian hak mereka untuk mendapatkan pendidikan, karena sarana prasarana tidak ada, kemudian akhirnya terabaikan.

Saya mohon ini ini menjadi perhatian, Bu, ya. Di Cibuluh, Desa Cibuluh itu, Pak, Bu, ya. Memang itu bukan SD, tetapi hanya itu satu-satunya, bahkan dari mulai SD, SMP sederajat itu *tuh* ya di gantian, gantian, yang paginya sekolahnya apa, terus yang sorenya tingkat SMP, seperti itu, *saking* tidak ada bangunan lagi seperti itu, itu tolong ya. Kecuali kalau negeri ada, kecuali kalau misalkan negara mau memfasilitasi membangun SD Negeri, SMP Negeri, SMA Negeri di sana, oke. Kalau tidak mampu membangun, ya tolong lah *gitu kan*, swasta ini sudah berpartisipasi, itulah, tolong diakomodir, difasilitasi.

Mungkin itu saja, terima kasih.

Wallahulmuafiq ila aqwamiththariq,

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

KETUA RAPAT:

Waalaikumsalam,

Makasih, Bu Eem.

Pak Fadholi, belum ada? Pak Fadholi, belum ada. Pak Eddy Santana, silakan Pak Edi San, silakan, Pak.

F- P. GERINDRA (Ir. EDDY SANTANA PUTRA, M.T.):

Maaf, saya langsung saja ke Ibu Dirjen Cipta Karya, tadi banyak dipaparkan juga, ini masalah SPAM, SPAM. *Nah*, yang ingin saya tanyakan pemilihan itu *gimana*? Apa super prioritas? Kalau saya lihat, *ndak* juga itu *ngacak* juga. Artinya kami mengerti *gitu*, dengan keterbatasan anggaran, *enggak* mungkin itu semua seluruh Indonesia kota-kota itu masuk, *gitu kan* untuk program SPAM-nya. *Nah*, yang ingin saya sampaikan, bahwa kami juga di daerah, di dapil saya, ada juga di Sumatera Selatan umumnya, itu membutuhkan SPAM. Kalau *enggak* salah *udah* dua tahun, ini tahun ketiga, hampir tiga tahun, Kamis ini Oktober, tiga tahun. *Nah*, dua tahun yang lalu kita sampaikan untuk Palembang, sampai sekarang belum ada itu programnya. Padahal *kenapa* saya sampaikan? Palembang itu perlu dibantu, dia sudah 95% bisa melayani masyarakat kota, *gitu*, ya yang populasinya satu juta setengah. *Nah*, sekarang itu agak macet, karena apa? Perlu anggaran yang besar untuk dia mengantisipasi tambahan populasi itu ya. Jadi sekarang dari yang tempo hari 1,5 sudah 1,7, 1,8 sekarang, dengan perkembangan juga urbanisasi yang begitu begitu cepat, ya. *Nah*, ini Bu, jadi pernah Direktur Utama PDAM menghadap Ibu, saya menyampaikan juga, *nah*, mohon itu didukung lagi, dilihat lagi, rencananya sudah ada semua, *detail engineering design* sudah, tinggal Ibu pilih yang mana, Bu, "Oh ini kita perlu bantu, bantu ini yang yang belum", *gitu kan*. Karena kalau *enggak* salah mereka perlu 400, semuanya 400 miliar, tapi ya, berapa yang Ibu bisa berikan itu ya? Berapa yang PUPR bisa berikan tambahan. Nanti sistemnya, *scheme*-nya macam-macam, ada uang PDAM sendiri, ada juga pinjaman, kemudian ada juga dukungan APBN, ini yang kita harapkan. Selama ini sedikit sekali, Bu, sentuhan bantuan dari APBN ke kota Palembang itu. Ya kami kan 10 tahun di sana, juga sedikit sekali, zaman Pak Menteri yang lama dulu ya.

Selanjutnya untuk Dirjen Perumahan, ini ada khusus ya, usulan dari Bengkulu, Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Di kampus itu membutuhkan rumah susun dan ini ada, ada juga janji dari Bapak Presiden waktu Tanwir Muhammadiyah 15-19 April 2019. Tentu janji itu atas permintaan *gitu*, permintaan dari mereka, dari rektor dan civitas akademiknya. *Nah*, tapi sampai sekarang belum ada realisasi. *Nah*, mohon ini jadi prioritas, karena *ndak* enak juga nanti, sampai nanti mereka nanyakan ke Bapak Presiden, tapi sampai sekarang belum ada ini. Mungkin lupa ini, terlupakan atau ya

bagaimana, ini mohon, saya ada usulannya dan ada gambar-gambarnya juga, termasuk Presiden, menyerah, apa, membuka resmi Tanwir Muhammadiyah di Bengkulu tersebut.

Terima kasih, saya kira ini saja saya, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, Pak Eddy.

F-P. GERINDRA (Ir. EDDY SANTANA PUTRA, M.T.):

Saya serahkan, boleh?

KETUA RAPAT:

Penyerahan sekaligus, Pak, terakhir, iya sekaligus terakhir, Pak.

Kemudian dari Pak Eddy Santana, Ibu Novita Wijayanti, silakan, Bu.

F- P. GERINDRA (Hj. NOVITA WIJAYANTI, S.E., M.M.):

Terima kasih, Pimpinan.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Semuanya yang saya hormati,

Saya flu, tapi sudah PCR, aman, PCR tiga kali, jadi dicolok-colok terus. Kepada Ibu Dirjen, semuanya, memang kalau Cipta Karya ini kan kita ketahui banyak sekali programnya yang menyentuh dengan masyarakat. Dari dulu kita selalu senang sekali dengan program yang ada di Cipta Karya, pastinya di PU, Cipta karya, kemudian Perumahan dan semua dirjen, terutama di Cipta Karya. Contohnya ada sanitasi, PISEW dan apa namanya, rehabilitasi sekolah dan semuanya, itu sangat menyentuh. Dan kita sangat terima kasih kalau beberapa program sudah turun.

Di sini yang pertama pasti saya ucapkan terima kasih, karena ada program SMA Taruna Nusantara yang sudah rencananya realisasi. Saya cuman belum tahu anggarannya berapa, Bu, untuk TN, karena TN juga mengucapkan terima kasih sekali kepada kementerian, karena sudah dibantu. Cuman saya belum tahu detailnya, karena saya belum apa, mendapatkan koordinasi lagi yang secara detail, karena permintaannya macam-macam itu kan ya, Bu, ya, ada beberapa *gitu*. Dan harapannya nanti bisa dibantu, karena ini sekolah unggulan, *gitu*. Saya ingin tanya anggarannya berapa? Mungkin kalau sekarang sudah ada dikasih tahu, kalau belum ya mungkin bisa komunikasi juga, saya juga sudah WA dengan Pak Cakra. Karena KaBalainya, Pak Cakra, baik, juga Pak Cakra dalam komunikasi sangat komunikatif. Kemudian, itu yang Taruna Nusantara, Bu.

Kemudian yang cerita IKN, IKN saya lihat di 2023 ada 10 triliun ya, Bu, ya. Pastinya di situ di 7 triliun kalau *enggak* salah ada pembangunan lembaga negara apa itu, termasuk DPR berarti di situ ya, Bu, ya, termasuk. Kemudian tahun ini anggarannya sudah berapa, jadi total sudah berapa yang dianggarkan untuk IKN dan mungkin Bu Dirjen tahu *enggak* apa anggaran yang di luar dari APBN, tadi yang seperti ditanyakan oleh Pak Ishak Mekki, saya ingin tahu juga.

Kemudian usulan-usulan yang sudah masuk, diharapkan nanti bisa dikoordinasikan lebih lanjut, karena pasti teknisnya banyak sekali, Bu, karena banyak program. Dan harapannya, karena programnya ini banyak sekali, mungkin *kayak* kita anggota atau TA banyak yang belum bisa mengusulkan karena *enggak ngerti*, oh ternyata bisa ini, bisa itu. Jadi harapannya, KaBalai dan jajaran nanti bisa menginformasikan apa saja yang bisa kita usulkan secara terbuka, *gitu*, karena yang selalu kita sampaikan anggaran ini kan untuk kebersamaan untuk masyarakat.

Kemudian sampah, Bu, itu TP pembuangan sampah ya. Saya ingin tanya, kalau sampah B3 dan sampah sampah sisa rumah sakit itu *gimana* penanganannya? Apa di tempatnya Ibu atau di Komisi IV, *gitu*. Karena B3 sama rumah sakit kan sekarang bahaya *banget* ya, sekarang tiga tahun kita ada Covid ,pasti sampah-sampah yang bahaya dan pencemaran lingkungannya tinggi itu di mana-mana ada. Dan saya lihat juga banyak permasalahan sampah-sampah ini *numpuk*, kemudian dibuang sembarangan *gitu kan*, ada macam-macam yang membahayakan lingkungan ini *gimana* penanganannya?

Kemudian kemiskinan ekstrem juga ini pastikan secara holistik itu ya, sinergi antar semua kementerian, tidak hanya di PU, *gitu*. Ada Bappenas, kemudian Kementerian Desa, Keuangan, dan di sini dirjen juga, di Cipta Karya, dan Perumahan, dan semuanya. Pastinya data kemiskinan ekstrem itu saya harapkan tadi ya, Pak Iwan, juga menyampaikan datanya dari BPS. Yang saya ingin ingatkan, data itu juga nanti tolong sampaikan kepada apa, BPS juga harus *update*, Pak, jangan data yang lama dipakai, tetapi bukan yang terbaru. Karena sekarang ini kan harus, bahkan kalau perlu setiap hari, setiap saat itu ada data terbaru, sehingga kita bisa tepat sasaran. Itu untuk Cipta Karya, pastinya harapannya, dengan begitu banyaknya program, itu kita bisa maksimal memberikan usulan-usulan di daerah.

Yang menjadi PR ada satu, salah satu adalah yang sekolahan *sih*, Bu, pendidikan ini. Pendidikan ini memang masih lempar-lemparan dengan Komisi X, setiap, setiap pembahasan, *ketemu* dengan teman saya di fraksi atau di mana-mana, *image* bahwa anggaran pendidikan, pembangunan kelas, dan lain sebagainya itu ada di Komisi V, padahal kan menurut Ibu, katanya hanya renovasi gedung-gedung yang rusak parah, ya. Tapi mereka itu menyampaikannya, katanya semua mengenai infrastruktur pembangunan itu ada di Komisi V, *gitu*. *Enggak* ya, Bu, ya? Ya *udah*, itu mungkin untuk pencerahan, Pimpinan.

Kemudian untuk Pak Cakra dan jajarannya sudah bagus, tapi harapannya nanti bisa ditingkatkan mungkin ya, Bu, ya disampaikan kepada

jajaran, saya *sih* sudah baik komunikasinya. kemudian kepada Perumahan, Pak Iwan, apa namanya, harapannya *sih* BSPS pasti tambah ya, Pak, ya, karena itu sangat mengena untuk masyarakat. Kalau data Pak Iwan, mungkin jumlahnya berapa itu kemarin, 2 juta atau berapa ya, Pak, ya? Jumlah rumah tidak layak huni se-Indonesia itu berapa itu? Yang *real* sebenarnya kalau boleh tahu, pasti lebih banyak. Karena contoh di dapil saya aja di Kabupaten Cilacap atau Banyumas, satu kabupaten itu datanya katanya umpamanya 100.000, tapi kalau kita turun ke lapangan itu sebenarnya lebih banyak lagi itu datanya bahwa banyak rumah-rumah yang butuh bantuan uluran BSPS. Makanya anggaran ini kalau perlu diperbanyak, sehingga kita bisa lebih banyak membantu masyarakat.

Begitu juga dengan rusunawa, kita kan jumlah bisa mengusulkan hanya satu atau berapa. Dengan jumlah kebutuhan yang banyak, harapannya tidak hanya satu, Pak Iwan, bisa dianggarkan untuk kita bisa mengusulkan lebih dari 1, 2 atau 5, *gitu*.

Kemudian IKN, ini saya lihat ada 82 *tower*, saya belum bisa menggambarkan karena Pak Iwan kan belum menggambarkan. Ini lokasinya apa satu lokasi semua *tower*, apa *enggak*, bukan 82 *tower* ya atau ya 22 ya? Mungkin tadi saya belum lihat, kaca mata, pakai kaca mata kali, ya. Apakah *tower* itu dibangun dalam satu kawasan atau berbeda-beda *gitu*? Kemudian ukuran 3,6 itu untuk satu pintu satu kamar satu orang atau berapa orang? Ini hanya ingin gambaran saja, bagaimana nanti pembangunan di IKN.

Kemudian rusun-rusun yang tadi Pak Iwan ada beberapa permasalahan yang tidak diterima oleh kepala daerah yang sudah berganti, *gitu* kan. Tadi ada beberapa permasalahan Pak Iwan sampaikan, sehingga kalau tidak bisa diserahterimakan karena perbedaan kepala daerah, kemudian digunakan oleh kementerian itu sendiri, *gitu*, ya, Pak, ya. Saya mau tanya, ada *enggak* rusun yang kemudian dibisniskan atau disewakan kepada masyarakat, sehingga ada pendapatan di luar pajak atau *gimana*, atau hanya semuanya digunakan oleh kepentingan orang-orang dari kementerian, ada *enggak* yang di bisnis atau disewakan kepada masyarakat umum?

Yang terakhir, ini ada data ditulis, CSR untuk rumah-rumah. *Lah* ini tadi di halaman berapa ya? 23. Itu CSR ini bentuknya rumah bagaimana dan berapa nilainya? Ada di halaman 23 Pak Iwan, mungkin ya. Ada program CSR untuk rumah masyarakat berpenghasilan rendah, kalau *enggak* salah itu. Ini CSR-nya dananya dari mana, kemudian besarnya berapa nominalnya? Yang terakhir, pastinya kembali datanya, tolong dalam berkoordinasi dengan BPS, minta data yang *ter-update*, terbaru itu.

Itu, Pimpinan, yang pasti program untuk kita di 2023 minta diperbanyak, karena kita langsung bersentuhan dengan konstituen dan masyarakat.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

KETUA RAPAT:

Walaikumsalam,

Makasih, Bu.

F- P. GERINDRA (Hj. NOVITA WIJAYANTI, S.E., M.M.):

Kalau di tempat saya, Pak Salahuddin *sih* bagus ya, *makasih*. Sudah *wassalam* eh masih *ngomong* ya?

KETUA RAPAT:

Sudah minta terima kasih, *wassalam*, masih *ngomong*.

Pak Fadholi, silakan Pak, Fadholi.

F- P. NASDEM (Drs. FADHOLI):

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Kepada Ibu Dirjen ya, yang pertama, saya akan menyampaikan beberapa hal yang kaitanya dengan rambu-rambu usulan sekolahan dan sebagainya, mungkin itu perlu disampaikan, ya. Karena ini banyak sekali yang usul, tapi kan kita *enggak* paham jangan sampai kita usulkan 10, yang diterima hanya satu atau dua, jadi kan *enggak* enak nantinya itu.

Kemudian yang kedua, serapan tahun 2022 ini kira-kira bisa tuntas apa *enggak* ya, Bu? Sampai agustus ini kan tadi *udah* disampaikan. Ya kalau memungkinkan itu tidak bisa tuntas kan, masih ada waktu untuk evaluasi itu. Saya pikir itu menjadi bagian yang sangat penting karena kaitannya juga dengan yang akan datang. Di Semarang, ini saya bicara dapil *aja*, Bu, jadi karena yang lain saya prinsipnya memberikan apresiasi lah. Di Semarang ini ada pasar di Ngaliyan ya, Pasar Ngaliyan ini *udah* dibongkar, sudah dibuatkan tempat penampungan sementara ya, tetapi sampai sekarang ini belum apa-apa, sehingga sudah berapa tahun itu. Apakah itu memungkinkan untuk bisa di-cover melalui dana APBN? Dan nanti saya akan koordinasi juga dengan kepala balai untuk bisa, akan saya cek bersama-sama. Kalau itu memang memungkinkan, barangkali itu penting, karena di Kota Semarang, di Ngaliyan itu cukup bagus.

Berikutnya adalah, ada beberapa hal yang mungkin perlu diluruskan kaitanya dengan masalah PAMSIMAS. Ini kan selalu saja ini ada *conflict of interest* terhadap PDAM, jadi ada beberapa daerah di situ, PDAM-nya tidak mampu melancar keseluruhan, tetapi kalau kemudian kalau kita mengusulkan PAMSIMAS itu mesti harus koordinasi dengan PDAM dan sebagainya. Padahal kalau PDAM kita konsultasi, mereka merasa karena semuanya akan diambil pelanggan, *nah*, sementara mereka tidak mampu untuk bisa melayani itu. Nah, ini maka perlu ketegasan karena agar nanti kepentingan PDAM itu kemudian

mengorbankan kebutuhan masyarakat. *Nah*, ini harusnya harus ada satu pernyataan mandiri antara PAMSIMAS dengan PDAM. Karena PAMSIMAS ini kan tentu akan dikelola oleh masyarakat. Sementara, PDAM itu kan dikelola untuk kepentingan PDAM lah, kan salah satunya adalah untuk kepentingan badan usaha. Jadi ini nanti perlu ada satu, satu ketegasan, agar tidak selalu tergantung kepada, apa, persetujuan atau rekomendasi dari PDAM ini, kan sayang.

Jadi itu catatan-catatan saya, dan ada beberapa hal yang usulan ini kaitanya dengan sekolah, dengan apa ini kan, karena ini belum tahu rambu-rambunya, sehingga nanti perlu dijelaskan secara detail dan lebih lanjut.

Kepada Pak Dirjen, terima kasih, Bu Diana. Pak Dirjen, jadi saya hanya akan menyampaikan, di Salatiga itu ada Universitas ya, dulu, kemudian STAIN, sekarang menjadi UIN. Sejak tahun 2020/2021, itu sudah mengusulkan rusunawa kelihatannya, dan rektornya *udah* ketemu saya, *udah* ketemu saya, saya, oh *udah* bagus kalau *udah* diusulkan kan itu. Karena sekarang ini mahasiswanya cukup besar dan cukup banyak sekali, apakah memungkinkan itu bisa diakomodir pada tahun 2023 atau mungkin ada kepastian tahun 2024? Jadi ini biar ada satu kejelasan, mereka biar nanti secara antrian atau ini bisa diharapkan, jadi harapannya itu pasti, bukan harap-harap cemas *gitu*, Pak.

Saya pikir itu saya akan sampaikan itu saja. Untuk hal-hal yang lain, tentu karena nanti berbasis dapil, kami akan sampaikan secara terpisah.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh,

F- PPP (H. SYAIFULLAH TAMLIHA, S.PI., M.S) - WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:

Wa'alaikumsalam warahmatullah wabarakatuh,

Selanjutnya, Pak Willem Wandik, jangan sampai tiga kali.

F- PD (WILLEM WANDIK, S.Sos.):

Baik, Pak Ketua, langsung saja.

Pertama untuk dirjen, Ibu Dirjen Cipta Karya. Kami memberikan apresiasi atas capaian kinerja selama 2021, baik kegiatan yang sifatnya reguler maupun juga terkait program dalam rangka menyongsong G20. Dan kami berharap dukungan kepada KSPN di wilayah Indonesia, ini serah terima asetnya segera dilakukan, agar dapat dikelola dengan baik dan banyak infrastruktur Cipta Karya yang belum dikelola selama ini di kawasan pariwisata nasional, dikarenakan belum adanya serah terima aset, kiranya segera ditindaklanjuti.

Dan terkait dengan pagu anggaran Cipta Karya sebesar 25 triliun untuk tahun 2023, kami perlu mendapatkan kejelasan terkait program yang kami, yang masuk ke Provinsi Papua, yang dapat berdampak langsung kepada masyarakat seperti halnya PAMSIMAS, SANIMAS, PISEW, KOTAKU dan lain-lain, supaya, termasuk lokasinya di mana, dan supaya bisa kami tindaklanjuti.

Dan yang untuk Bapak Irjen Perumahan, eh Dirjen Perumahan. Kalau melihat paparan, sepertinya perlu ada penjelasan khusus capaian Dirjen Perumahan untuk tahun 2021, di mana pembangunan rumah, rumah khusus dicapai 62% dan rumah dan bantuan stimulan rumah swadaya tercapai 66%. Sedangkan pembangunan rumah susun dan bantuan PISEW untuk perumahan bagian BR hampir mencapai 100%, padahal pembangunan rumah khusus dan rumah swadaya yang sekarang ini justru banyak dibutuhkan oleh masyarakat di wilayah yang masuk kategori terdepan atau terluar, terisolir, dan juga terpencil. Dan apa permasalahannya, sehingga kegiatan-kegiatan tersebut tidak mencapai target yang dibutuhkan?

Dan juga terkait dengan program dan kegiatan tahun anggaran 2022, kami minta agar usulan dan program kegiatan di dapil kami untuk Papua, yang mana yang bisa dapat manfaatnya atau bersentuhan langsung dengan masyarakat, seperti halnya di sini rumah khusus atau bantuan rumah swadaya atau rusunawa, ini kalau bisa diperhatikan baik, terutama seperti rumah-rumah tokoh agama, baik itu ustad atau kyai atau pendeta, pastor dan juga seperti pesantren dan juga sekolah-sekolah swasta keagamaan, seperti baru-baru itu kami juga sempat survei lokasi sekolah pendidikan sekolah keagamaan di Stakin Sentani Jayapura, itu perlu jadi perhatian. Dan juga perlu diperhatikan juga asrama daripada mahasiswa Uncen itu, baru-baru dibongkar karena ada persoalan satu dan lain hal, sehingga ini juga perlu mendapat perhatian. Walaupun selama ini diperhatikan oleh pemerintah daerah, tapi kami melihat dengan situasi ketidakstabilan PAD di daerah, juga mengharapkan butuh sentuhan dari APBN.

Dan yang terakhir, untuk dalam penyelenggaraan pembangunan yang bersentuhan langsung kepada masyarakat seperti katakanlah rehab-rehab rumah, selalu saya sampaikan di sini bahwa jangan sampai terjadi penyamaan definisi dan diperlakukan sama se-Indonesia. Karena kami di Papua itu ada 5 wilayah adat Provinsi Papua dan tentu memiliki, apa, konteks yang begitu beragam terkait dengan *cost* dan inflasi yang dihadapi di 5 wilayah adat, itu beda. Katakanlah di sini seperti di Pegunungan Tengah itu beda dengan di pantai atau di wilayah adat lain. Seperti katakan di sini di Pegunungan Tengah atau rumah-rumah rata-rata semua pakai kayu, tapi kalau diseragamkan dengan kondisi di pesisir, maka akan mengalami ketimpangan. Misalnya bahan bangunan, materialnya dari Jayapura diangkut pakai pesawat ke Wamena dan juga pasir-pasir juga harus diambil dari Wamena. Harga pasir dan harga kayu dan juga material bangunan lainnya sedikit beda lebih mahal daripada ketimbang di pantai, sehingga begitu sampai di kabupaten, dari kabupaten ini kita sewa masyarakat harus pikul dan itu harus kasih gaji, harus kasih makan, sementara biaya untuk rehab-rehab atau apa, PSBS ini sangat sedikit sekali, ini kondisi yang dihadapi daerah sedikit beda. Sementara dalam

penyelenggarannya, disamakan dengan daerah lain, PSBS-nya kudu disamakan, padahal di gunung sana atau daerah-daerah yang jauh dari provinsi, itu *cost* dan inflasinya itu luar biasa, semua harus pakai pesawat. Oleh karena itu, harus disesuaikan dengan kondisi yang daerah masing-masing. Karena itu kalau memang di sini ada, Pak Balai Perumahan di Papua, tolong diperhatikan, jangan terjadi penyamaan definisi dari perlakuan yang sama seluruh Papua, justru bukannya membangun, tapi justru meninggalkan ketimpangan yang luar biasa, menciptakan masalah baru di daerah.

Sekian, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, Pak Willem.

Pak Sumail.

F- P. GERINDRA (Ir. SUMAIL ABDULLAH):

Terima kasih, Pimpinan.

Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh,
Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua,

Pak Ketua, saya ingin tahu, rapat kali ini juga diikuti oleh KaBalai tidak di masing-masing wilayah?

KETUA RAPAT:

Seluruh diikuti, bahkan tadi perkenalkan Pak, diperkenalkan tadi pagi, Pak, semuanya.

F- P. GERINDRA (Ir. SUMAIL ABDULLAH):

Saya ingin mastikan bahwa KaBalai Cipta Karya sama Perumahan di Jawa Timur masih, masih hadir, Pak, bisa ditampilkan barangkali, Pak.

DIREKTUR JENDERAL PERUMAHAN KEMENTERIAN PUPR RI (IWAN SUPRIJANTO, S.T., M.T.):

Mungkin bisa ditampilkan.

DIREKTUR JENDERAL CIPTA KARYA KEMENTERIAN PUPR RI (IR. DIANA KUSUMASTUTI, M.T.):

Pak Reva, Pak Reva, masih ada?

DIREKTUR JENDERAL PERUMAHAN KEMENTERIAN PUPR RI (IWAN SUPRIJANTO, S.T., M.T.):

Pak Sultan Sidik, mungkin beserta Kasatkernya juga yang Jawa Timur ada, Pak.

F-P. GERINDRA (Ir. SUMAIL ABDULLAH):

Pak Reva sama Pak Sultan?

DIREKTUR JENDERAL PERUMAHAN KEMENTERIAN PUPR RI (IWAN SUPRIJANTO, S.T., M.T.):

Coba ditampilkan di,

DIREKTUR JENDERAL CIPTA KARYA KEMENTERIAN PUPR RI (IR. DIANA KUSUMASTUTI, M.T.):

Reva, Pak Reva.

KETUA RAPAT:

Penting sekali rupanya ini, penting.

F- P. GERINDRA (Ir. SUMAIL ABDULLAH):

Iya sangat penting, saya lanjutkan saja, Ibu.

Sejauh ini Pak Dirjen dan Bu Dirjen, sejauh ini sebenarnya koordinasi kami dengan beliau-beliau, sangat bagus. *Kenapa* saya ingin memastikan bahwa beliau-beliau juga tetap, apa namanya, mengikuti rapat pada kesempatan kali ini? Karena ada satu kabupaten di dapil saya, Kabupaten Bondowoso, secara geografis letaknya terpencil, faktor alamnya juga kurang menguntungkan, dibandingkan Kabupaten-kabupaten lain. Dua tahun yang lalu, saya bersama kawan-kawan, kunjungan reses ke sana, Pak Ketua. *Nah*, sebagaimana yang kita pahami bersama, bahwa penyusunan program salah satu yang menjadi acuan adalah kunjungan reses. Kemarin saya mendapatkan kunjungan juga Pak Bupati dari Bondowoso melalui Kepala Dinas Pemukiman dan apa namanya, cipta ruangan lah di sana ya mengatakan kepada kami, "Pak, mana hasil kunjungan itu, apa yang telah dilakukan?" *Nah*, tentu ini kan bagi kami juga, ah terima kasih Pak Reva masih apa namanya, hadir.

Maksud saya, Ibu, karena juga banyak usulan-usulan yang dari Balai, tentu saya ingin bahwa apa yang telah disampaikan dan kita dapatkan pada saat itu, paling tidak direalisasikan. Terlebih bahwa selama ini Bondowoso secara kemiskinan ekstrem, salah satu yang tertinggi di Jawa Timur, banyak juga pemukiman warga yang juga, apa, tidak layak. *Nah*, ini pada kesempatan kali ini, saya ingin menegaskan kembali agar konsentrasi kita terutama saya berbicara dapil hari ini, Pak Reva dan Pak Sultan, untuk memusatkan perhatiannya di Kabupaten Bondowoso. Itu yang pertama.

Yang kedua, Muncar adalah salah satu daerah penghasil ikan, Ibu, terbesar di Indonesia. Sementara produksinya dari tahun 2012 ke 2016 terus menurun 51 juta kg pada saat kira-kira 2012 dan 16 jadi sekitar 7 jutaan kg, ini penurunannya sangat signifikan. Salah satu penyebabnya adalah karena tidak adanya IPAL kawasan yang terpadu. Memang dulu pernah dibangun oleh KLHK, kira-kira di tahun 2012. Akan tetapi barangkali perlu dievaluasi kembali, sehingga nelayan-nelayan di sana tidak mengalami lagi paceklik, perlu ada kolaborasi, perlu ada sinergitas antar lembaga.

Yang kedua, kaitannya dengan Muncar, kalau di berbagai tempat di daerah-daerah lain mendapatkan rusus (rumah khusus), sementara di sana tidak mendapatkan. Apa bedanya Muncar dengan tempat lain? Sementara memberikan tambahan penghasilan devisa ataupun apa namanya, penerimaan-penerimaan negara bukan pajak dari tempat-tempat tersebut. Ada 100 pabrikan di sana, Pak.

Ini tiga atau dua poin penting yang saya sampaikan, Pak Ketua, singkat satu menit.

Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh,

KETUA RAPAT:

Makasih, Pak.

Berikutnya, Pak, oh ya yang hadir fisik sudah selesai, masih ada yang ingin bertanya? Eh Pak siapa, Pak Jhonni Allen, silakan.

F- PD (drh. JHONNI ALLEN MARBUN, M.M.):

Saya langsung *aja* ya, untuk Ibu Dirjen Cipta Karya, ini SPAM ... apa, Kabupaten Humbang Hasundutan, ini kan dibangun tahun 2015-2016. Tapi kan sekarang kan pertumbuhan permintaan kan tinggi, sehingga perlu optimalisasi khususnya masalah pipanisasi dari hulu sampai ke hilir atau apa namanya, apa namanya, nanti saya, apa, tolong nanti untuk 2023. Nanti usulan daripada Pak Bupatinya, saya kasih, itu yang pertama.

Yang kedua adalah apa itu tadi ya apa, SPAM Pulung ya, ini hanya mengingatkan kemarin apa untuk pendidikan, ya, yaitu di Kabupaten Humbang Hasundutan, Samosir, Tobasa.

Yang terakhir adalah sarana prasarana olahraga di Kabupaten, Kecamatan Habinsaran, Kabupaten Toba ini kawasan KSPN daripada Danau Toba, nanti saya serahkan. Itu *aja*, Pimpinan, terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

F- PG (MUHAMMAD FAUZI, S.E):

Pimpinan, Pimpinan, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Silakan, Pak Fauzi, silakan.

F- PG (MUHAMMAD FAUZI, S.E):

Iya.

Assalamua'laikum warahmatullah wabarakatuh,

Langsung saja, ada beberapa hal yang ingin saya minta penjelasan untuk Ibu Dirjen, Pak Dirjen. Yang pertama, di Dirjen Ibu, penyerapannya *Alhamdulillah* sudah mencapai 50% dan kalau bicara dapil sebenarnya di dua Dirjen ini *Alhamdulillah* cukup baiklah koordinasinya *gitu*, sehingga perlu diperbaiki ,apa, walaupun ada hal-hal yang disampaikan, sifatnya perbaikan saja *gitu*, Bu, ya, di Dirjen Ibu kalau tidak salah, dananya 2,11 triliun, Bu, ya. *Nah*, khusus untuk Padat Karya per 30 Agustus ini yang sangat memprihatinkan ini Bu capaiannya baru di angka 17,28%. *Nah*, saya ingin tahu, Bu, apa penyebabnya Padat Karya ini penyerapannya masih sangat rendah, Bu?

Kemudian apa langkah-langkah strategi yang diambil oleh Ibu dalam rangka penyerapan dengan sisa waktu yang tersisa? Misalkan contoh, Bu, ya sementara penyerapan rendah tetapi ada beberapa hal program yang di khususnya di dapil saya ini tertunda, Bu. Misalkan kemarin saya sampaikan juga di Pak Menteri, ada di daerah Enrekang, itu ada drainase yang saya sudah apa, saya juga sudah sampaikan ke masyarakat di sana, tapi ternyata ada pemotongan yang luar biasa, terutama panjangnya, Bu, ya, yang seharusnya 900 meter menjadi 100 meter, kemudian dari 1,2 km menjadi 400 meter. *Nah*, ini alasannya kalau alasannya saya tanya, Bu, setelah saya berkoordinasi, alasannya katanya PPK-nya ganti. *Nah*, apakah setiap PPK ganti ini ada perubahan anggaran, ada perubahan alokasi anggaran? Itu yang saya ingin tahu, Bu. Atau ada alasan-alasan yang lain. Begitu juga Padat Karya di Kabupaten Luwuk Utara juga begitu, sampai sekarang juga belum berjalan, Bu. Itu yang pertama.

Yang kedua, saya ingin menyambung apa yang disampaikan oleh beberapa teman-teman, apa, MCK Pesantren, Bu. Terus terang saja, kami ini di anggota dewan dari Provinsi Sulawesi Selatan ada 5 orang, Bu, ada 5 orang. Kita itu sekarang kesulitan, Bu, meletakkan anggaran itu di pesantren yang memenuhi syarat, karena semuanya sudah hampir semuanya sudah terpenuhi. *Nah*, makanya saya pikir apa yang disampaikan oleh beberapa teman-teman tadi, itu menjadi ruang di mana kompromisnya seperti yang kita harapkan, *gitu* Bu, sehingga anggarannya *enggak* keluar ke dari Provinsi Sulawesi Selatan, Bu. Misalkan pesantren, walaupun mau tetap harus ada 50, pesantren itu kan biasanya laki-laki dan perempuan itu MCK-nya beda, Bu, itu paling tidak bisa dua lah Bu, jangan satu, *gitu*. Atau kalau boleh saya usul, bagaimana juga ini bisa meng-*cover* rumah-rumah ibadah di luar Islam, misalkan *gitu*. Saya pernah mengusulkan, tapi tidak bisa katanya, misalkan pasaman untuk orang Bali atau

sekolah apa, tempat-tempat sekolah mingguan *gitu*, Bu, ya. Kalau memang itu bisa meng-cover itu, saya pikir kita *enggak* kesulitan mencari tempat mencari titik, *gitu*, Bu. Terus-terang saja di Sulsel itu kita kesulitan cari tempat, karena lima orang anggota DPR RI-nya di, dari Sulawesi Selatan. Kemudian di tempat kami juga, Bu, ada sekolah hilang, Bu, ya, pasca banjir dua tahun yang lalu di Luwu utara, sebentar, mungkin nanti saya akan kasih, bukan hari ini, Bu, ya, nanti. Itu untuk Ibu Dirjen.

Kemudian untuk Pak Dirjen, apa, ini hantap ini sudah di Luwu Utara, Pak, sudah berjalan sudah selesai, Pak, ya pasca banjirnya, Pak. Cuma PSU-nya ini juga perlu diperhatikan, Pak, sampai saat ini PSU-nya tidak ada.

Nah, kemudian untuk rusunawa ini sekarang sedang berproses di Luwu Utara, Pak. Cuma ini untuk ASN, saya ingin menanyakan, saya dengar-dengar katanya terakhir disewakan. *Nah*, disewakan itu bagaimana sistem sewanya dan uangnya itu kemana? Walaupun sewanya katanya tidak besar kan *gitu*, tapi saya ingin tahu saja informasinya. Kemudian mengenai bank, saya usulkan kalau bisa bukan, kalau tidak salah, provinsi yang menentukan, Pak, ya, kalau boleh, kalau kabupaten mungkin lebih bagus, Pak. Karena tadi dari dua pembicara itu, 1 bank daerah, 1 bank nasional. Menurut saya, kalau saya, yang penting tidak mempersulit ya, atau lebih mempermudah temen-temen kerja di lapangan, terutama pendamping. Di tempat saya, justru Bank BNI, apa, bukan mempersulit, tenaga tenaga pekerjanya itu sangat terbatas, karena di sana belum jadi cabang. Jadi yang verifikasi ke lapangan dia, terus yang apa, di kantor dia juga ya verifikasi administrasinya, jadi lambat sekali uang itu turun, Pak. Sementara sudah ada tagihan yang didorong oleh temen-temen dari apa, yang punya toko, *gitu*. Jadi kalau menurut saya, kalau bicara bank ya ini lah, disesuaikan dengan kondisi daerah *gitu*, dan kehati-hatiannya juga sangat, apa, diperlukan.

Selanjutnya saya juga ingin mengetahui, Pak, mengenai masalah kontrak pendamping ini, Pak. Apakah, saya belum dapat informasi kira-kira, kita kan sudah mensepakati dalam rapat, ada perpanjangan. *Nah*, ini saya ingin mengetahui perpanjangannya berapa bulan? Karena juga saya sudah sampaikan itu juga ke teman-teman pendamping.

Saya pikir itu, Pak, *makasih*.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

KETUA RAPAT:

Terima kasih, Pak Fauzi.

Pak Harvey.

F- PDIP (HARVEY B. MALAIHOLLO):

Terima kasih, Pimpinan.

Langsung saja ke Ibu Dirjen Cipta Kerja, Ibu Diana eh *sorry*, Cipta Karya. Saya apresiasi, Ibu sudah mendengar atau ada di dalam pemaparan Ibu, bahwa Ibu akan merehabilitasi atau merenovasi Pasar Sanggeng, lalu juga Pasar Thumbuni di Kabupaten Fakfak. Dan hanya ada permohonan satu dari dari dapil saya, untuk peningkatan kualitas pemukiman kumuh Klasabi di Kota Sorong, Ibu. Terima kasih juga untuk SPAM di Kabupaten Kaimana, saya perlu perhatian khusus untuk Kampung Kooy khususnya, Ibu, yang sudah dikenal dengan kampung, apa, desa, kampung air merah, karena memang airnya itu tidak bisa dipergunakan sama sekali.

Lalu untuk Dirjen Perumahan, kemarin saya menerima saudara-saudara dari Papua Barat yang berkunjung dan membawa aspirasinya, khususnya saya berbicara dengan mereka yang masuk kategori miskin ekstrem, mereka membutuhkan rumah, tetapi apa yang terjadi di realitanya adalah mereka tidak bisa mendapatkan itu, karena jukninya. Jadi artinya, kalau *enggak* salah ada persyaratan yang mengatakan bahwa mereka itu tidak bisa menerima itu kalau tidak ada infrastruktur ke desanya, lalu tidak ada, belum ada aliran listrik ataupun penyediaan air bersih. *Nah*, menurut saya, mungkin saya berharap ada fleksibilitas lah di dalam, di dalam juknis tersebut, sehingga mereka boleh memperoleh itu juga, apa namanya, perumahan yang mereka butuhkan. Karena mereka berada di daerah-daerah yang pegunungan, di dalam pegunungan, *gitu*. Artinya untuk mencapai sekolah terdekat atau apa namanya, puskesmas terdekat saja, itu sekitar 27 kilo, begitu.

Lalu saya sependapat juga dengan Pak Wandik, tadi masalah anggaran, karena memang kebutuhan anggaran kami di Papua, khususnya Papua dan Papua Barat itu lebih besar daripada daripada dapil-dapil yang lain mungkin.

Itu saja dari saya, Ibu dan Bapak, terima kasih banyak.

KETUA RAPAT:

Silakan, Pak Ketua, ada interupsi dari Pak Ketua, silakan.

F- PDIP (LASARUS, S.Sos., M.Si.) – KETUA KOMISI V DPR RI:

Baik. Bu Dirjen, tadi saya menindaklanjuti, maka saya interupsi di Pak Fauzi tadi. Ini kalau untuk sanitasi berbasis masyarakat ini kan, kita *udah* sepakati tempo hari bahwa dari pesantren itu kita ganti nomenklaturnya menjadi lembaga pendidikan keagamaan. Maka dengan demikian, ini kan boleh, Bu, yang bukan agama Islam, boleh kan, *gitu*, semua agama boleh. Ya *masuk* di Indonesia ini ada yang boleh ada yang *enggak*, ini kalau, ini kalau tidak saya luruskan, tersebar keluar, bahaya ini, Bu, iya, bisa ramai jagat raya ini. Ini saya perlu luruskan dulu, ini boleh, *gitu loh*, ya, Bu, ya? Makanya nomenklatur yang terdahulu itu saya juga bingung, *kenapa* dibuat begitu, yang akhirnya banyak menimbulkan pertanyaan. Ya saya rasa di PU *ndak* adalah yang radikal di situ.

Terima kasih, Bu.

F- PG (H. TUBAGUS HAERUL JAMAN, S.E):

Izin, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, Pak Ketua.

Tunggu dulu tunggu dulu, ada interupsi dari Pak Tamliha, silakan.

F- PPP (H. SYAIFULLAH TAMLIHA, S.PI., M.S) - WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:

Saya bicara sama Ibu untuk, tidak hanya lembaga pendidikan, tapi rumah ibadah, terserah rumah ibadah apa *gitu*, apakah Islam, Hindu, Budha, Kristen, Katolik, dan seterusnya, supaya apa namanya, umat itu menjadi lebih baik.

Makasih, Bu,

KETUA RAPAT:

Pak Tubagus, silakan.

F- PG (H. TUBAGUS HAERUL JAMAN, S.E):

Terima kasih, Pimpinan.

Langsung *aja*, Ibu Dirjen, Ibu Dian, saya melihat dari apa yang disampaikan pemaparan Ibu, terkait usulan yang kami usulkan belum ada di sana, yaitu yang pertama terkait TPSA Cilowong yang di kota Serang. Ini sangat dibutuhkan untuk kota Serang, karena TPSA ini, ini pembuangan sampahnya dari kota Serang, dari Kabupaten Serang, dari Kota Tangerang Selatan, dan sekitar Provinsi Banten. *Nah*, ini mungkin mohon agar diprioritaskan. Karena dari, selama duduk di sini, setiap tahun kami usulkan, ini belum masuk saja, *gitu*. Mudah-mudahan di 2023 ini bisa realisasikan.

Kemudian ada usulan keduanya, pembangunan SPAM, SPAM IKK Walantaka untuk Kota Serang. Kemudian pembangunan GDM SPAM regional Sindangheula yaitu untuk Kota Serang, ini untuk Kecamatan Cipocok dan Taktakan.

Kemudian terkait Padat Karya, Ibu, apa yang menjadi Program Padat Karya dari Cipta Karya manfaatnya cukup besar untuk dapil kami. Namun di tahun ini ada Program Kotaku, SK-nya sampai saat ini belum ada untuk dapil kami. Jadi belum ada realisasinya untuk Kotaku. Ibu sampaikan, ini akan diusahakan untuk bisa direalisasikan untuk tahun 2022 ini, tahun ini, mudah-mudahan ini bisa juga dapat terealisasi.

Kemudian untuk Pak Dirjen Perumahan, Pak Iwan. Mungkin saya melihat terkait BPS juga cukup, sangat dibutuhkan oleh teman-teman juga dan untuk warga masyarakat di dapil kami. Kami melihat di tahun anggaran 2022 dan 2023, ini 2023 ini cukup sedikit sekali, *gitu kan*. Kami berharap ini bisa dapat ditambah diperbanyak lagi untuk anggaran 2023.

Kemudian terkait rusun pesantren juga, tentunya kami sangat membutuhkan, karena di Banten cukup banyak pesantrennya dan mudah-mudahan ini alokasi kuotanya juga bisa dapat bertambah.

Itu saja mungkin, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, Pak Tubagus.

Pak Hamka B. Kady.

F- PG (Drs. HAMKA BACO KADY, MS):

*Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

**Pimpinan dan seluruh anggota yang saya hormati,
Ibu Dirjen Cipta Karya, Pak Dirjen Perumahan, dan seluruh jajaran yang
hadir pada hari ini yang saya hormati dan saya banggakan,**

Pertama, hari ini kita duduk melaksanakan hak konstitusi kita masing-masing. Saya mengawali pembicaraan saya, bahwa hari ini kita membahas anggaran yang intinya adalah bagaimana menyesuaikan usulan pemerintah dengan aspirasi yang muncul dari masyarakat. Sesuai bunyi Pasal 72 huruf g Undang-Undang Nomor 17 tentang MD3, bahwa DPR bertugas menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Jadi bukan hanya sekedar menerima saran, tapi harus menindaklanjuti, itu dasarnya kita bicara pada hari ini. Apa yang harus ditindaklanjuti? Adalah tentu apa yang disampaikan oleh kawan-kawan, itu yang harus ditindaklanjuti, ini yang saya garis bawahi dulu, supaya pemahaman kita sama-sama, Pak Dirjen, Ibu Dirjen. Saya nanti pada kesimpulan untuk menolak anggaran ini sementara. *Kenapa* saya katakan demikian? Karena belum ada yang muncul, aspirasi yang diserahkan pada waktu Rapat Kerja dengan Menteri PUPR. Walaupun sudah ada penjelasan, akan disesuaikan, tetapi angka yang dipaparkan di sini adalah angka yang belum disesuaikan, maka sulit untuk kami menerima angka-angka itu sementara. Itu yang pertama.

Yang kedua, boleh saya pastikan dan bisa saya lihat dalam pemaparan Bapak bahwa tambahan anggaran yang kurang lebih 25 triliun ke atas, itu pada umumnya dan hampir pasti semuanya untuk IKN, ini perlu kita kaji lebih jauh lagi. Oleh karena itu Pak Dirjen, Ibu Dirjen, mohon maaf, barangkali karena adanya permintaan atau usulan dari kawan-kawan yang masih akan

disesuaikan oleh Bapak Menteri dan sudah mendukung kegiatan itu, maka hari ini barangkali angka-angka ini kami belum bisa putuskan sebelum tampil berapa penyesuaian daripada apa yang diusulkan tadi.

Ini penting, karena kami juga akan kembali ke daerah dan semua ini dalam Youtube dan didengar oleh semua orang, kalau tidak nampak apa yang ada di sini, padahal angka-angka yang ada di situ misalnya BSPS 103.000 unit, itu semua orang tahu. Tetapi ada lagi kendala, Pak Dirjen, di penjelasan Bapak di situ, bantuan swadaya 2,72 triliun, itu 20% berdasarkan Inpres Nomor 4 Tahun 2022 diarahkan kepada penanganan kemiskinan ekstrem. Pertanyaan saya, 20% dari 103 itu termasuk kah itu, atau alokasi untuk anggota? Ini yang membingungkan saya, Pak. Bayangkan, kalau misalnya dialokasikan 20% daripada 103, berarti alokasi untuk aspirasi anggota itu, itu turun dari 103 lagi, ada ada angkanya di sini, Pak Dirjen, mohon saya diberi pencerahan, berdasarkan Inpres nomor 4. Padahal anggaran BPS itu hanya 103.000 unit, masih kecil, berarti 20% untuk dipaparkan di sini, 20% dari 103 unit berarti turun lagi, sisa 80.000 unit untuk alokasi aspirasi, kalau pemahaman saya itu.

Nah, oleh karena itu saya rasa-rasanya belum *firm* menerima angka-angka seperti, ini Bapak dan Ibu sekalian. Saya minta Pimpinan untuk di-*hold* sementara angka ini, kita tidak putuskan. Saya *me-refer* kepada pasal 27 huruf g. Saya mau tahu dulu apa angkanya untuk aspirasi masyarakat yang kami sudah usulkan?

Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu sekalian, belum lagi hal-hal yang dihilangkan, misalnya, KOTAKU belum nampak di sini, *enggak* ada, apa memang dihilangkan programnya, Bu Dirjen? Ini banyak hal. Kalau saya telusuri satu per satu, masih banyak yang tidak masuk.

Jadi, Pimpinan, mohon maaf dengan segala hormat tanpa mengurangi rasa hormat saya, kehadiran Ibu Dirjen, Bapak Dirjen, tapi saya sementara menolak anggaran ini sementara untuk ditetapkan. Tapi namun demikian, tanggal 9 September, batas waktu Badan Anggaran menerima anggaran dari Komisi V untuk disinkronisasikan, ini juga punya batas waktu. Kami belum bisa menerima ini, kalau *toh* nanti Rapat Kerja Menteri PUPR itu belum bisa kita bahas detailnya. Harusnya detailnya dulu baru rapat kerja. *Nah*, oleh karena itu, Pimpinan, saya tidak banyak mengomentari dulu, terlalu banyak masalah yang saya hadapi, yang kita hadapi, terhadap pemaparan ini. Banyak persoalan yang belum terakomodir, Bapak dan Ibu sekalian.

Sekali lagi saya ingin menyatakan bahwa kami tidak bisa menerima angka-angka ini dulu dan tidak ada keputusan. Mohon, Pimpinan, untuk tidak kita mengambil keputusan pada hari ini terhadap angka-angka anggaran yang diusulkan oleh kedua dirjen.

Terima kasih, mohon maaf.

Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh,

KETUA RAPAT:

Terima kasih, Pak Hamka.

Pak Hamka ini tidak marah-marah itu, Pak, sudah begitu gayanya bicara dia, Pak Hamka. Pak yang ada di virtual, Pak Syarief Alkadrie, Pak Syarief, masih ada? Satu kali lagi saya panggil, masih ada, Pak Syarief? Tidak ada. Baik, mohon maaf atas Pak Syarief. Berikutnya di meja Pimpinan, Pak, siapa? Pak Tamliha dulu, silakan Pak Tamliha.

F-PPP (H. SYAIFULLAH TAMLIHA, S.PI., M.S) – WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

**Terima kasih Pimpinan dan Anggota Komisi V yang saya hormati,
Bu Dirjen,**

Ini ada aspirasi saat kunjungan kerja Komisi V ke kota Banjarbaru dan kunjungan kerja reses ke Provinsi Kalimantan Selatan. Saya karena ini Dapil saya, saya berkewajiban untuk mengingatkan lagi Bu Dirjen.

1. penanganan rumah kumuh di Kecamatan Cempaka, kemudian
2. pembangunan kembali SMP 3 akibat kebakaran, sekitar 2,5 miliar. Kemarin sudah diverifikasi oleh staf Ibu, ya kalau bisa, Bu, kalau cuma 2,5 miliar dibangun akhir tahun ini lah, supaya tidak mengganggu pendidikan di SMP tersebut,
3. jaringan perpipaan air minum Kompleks Auri Kecamatan Landasan Ulin Banjarbaru,
4. penataan kawasan menuju Geosep Kampung Geopark Meratus Kecamatan Cempaka,
5. penataan trotoar sepanjang Kabupaten Banjar yang berbatasan dengan ibukota Banjarmasin. Jadi begitu keluar dari Banjarmasin, itu berbeda sekali penataan trotoarnya di Kabupaten Banjar,
6. sarana prasarana olahraga terpadu Kabupaten Balangan, Kabupaten Balangan itu kabupaten pemekaran dari Husung Utara dan paling banyak memberikan kontribusi bagi PNBPN Batubara, PT Adaro itu berada di Balangan dan masalah lahan sudah siap, kemudian
7. lanjutan revitalisasi kawasan religi Sekumpul tahap 2 dan 3. Ini saya mengucapkan terima kasih pada Bu Dirjen, apa yang dikunjungi oleh Komisi V kemarin, *Insyallah* Kepala Balainya sudah berjanji dan menyampaikan kepada saya bahwa semua yang tidak sesuai spek itu diganti semua. Terima kasih atas koreksi Ibu terhadap proyek tersebut. Dan kita harapkan Ibu bisa mengikuti pertemuan dengan pemerintah daerah dan masyarakat setempat, untuk tahap 2 dan tahap 3. Yang saya lihat ini dalam paparan Ibu sudah tidak muncul, kemudian
8. penataan kawasan Candi Agung Amuntai Lesung Utara, untuk sementara, dan terakhir,

9. pembangunan rumah khusus di desa Murung Kenanga Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar. Nanti pada saatnya saya serahkan secara tertulis.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

KETUA RAPAT:

Walaikumsalam,

Terima kasih, Pak Tamliha.

Pak Andi Aras, silakan, *sorry*, Pak, *sorry*, Pak, Pak Andi Iwan.

F- P. GERINDRA (H. ANDI IWAN DARMAWAN ARAS, S.E., M.Si) – WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:

Pak Andi Iwan, Pak, dua kambing, Pak, waktu aqiqah.

Terima kasih, Ketua.

Yang terhormat Ibu Dirjen, Pak Dirjen beserta jajarannya,

Saya, untuk usulan-usulan mungkin akan tertulis, walaupun kemudian dari bahan yang Ibu kasih juga masih ada beberapa yang belum terserap di dalam ya, hanya saya mau men-*stressing* satu hal, Bu. Bahwa kami di Komisi V ini banyak melakukan kunjungan-kunjungan kerja, baik itu kunjungan kerja reses maupun kunjungan kerja spesifik. Yang mana kemudian dalam kunjungan kerja tersebut kami didampingi oleh mitra kerja, termasuk direktorat jenderal Bapak-Ibu sekalian, beserta pemerintah provinsi ataupun pemerintah kabupaten/kota. Dan tugas kami di sana adalah salah satunya menyerap aspirasi dari tentunya pemerintah kabupaten/kota ataupun provinsi.

Hal yang ingin kami sampaikan, bahwa selama ini sepertinya apa yang menjadi kesimpulan atau menjadi catatan pada saat kita melakukan kunjungan kerja tersebut tidak mendapatkan prioritas yang maksimal dari mitra kerja. Kita *pengen* bahwa kami datang ke suatu wilayah, satu daerah, memberikan solusi atau bisa memberikan gambaran kepada pemerintah daerah itu, apa yang menjadi aspirasi mereka dapat terlaksana dengan baik. Yang persoalan, kalau sama sekali tidak dibicarakan barang itu. Kami kecenderungannya akan sepertinya hanya memberi harapan palsu kepada mereka-mereka, hanya mematikan kewajiban kami dalam konteks melaksanakan kunjungan kerja.

Kami berharap apa yang menjadi masukan-masukan tersebut, yang kami tentunya didampingi oleh mitra kerja, ya. Makanya pada saat kami kunker kami selalu meminta, Bu, minimal untuk kunker spesifik itu ada Eselon II atau kunjungan kerja reses itu ada Eselon I-nya, agar supaya apa yang menjadi

pembicaraan itu bisa langsung sampai dan dilaporkan kepada Ibu-Bapak Dirjen, *gitu loh. Nah*, ini kalau *cuman* menghadirkan Kepala Balainya *aja*, mereka juga proses usulan kan ke Ibu juga, saya tidak tahu itu apakah kemudian rekomendasi dari kami atau bukan. *Nah*, kami contohkan, Bu, untuk kunjungan kerja di Ternate kemarin, ada beberapa usulan-usulan yang nanti akan saya, kalau *ndak* salah sudah masuk ke Ibu juga, itu untuk di Dirjen Cipta Karya.

Kemudian sekaligus saya ingin juga ingin mempertanyakan menyangkut kepastian pelaksanaan SPAM Maminasata. Karena kemarin dari PDAM Kota Makassar mempertanyakan hal tersebut, apakah SPAM Maminasata ini akan dilaksanakan atau *enggak* fisiknya. Karena ada selentingan bahwa itu dibatalkan atau tidak jadi dilaksanakan.

Kemudian untuk Pak Dirjen Perumahan, menyangkut masalah penyesuaian harga, penyesuaian harga untuk rumah subsidi ini juga Pak, mungkin ya, itu kita butuh segera ada keputusan, agar supaya di bawah bisa menyesuaikan, melaksanakan pekerjaan tersebut.

Dan tentunya yang kedua adalah menyangkut masalah rusus (rumah khusus), Pak, kami udah hampir 4 tahun kalau *enggak* salah, mengusulkan rusus di satu kabupaten, Kabupaten Wajo, Pak Iwan. Itu rumah khusus nelayan. Saya *enggak* tahu apakah *enggak* masuk prioritas Bapak atau *gimana*, tapi sepengetahuan saya kan rusus ini harusnya ada komunitas-komunitas tertentu dan lahan itu *udah* tersedia, Pak. Nanti kami akan sampaikan kembali usulan ini, karena saya khawatir usulan sebelumnya itu sudah, sudah tidak ada lagi, sudah tidak dibicarakan dan kemudian tentunya akan kami sampaikan kembali kepada Bapak, pada hari ini.

Mungkin itu *aja*, Pimpinan, terima kasih.

Assalamu'alaikum warah matullahi wabarakatuh,

KETUA RAPAT:

Makasih, Pak Andi Iwan.

Pak Roberth lagi menuju kemari, biar saya dulu yang *ngisi*. Oh sudah ada? Oh, silakan, silakan, saya kira, saya kira, saya sudah lihat Pak Roberth, *sorry*, saya kira belum datang, silakan Pak Roberth.

F- P. NASEDM (ROBERTH ROUW) – WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:

Biar ambil nafas dulu.

KETUA RAPAT:

Tapi cocok lah, Bapak kan memang pejalan kaki dari jauh, dari Papua juga berjalan kaki, silakan, Pak.

F- P. NASDEM (Drs. FADHOLI):

Mungkin interupsi sebentar, Pak Roberth biar bernafas dulu.

KETUA RAPAT:

Silakan, silakan, Pak.

F- P. NASDEM (Drs. FADHOLI):

Saya hanya sekedar mengingatkan apa yang pernah disampaikan oleh Pak Rachmat Gobel pada saat di sini. Beliau ada satu usulan, untuk bisa memberikan MCK di tempat umum, itu cantolannya bagaimana? Karena di daerah tempat Pak Mus seperti Padusan ya, tempat untuk mandi banyak *bareng-bareng* dan lain sebagainya, itu kan perlu ada fasilitas MCK yang kemudian bisa dikelola secara *bareng-bareng*. Nah, itu kalau tadi Pak Ketua sudah menyampaikan ini kaitannya dengan pendidikan, itu bagaimana kalau kita akan mengusulkan sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Pak Rachmat Gobel waktu rapat bersama-sama di sini, itu kira-kira cantolannya bagaimana?

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, Pak.

Silakan, Pak Roberth.

F- P. NASEDM (ROBERTH ROUW) – WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:

Terima kasih, Pimpinan.

Saya ke Cipta Karya.

Bu Dirjen,

Terkait dengan program-program kita, Bu Dirjen, ya. Saya ingin supaya sebagai mitra kita, Bu, bagaimana kita juga teman-teman yang ada di BPPW Dirjen Cipta Karya, agar bisa bekerja sama dengan kita dengan baik, Bu. Karena ada program-program kita yang menjadi aspirasi kita, Bu, ini bahasanya tidak enak, ya. Bahasanya itu bahwa ini adalah DAK kementerian, jadi seenak-enaknya mereka bisa pindah-pindahkan, ya. Jadi seperti tidak ada urusan lah sama kami, ya, tolong Ibu sampaikan ini baik-baik kepada mitra. Bahwa yang namanya aspirasi ini kan kita tunjuk, programnya Ibu ya, tetapi aspirasi diberikan ke kita, untuk kita tunjuk di tempatnya penyelenggara itu di mana, itu hak prerogatif kita. Benar tidak, Bu, saya boleh tanya itu? Benar ya?

Coba Kepala Balai-balai *tuh* didengar itu, terutama di tempat saya di Papua itu, sampai dengan jajaran yang di bawah itu, kasih tahu itu, Bu, ya.

Kami punya, ya kan, staf, itu ada di daerah, ya, yang mengurus itu semua. Dan itu tidak terpisahkan dengan kami *gitu*, ya, dan mereka pun tidak sewenang-wenang tanpa sepengetahuan dari kami. Dan kami lakukan itu berdasarkan apa kesepakatan kita dan surat usulan dari kami. Saya punya surat usulan dengan nomor semua lengkap, tetapi tiba-tiba bisa mau dipindah-pindahkan, Bu, ya. Kami sudah sosialisasi dengan kepala kampung, dengan masyarakat, ya kan. Ini *kayaknya* kami ini bukan mitra, Bu, ini yang saya kadang-kadang agak aneh melihat teman-teman di daerah dan itu tanggung jawab Ibu sebagai Pimpinan, Kepala Dirjen. Supaya tolong, mulai saat ini, Ibu sampaikan, supaya semua program yang namanya aspirasi kita, itu hak semua ada di tangan kita ya, kita yang tentukan di mana, ya. Tidak lagi, kalau sudah sepakat di mana sesuai dengan surat kita, ya, sudah setuju, tidak boleh lagi dipindah-pindahkan itu.

Jadi yang berikut, Bu, tadi Ibu sampaikan banyak SPAM di mana-mana, saya agak kecewa lihat itu. Ini SPAM di daerah saya, daerah saya, saya tanya sama Pak Ridwan juga, "Pak Ridwan, SPAM ada?" "*Enggak* ada", ini daerah kami butuh ini di daerah kami, iya pasti lah iya kan, daerah kami juga butuh yang namanya SPAM itu. Jadi tolong program-program ini harus ada juga di dalam, supaya kami yang duduk di sini sebagai mitra itu lihat, "Oh ya benar ada program SPAM, oh daerah kami pun ada", itu ya kan? TPA pun demikian, ya kan, tidak ada sama sekali tergambarkan TPA-nya daerah saya mana, ya kan. Ya ada perwakilan di Papua ada TPA-nya di sini, coba tunjukkan itu, ya kan.

Saya juga melihat ada beberapa program, ada di satu daerah, ada dua program sekali masuk di sana. Ini kan kelihatan bahwa ada daerah yang memang melakukan komunikasi, yang sudah melakukan komunikasi, ini dapat sekali dua program dari tempat, Ibu ya kan? Berarti ada komunikasi, ya kan? *Nah*, kalau tidak ada komunikasi, ya komunikasi lah dengan kita sebagai mitra untuk daerah kita, ya, supaya ada tergambarkan juga di situ.

Saya ingin tanya, Bu, yang namanya rumah anak Asmat ini, rumah anak maksudnya untuk apa? Ya? Rumah baca ya untuk? Oke, jadi itu rumah untuk belajar *dong* berarti iya.

Yang berikut, Bu, pasar, pasar juga saya pernah usulkan pasar itu, kalau *enggak* salah ya Bu ya, Keerom kalau *enggak* salah ya, *enggak* ada itu sampai sekarang. Tolong jadi perhatian, Bu, supaya betul-betul kita ini ya tidak hanya duduk bicara program Ibu, tetapi Ibu juga harus melihat bahwa kita punya kewajiban untuk menyalurkan aspirasi, memperjuangkan aspirasi kita sesuai amanat undang-undang. Bukan kita minta-minta, Bu, ingat, mitra, para mitra, bukan kita minta, tapi itu adalah hak konstitusi yang diberikan kepada kita, supaya betul-betul kita duduk sebagai anggota dewan itu dirasakan kehadiran kita dengan program-program yang diberikan ke daerah kami.

Ada satu yang belum selesai, Bu, masalah yang di Merauke, ya Ibu pasti punya catatan ya. Yang sudah kemarin yaitu pembangunan jaringan perpipaan SPAM distrik Tanah Miring oke, saya terima kasih, Bu, sudah jalan. Rehabilitasi renovasi, sarana, prasarana sekolah di daerah kami, terutama di Kabupaten Pegunungan Bintang Jayawijaya dan Puncak Jaya, itu saya sudah dapat informasi sudah jalan baik, ya. Yang belum mungkin, Bu, itu adalah pembangunan *water treatment plain*, yaitu instalasi pengolahan air untuk sarana *intake* sumber air baku dari Kali Maro ya dan jaringan transmisi pipa utama di Distrik Jagebob, Tanah Miring dan Semangga Kabupaten Merauke, tolong Bu ini yang belum, ini sudah, sudah saya sudah sampaikan sudah beberapa kali, dan harusnya sudah harus ada Bu, tapi saya lihat ini sampai sekarang ini belum ada berarti ini kita tunggu lagi nanti 2000 alasannya 2024 ya kalau 2024 kalau syukur-syukur kita bisa kembali.

Yang berikut, saya ke Dirjen Perumahan. Pak Iwan, saya dengan Kepala Balai, Pak Faisal, dan teman-teman di sana kemarin ada pergantian ya, ya saya terus-terang sebenarnya kecewa pergantian itu. Karena yang baru kan belum bisa, masih lama lagi adaptasinya untuk mengenal daerah kami, karena beliau bukan dari sana, beliau dari luar, masuk ya. Tetapi kemarin kami diskusi, oke, ya kan. Komunikasi, ini yang perlu. Apa yang saya sampaikan juga tadi, ini masih banyak juga ya, yang terutama di Daerah Tengah Pegunungan. Ini sampai kalau daerah Jayawijaya komunikasinya baik, terutama di Yahukimo, ini perhatian, Pak. Yahukimo itu dari teman-teman yang di sana, belum begitu baik. Karena saya sudah minta dinas dan langsung melalui Kepala, pimpinan daerahnya untuk bisa program saya ini betul-betul mendapat manfaat di masyarakat. Kalau Jayawijaya, saya punya data foto semua, itu Kadisnya PUPR di sana perumahannya itu, betul-betul bisa jalan dengan teman-teman dari Balai, dan itu sudah kami rasakan, masyarakat rasakan melihat itu. Yahukimo belum, Pak, masih ada tarik-menarik mereka, seakan-akan mereka yang harus menentukan di mana-mana. *Nah* ini yang perlu, mungkin Bapak juga harus sampaikan.

Yang berikut Pak, ini ada, ya saya harus sampaikan, Pak, tanda kutip bahwa ini ada yang kami sudah kontrak bahan bangunan di sini. *Loh kenapa kontrak? Harus ada persaingan, gitu, bukan langsung kontak mati, gitu.* Karena di sini 10 perak, di sini 7 perak *gitu, loh* ini ada 7 perak *loh kenapa kok kontraknya 10 perak gitu, ya kan.* Jadi langsung dipatok begitu, "*Enggak bisa, kami sudah kontrak*". "*Lah gimana sih, yang dapat manfaatnya siapa?*" Pengusaha apa dia, *gitu.* Kan kalau murah itu kontrak bahannya, maka yang manfaatnya pasti penerimanya *dong.* Ini saya bilang, "*Kenapa? Kita sudah kontrak, kok ini lebih murah, kenapa kamu kontrak lebih mahal begitu, kan ini sudah mitra kita*". Oh jadi kalau pakai mitra itu, senak-enaknya tentukan harga? *Nah, ini tolong di di menjadi perhatian, Pak, ya.* Jadi jangan terus di *cook, gitu,* bahwa ini sudah, *enggak boleh yang gitu, Pak, ya kan.*

Yang berikut, Pak, tolong keterlibatan masyarakat, ini dua-dua Bu Dirjen juga ya, supaya masyarakat itu terlibat *gitu, ya kan,* jangan semua diambil, ya kan. Masyarakat di sana, iya kan, ikut terlibat, konstituen kami khususnya yang ada di daerah itu, kami ingin supaya mereka juga terlibat, ya kan. Jangan

semua ditangani oleh Balai, ya kan. Dari luar datang, ya kan, “Kami sudah kontrakan dengan ini, mitra kami, ini,” masyarakat lokasi itu yang perlu ya kan.

Pak Dirjen Perumahan, saya sepakat, Pak Dirjen harus ada diskresi khusus di kita ya. Kemarin soal rumah, kami bangun Kampung Baru, ya, itu ya walaupun kami kecil, Pak, lebih banyak daerah akhirnya, teman-teman di DPR provinsi yang lebih banyak dari kami. Kami *cuman* 23 koma sekian juta, mereka lebihnya, satu rumah itu bisa hampir 60 juta, rumah jadi. Yang menjadi miris saya, bahwa yang menerima, itu menyampaikan bahwa sudah menjadi ASN sekian puluh tahun, pelayan masyarakat di bidang kesehatan, belum punya rumah, belum punya rumah. Kami bangun itu kemarin, itu masyarakat asli orang Papua yang di situ, dapat rumah, nangis-nangis, karena rumah yang kami berikan ini. Jadi kami bukan renovasi, tapi kami kasih rumah, 51 rumah, kampung baru kami bangun.

Jadi catatan kami, Pak Dirjen Perumahan, sekarang ini, kemarin Pak Menteri sudah sampaikan bahwa harga naik semuanya. Jangan besok dan ini semua sama, harus ada, Pertamina di sini naik 1 perak, kami di Papua 10 jadinya, kami paling, dampaknya paling besar ke kami naiknya ya, tapi tidak pernah ada yang demo di Papua. Besok Pemerintah naik BBM, pasti demo di Jakarta. Kalau di Papua tidak. Ya ini yang perlu jadi perhatian, Pak. Agar betul-betul besok itu ada keadilan, jangan pemerataan saja, tapi keadilan, supaya ada revisi anggaran juga tentang BPS khusus untuk kami di Papua ya, ada penyesuaian harga. Ini menjadi, Pimpinan, saya minta supaya kita juga, di sini teman-teman, ya tolong lihatkan kami, kami dari Papua ini, supaya kami dapat diskresi untuk penyesuaian harga ini, kami harus segera.

Saya kira itu yang ingin kami sampaikan, Pimpinan, mohon maaf, Pimpinan, agak lama sedikit, tapi ini semua kami harus sampaikan, karena aspirasi ini yang masyarakat harapkan untuk kami bisa sampaikan.

Terima kasih, saya kembalikan ke Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, Pak Roberth.

Ada tambahan sedikit dari Pak Andi Iwan, silakan, Pak Andi Iwan.

F- P. GERINDRA (H. ANDI IWAN DARMAWAN ARAS, S.E., M.Si) – WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:

Iya terima kasih, Pimpinan.

Untuk ke Pak Dirjen Perumahan ya, Pak, Pak Iwan, menyangkut masalah alokasi unit BPS NAHP 2022 yang *national affordable housing program*. Nah, ini saya lihat sudah ada pengalokasian unit di 25 provinsi, tapi kemudian terdapat ketimpangan-ketimpangan, kalau menurut saya ya. Apakah jumlahnya ya, kalau diperbandingkan dengan alokasi di Sulawesi Selatan

hanya 240 unit, kemudian di Jawa Timur 8.654 unit. *Nah*, kira-kira coba tolong diberi gambaran, bagaimana itu tentang penetapan lokasi seperti apa dan bagaimana polanya? Karena ini sepengetahuan kami ini juga *loan* ya, dana pinjaman dari Bank Dunia, jadi tolong dijelaskan kepada anggota, karena jumlahnya cukup besar, Pak, ada 34.000 rumah, ya kan. *Nah*, 34.000 rumah ini bagaimana keterlibatan teman-teman di Komisi V ini juga menyangkut masalah hal itu.

Sekalian nanti dijawab, Pak, itu Pak Dirjen, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Pak Syarief, masih ada Pak Syarief, sudah ada? Satu kali lagi saya ajak, Pak Syarief masih ada? Ya mana orangnya? Ada tapi tidak orangnya. Sekali lagi, Pak Syarief, sudah ada belum? *Nah*, itu. Silakan, Pak, diharapkan 4 menit Pak, ya, lanjut, Pak, silakan, Pak. Silakan, Silakan, Pak, silakan. Pak Syarief, sinyal *enggak* bisa Pak, ya? Minta maaf, Pak Syarief, ini kita coba sebentar lagi, sekarang mungkin saya, Pak ya.

Yang pertama, saya ingin bertanya kepada, apa, menyampaikan informasi kepada Pak Iwan ya dari dirjen, Kita dulu Pak, sebentar Pak, ya, sudah terlanjur kita, Pak. Sudah ada suara Pak, sudah ada suara belum? Belum ada suaranya Pak, iya oke, oke, silakan, Pak.

F- P. NASDEM (H. SYARIEF ABDULLAH ALKADRIE, SH., MH):

Terima kasih. Kedengaran *enggak*, Pak?

KETUA RAPAT:

Kedengaran, sekarang silakan, Pak Syarief, silakan.

F- P. NASDEM (H. SYARIEF ABDULLAH ALKADRIE, SH., MH):

Iya, *makasih*.

Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh,
Selamat siang,

Yang pertama, berkaitan dengan kegiatan yang di keciptakaryaan, saya kira ada beberapa hal yang perlu saya tegaskan, yang berkaitan dengan ini, saya sudah berkali-kali saya sampaikan bahwa perlu juga, karena tadi apa yang disampaikan oleh Ibu Dirjen, masih tidak mengakomodir beberapa yang kita usulkan, nanti bilang, meminta jatah. Tetapi kaitan ini bukan berkaitan dengan jatah, tetapi berkaitan dengan memang kita itu dalam rangka untuk memprogramkan itu sesuai dengan MD3, yang berkali-kali kita sampaikan. Ini cobalah di dalam suatu mengakomodir program reguler itu, juga dilihat daripada usulan daripada anggota ya, supaya anda berkeadilan.

Nah, saya sudah beberapa kali umpamanya di keciptakaryaan, berkaitan dengan rehabilitasi terhadap makam Kesultanan Pontianak, tapi hari ini juga belum juga saya lihat muncul di situ. Kemudian berkaitan Kota Pusaka di Kabupaten Sambas, kemudian SPAM di Kubu Raya, SPAM di Landak, yang sudah dua tahun kita usulkan juga, belum juga muncul.

Jadi saya kira ini perlu juga, kita mau tahu, berapa sebenarnya program reguler itu yang masuk ke masing-masing dapil. *Nah*, saya lihat dari beberapa tahun penyusunan ini, program-program reguler ini padahal sesuai dengan ketentuan undang-undang, itu kita berhak, mempunyai hak untuk mengusulkan itu, memperhatikan itu. *Nah*, ini perlu sekali Dirjen Cipta Karya untuk memperhatikan itu. Kemudian mungkin ada beberapa yang lain-lain, kita usulkan, bukan hanya berkaitan dengan yang kita usulkan itu berkaitan dengan program yang berbasis kerakyatan, berbasis masyarakat.

Kemudian yang kedua, berkaitan dengan perumahan, saya kira tadi saya mendukung dengan teman-teman, memang ada kendala kaitan dengan menggunakan bank, coba gunakan sesuai dengan kebutuhan di daerah. Saya malah melihat malahan bank-bank daerah itu yang lebih cepat, karena karena memang di daerah itu bank-bank daerah itu sampai ke tingkat kecamatan. Bank-bank nasional itu kendalanya tidak merata sampai ke tingkat kecamatan. *Nah*, saya kira ini lah beberapa hal yang perlu saya sampaikan di dalam kesempatan ini, untuk menjadi perhatian.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh,

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Syarief, selamat makan, Pak Syarief.

F- P. NASDEM (H. SYARIEF ABDULLAH ALKADRIE, SH., MH):

Iya Pak. Lanjut lagi di Simpang Ampang ini, Pak, dari Hulu.

KETUA RAPAT:

Baik, nanti ditutup Pak Ketua ya, Pak Lasarus, saya dulu yang menyampaikan harapan. Yang pertama, dari Pak Iwan, Dirjen Perumahan, kita ada BSPS, Pak, BNBA-nya, hasil verifikasi. Hasil verifikasi itu ada 64 yang belum, Pak, ada 64, mungkin Pak Arsyad ya, sudah tahu itu, Pak Dirjen. Nah sekarang fisiknya sudah dikerjakan, tetapi menunggu SK dari Bapak, Pak, yang belum ada sampai sekarang, ya ada 64 di Sulawesi Tenggara, Pak. Hasil verifikasi yang diusul pertama, itu ada apa namanya, hasilnya bahwa mungkin tidak sesuai, sehingga dikirim kembali kepada yang lebih sesuai, Pak. Dan kita harapkan secepat mungkin, supaya bisa selesai yang ada di apa namanya di Sulawesi Tenggara, fisiknya sudah selesai, semua tinggal itu yang ditunggu, Pak.

Yang kedua, Pak Dirjen, itu besok itu ada peletakan batu pertama STAIN Hari Sabtu, Pak, jam 9 pagi ya, jam 9 pagi Hari Sabtu, saya berangkat mungkin besok malam, Pak, apa malam Sabtu, Pak, saya. Saya undang Pak Dirjen kalau ada waktunya, kalau tidak, mungkin barangkali bisa diwakilkan siapa yang mewakili Bapak yang ada di sana, jadi Hari Sabtu jam 9 pagi. Jadi kalau mau berangkat, boleh Hari Jumat, boleh juga Sabtu Subuh jam 3, Pak, jam 3 Subuh, pakai batik.

Kemudian yang berikutnya, Pak Dirjen, waktu ada Pak Menteri waktu hari saya mengusulkan agar juga diprogramkan pembangunan rusun ASN buat PUPR. Jadi rusun ASN buat para pegawai PUPR yang ada di Sulawesi Tenggara, Pak. Kalau misalnya ada itu ya, tentu jangan mengganggu aspirasi, Pak, kalau misalnya ada, jangan sampai dorong ke aspirasi, Pak. Itu *aja*, Pak Dirjen, barangkali.

Kemudian, Bu Dirjen, yang pertama saya ingin bertanya, Bu Dirjen. Kalau saya tidak ada program pembangunan gedung perkuliahan umum di Universitas Haluoleo Tahun 2022, kalau tidak salah, apa tetap jadi itu, Bu, atau digeser tahun 2023 atau mungkin sama sekali tidak jadi. Karena kita sering dipertanyakan oleh mahasiswa, Bu, dengan pak rektornya pun sering mempertanyakan saya, jadi atau tidak itu, mohon informasinya, Bu Dirjen.

Kemudian yang kedua, saya juga agak kaget-kaget membaca paparan Ibu ini persoalan pasar, rupanya banyak yang dapat pasar ini, ya saya juga tidak dapat, Bu. Sementara di daerah saya itu ada pasar yang habis kebakaran, Bu. Iya, namanya Pasar Wakuru, Pasar Wakuru, Kabupaten Muna, Pak. Itu kira-kira membutuhkan anggaran perkiraan 15-20 miliar, Bu. Kalau misalnya bisa karena kesulitan masyarakat yang ada di sana itu, Bu, daerah sangat sangat tidak mampu untuk membantu itu, menyelesaikan itu, pasarnya terbakar, Bu, di sana.

Kemudian yang juga begitu soal SPAM, Bu, SPAM. SPAM itu daerah kami itu banyak darah kering daerah sana, Bu, air sangat susah di sana, kadang-kadang mereka pikul. Bahkan kadang kala mereka itu membeli air dengan jerigen-jerigen itu, Bu. Jadi kalau misalnya, kalau adapun lokasinya itu saya kira ada dari Satker itu, pasti mereka sudah usulkan melalui Ibu, ya, sudah lengkap lengkap semuanya.

Bu Dirjen,

Hanya itu barangkali yang ingin saya sampaikan, dengan Pak Dirjen. Terima kasih perhatiannya.

Yang terakhir adalah Pak Ketua, silakan, Pak Ketua.

F- PDIP (LASARUS, S.Sos., M.Si.) – KETUA KOMISI V DPR RI:

Terima kasih.

**Yang saya hormati Pimpinan dan seluruh anggota Komisi V,
Bu Dirjen, Pak Dirjen Perumahan, beserta seluruh jajaran yang saya hormati, serta
Kepala Balai dari seluruh Indonesia, baik Balai Perumahan maupun Balai Cipta Karya,**

Yang pertama, saya ke mekanisme dulu, ya. Tadi ada usul Pak Hamka, bahwa kita tidak memasukkan angka di kesimpulan rapat, ya. Karena memang, tadi kita sempat melakukan pembicaraan ringan sebelum masuk ke ruangan ini ya, Pimpinan, tadi dengan Pak Dirjen dan Bu Dirjen. Hasil Raker kemarin ditindaklanjuti dengan penajaman di masing-masing direktorat jenderal. Dan hasil penajaman itu kan belum sempat dikonsultasikan untuk difinalisasi dengan Pak Menteri, itu kondisinya. Jadi Pak Hamka, ini sangat setuju saya, ya, kita *ndak* boleh memasukan angka dulu, untuk di kesimpulan rapat kali ini ya, karena nanti akan kita simpulkan di Raker terakhir saja. Setelah nanti masing-masing direktorat jenderal. Karena yang masih ada kemungkinan terjadi pergeseran adalah antara yang, bisa tambah kurang, *gitu* ya? Bina Marga, Cipta Karya, Sumber Daya dan Perumahan. Di luar dari ini kita boleh, Pak, simpulkan, ya. Untuk empat direktorat jenderal ini kita tidak usah masukkan dulu, nanti kita simpulkan angkanya di raker terakhir saja, itu, itu terkait mekanisme ya? Supaya nanti jangan lagi ini diperdebatkan, karena menyangkut nanti kesimpulan rapat. Kita setuju itu dan memang tidak boleh kita masukkan dulu, dari informasi yang tadi disampaikan, baik oleh Dirjen Perumahan maupun Dirjen Cipta Karya. Itu yang pertama.

Yang kedua, saya berharap Pak Dirjen Perumahan maupun di Dirjen Cipta Karya, kami tentu berharap apa yang sudah disampaikan di forum ini kemarin ya, untuk diupayakan, Pak. Untuk bisa di apa namanya, disusun secara baik di kementerian, sehingga nanti kita tidak perlu berat lagi di rapat berikutnya, di mana apa yang sudah teman-teman sampaikan, sudah mendapat tanggapan. Karena memang dari struktur saja, sebetulnya sudah sangat masuk, sangat, apa namanya, ya kita menanggapinya dengan secara elegan lah, kalau menurut saya, kan di struktur sudah dibangun oleh Kementerian PU kan ada 14 triliun yang digunakan untuk padat karya, *toh* teman-teman kemarin mengusulkan hanya 11,5, secara total. Jadi masih ada ruang ya dari kementerian untuk melakukan akselerasi atau penyesuaian-penyesuaian angka-angka di internal kementerian. Dan itu menurut kami, tidak membebani kementerian dalam rangka menyusun capaian, apa, dalam menyusun mengikuti renstra yang sudah ada *gitu loh*. Ya jadi tidak terlalu membebani. *Nah*, mudah-mudahan ini bisa ditangani secara baik, sehingga di terakhir nanti kesimpulan rapat kita bisa sepakati anggaran Kementerian PUPR di raker yang akan datang.

Yang ketiga, saya ke dapil, Bu, ya, baik kalau untuk BSPS ya kita paling, Pak Iwan, ya kita bicaranya tentang BSPS dan rusun kan, Pak, ya? Nanti rusun dan BPS kita akan usulkan sesuai *timeline* yang tadi disampaikan. Bahan yang tadi Pak Iwan sampaikan juga, nanti tolong dijawab supaya teman-teman di sini ya semua bisa mendengarkan penjelasan secara rinci.

Kemudian yang tadi saya sudah interupsi di awal, Pak, tolong cepat nanti sampaikan ke kami, data BPS terkait dengan kemiskinan yang ekstrem tadi. Sehingga bisa kita *match*-kan dengan program yang kita usulkan. Tentu kami berharap, kami juga bisa mengutamakan informasi yang disampaikan oleh BPS, yang mana di daerah kami yang dimasukkan kategori daerah kemiskinan ekstrem.

DIREKTUR JENDERAL CIPTA KARYA KEMENTERIAN PUPR RI (IR. DIANA KUSUMASTUTI, M.T.):

BKKBN, Pak, bukan BPS.

F- PDIP (LASARUS, S.Sos., M.Si.) – KETUA KOMISI V DPR RI:

Sorry-sorry, BPS, BKKBN ya? Baik, dari BKKBN, *sorry*, dari BKKBN ya, bukan dari BPS, baik saya ralat, dari BKKBN. Nanti data dari BKKBN cepat disampaikan kepada kami, sehingga kami bisa menyusun, menyesuaikan dengan itu, sehingga apa namanya, *match*-lah apa program yang kita usulkan dengan program juga yang ingin dituntaskan oleh kementerian.

Terakhir saya ke dapil, mungkin karena saya juga belum menyerahkan apa namanya, catatan-catatan kepada Ibu Dirjen, dan terutama Bu Dirjen Cipta Karya ya. Kalau Perumahan, nanti nyusul. Saya lihat untuk Perumahan, tidak jauh beda, Pak. Kemarin saya pas pulang juga *ketemu* dengan Kepala Balai dan saya tanyakan dengan Kepala Balai juga untuk perumahan, sepertinya kita bisa nyambung lah. Hanya memang yang Cipta Karya ini, saya juga bingung *nih*, Bu, saya mulai dari depan ini, air minum *enggak* ada, ya, di poin A, poin B pun tak ada, poin C pun *ndak* ada, ya. Kemudian di sanitasi pun *ndak* ada juga di tempat kita. Kemudian sistem pengelolaan persampahan pun, tidak ada juga di Kalbar ini ya, di sanitasi berbasis masyarakat pun, kita juga lihat ya, ini, ini nanti mungkin susulan seperti apa namanya, di lembaga pendidikan ya, tadi sudah saya luruskan, Bu, ya seluruh agama boleh, sekolah-sekolah yang atau lembaga-lembaga pendidikan keagamaan, apapun agamanya.

Kemudian saya juga mempertegas apa yang disampaikan oleh Pak Tamliha tadi, Bu, soal tempat ibadah. Jadi tempat ibadah juga harus semua tempat ibadah kita bisa intervensi. Jadi tidak ada diskriminasi dengan APBN ini, saya tegaskan itu sebagai Pimpinan Komisi, supaya nanti jangan sampai timbul di setiap program, *kok enggak* pernah ada muncul tempat ibadah, hanya satu tempat ibadah saja yang kita intervensi, kan itu maksudnya Pak Tamliha tadi ya. Dia juga kementerian menyesuaikan ini, jangan sampai nanti ada tanggapan negatif terhadap kementerian terkait dengan program ini, Bu, ya, kita semua bertanggung jawab akan hal itu.

Kemudian yang terakhir ya, nanti kita akan sampaikan, Bu, terutama air minum. Saya sudah sampaikan, kita ini kan harusnya sudah lewat, Pak, kalau program MDGs dulu, saya masih ingat ya di kabinet yang sebelum Pak Jokowi ada istilah kita MDGs, Pak. Jadi harusnya kita tahun sekian yang lalu untuk air

minum kita udah selesai, Bu. Tapi per hari ini itu yang saya sampaikan, di tempat saya itu ada ibukota kecamatan *ndak* ada jaringan air bersihnya, Pak, *enggak* ada dan tidak pernah dibangun, sampai hari ini. Ibukota kecamatan *loh*, Pak, saya bisa sebutkan, Kecamatan Ketungau Hilir ya, *ndak* ada jaringan air bersih. Binjai, tidak ada, itu ibukota kecamatan, Pak. Kemudian di Ketungau Tengah, Ketungau Tengah dan Ketungau Hulu pun setahu saya itu pun seadanya lah, ya, tidak, masyarakat tidak memanfaatkan itu, karena memang sangat tidak layak *gitu loh*, airnya.

Jadi saya juga tidak tahu, apakah karena Kepala Balainya yang kurang kerjaan, sehingga tidak mengusulkan itu, atau usulannya memang tidak mendapat respon yang baik dari direktorat jenderal *gitu loh*. Nah, saya juga bingung, Ibu punya tim banyak di daerah, ini penguasaan wilayahnya seperti apa ini? Kadang-kadang kita memberi kesempatan Bu, yang luas kepada kementerian untuk melihat fakta di lapangan, *gitu*. Tapi *kok* yang disampaikan di forum ini *kok* tidak menggambarkan kondisi yang *real* yang ada di bawah ya. Kita bikin bendungan sekian triliun, Bu, tiap tahun, tetapi di satu sisi ada ibu kota kecamatan yang *ndak* punya jaringan air minum, *gitu loh*. Jadi kalau kita bolak-balik, bolak-balik, sebetulnya apa yang kita kejar dari infrastruktur yang kita bangun ini? Apakah kita masih belum cukup mampu untuk mengutamakan yang harusnya kita utamakan, *gitu*. Ya saya yakin di kementerian ini orangnya cerdas-cerdas, pintar-pintar, *enggak* perlu kita *omongin lah*, ya karena memang bidang tugasnya Bapak-Ibu sekalian. Tapi kalau kita gambarkan, melihat dari apa yang tergambar di sini dengan kenyataannya di lapangan, itu soal air minum di beberapa kecamatan yang *ndak* ada ini, saya sudah *ngomong* dari beberapa periode yang lalu. Bapak-Ibu bisa cek itu ke Kepala Balainya, ada *enggak* usulan kita. Tapi di sana *enggak* muncul juga, *gitu loh*, di sini. Apa masalahnya? Ada berapa banyak orang di situ yang tidak terlayani oleh air minum, ibukota kecamatan, Pak, bukan desa, *loh* ini. Ibukota kecamatan ini kan membawahi sekian desa, sekian dusun, *ndak* ada jaringan airnya. Bukan, bukan rusak, Pak, memang belum pernah dibangun, beda *loh*, Pak, kalau rusak dengan belum pernah dibangun, ini beda. Ini belum pernah dibangun sama sekali.

Mungkin nanti akan saya usulkan, Bu, secara resmi ya, manakala mana tahu apakah harus kita begitu, kan baru nanti baru ditanggapi atau bagaimana, saya juga kadang-kadang itu tadi saya memberi keleluasaan kepada teman-teman. Ini bukan cuma di tempat saya ini, yang saya bicara ini saya bicara secara global, berlaku untuk daerah-daerah lain ya dari Sabang – Merauke. Mungkin tempat saya yang saya omongkan ini adalah contoh sampel, tapi kita harus bisa mengutamakan mana yang utama, ini kan duitnya *enggak* terlalu banyak, Bu, kecil saja ini. Kita bangun IPAL sekian triliun, iya limbah itu penting untuk dikelola, tapi air minum yang dibutuhkan untuk kesehatan hari ini, apa tidak penting? Ya tidak banyak 10, 20 miliar, 30 miliar. Ini IPAL, kita bikin 1 IPAL itu triliunan anggarannya, itu ada di CK, saya tahu itu, tahu kita, bukan kita *enggak ngerti gitu loh*, Bu.

Nah, limbah itu penting untuk kita olah, tapi orang minum hari ini yang orang gunakan untuk mandi, untuk nyuci, untuk bersihkan makanan yang

dimakan setiap hari, itu kan perlu air bersih, Bu, ini *ngurus* orang dulu kita, itu *loh*, itu kita utamakan dulu, itu kok *ndak gitu loh*. Ini kita belum bicara ada berapa desa, kalau kita tanya sekarang, bisa *ndak* digambarkan kepada kita, ada berapa desa di Indonesia yang tidak punya sumber air bersih? *Ndak* pernah kita bahas *gitu loh*. Sehingga kadang-kadang kita mesti bikin sumur bor di mana-mana, misalnya intervensi dari sumber daya air, ya. Belum kita bicara lagi yang di dalam kawasan. Contoh saya ada yang mengusulkan, Pak, ini SDA ceritanya untuk perbandingan saja. Teman-teman di masyarakat di kawasan Danau Sentarum, Taman Nasional Danau Sentarum, karena ini taman nasional, mau bikin sumur bor *ndak* bisa. Kalau kemarau tipikal Danau Sentarum *tuh* kalau kemarau dia *udah* seperti gurun, *ndak* ada airnya, itu berkilo-kilo itu seperti gurun, Pak, *ndak* ada rumput, *ndak* dan tanaman. Karena memang ada pada saat air pasang, itu terendam air, *ndak* ada air minum, *ndak* ada air mandi, kita mau bikin sumur bor, *enggak* bisa. *Nah*, ini jalan keluarnya bagaimana *gitu loh*, *ndak* ada juga diskusi kita sampai hari ini. Ya *udah* biarin aja, ya *udah* terserah masyarakat lah, pandai-pandai lah kamu hidup di sana, apa begitu kita? Ini kita kalau ke daerah, hal-hal seperti ini, kalau ditanya, malu juga kita jawabnya, Bu, kemana orang-orang kita ini? Pertanyaan saya yang ada di daerah, kerja *ndak* Balainya, kerja *ndak* menyusun perencanaan dan seterusnya? Nanti kita berdebat lagi, “Pak, *readiness criterianya* belum, perencanaannya belum, ya kan? *Nah*, yang bikin perencanaan siapa? Kami? Kan bukan. Kami kan *ndak* boleh bikin perencanaan, bikin perencanaan kan di kementerian teknis.

Saya ambil contoh saja, Bu, kita berdebat di Kalbar itu dulu soal air bersih, soal bendungan, “*Enggak* ada, Pak, Kalbar *tuh flat* daerahnya, *enggak* bisa bangun bendungan”. Pergilah saya sama Pak Menteri ke sana, saya bilang Pak Menteri, saya pernah pakai pakai perahu, lewat pakai *speed*, lewat air Pak. Ada kiri bukit, kanan bukit, tengah-tengahnya ada sungai, harusnya tinggal ditutup, kan jadi bendungan, kalau menurut saya. Walaupun saya bukan orang teknis. “Ada lokasi seperti itu Pak Lasarus?” “Ada, Pak” “Nanti coba kita terbang sebentar”. Kebetulan saya pakai heli, Pak, sebelum Pak Jokowi dulu ke, *ninjau* banjir yang parah di Sintang. Sekarang sedang banjir juga ini di Sintang ini, Bu, mudah-mudahan *ndak* naik besar lagi. Pergilah kami pakai heli, saya cerita saja, “Sebelah mana, Pak Lasarus, kita terbang?” Saya tunjukkan, “Sebelah sana, Pak”, pergi kita ke situ kurang lebih 5 menit, Pak Menteri lihat dari atas, “Itu bisa itu”, dia bilang, “Sungai itu tinggal ditutup di situ”. Itu pertanyaannya saya tadi, Pak. Teman-teman di daerah kerja *ndak*, direktur-direktur yang membidangi itu kerja *ndak*, kan begitu.

Saya terpaksa harus *ngomong* begini, Pak, sudah mau 15 tahun di sini *gitu loh*. Kalau saya baru duduk di sini, *ngomong* begini, saya salah bahasa, Pak. Tapi kalau sudah hampir 15 tahun saya di sini, saya bicara begini, saya sudah menunggu begitu lama. Setelah menunggu begitu lama, tidak diomongkan, tidak keluar juga, saya bicara hari ini. Mau kita mulai dari mana baiknya? Mau kita pakai marah-marah dulu baru dikerjakan? Kan *ndak* elok begitu kita, Bu. Kita mau Bapak-Ibu itu profesional. Pertanyaannya, mau kerja *ndak*? Kita tahu apakah ini utama atau tidak utama, kita tahu. Ada penugasan dari presiden, direktif presiden, direktif menteri, *ndak* pernah kita bantah di

komisi ini, betul *ndak* Pak Ridwan? *Ndak* pernah kita tolak, kita setuju semua *kok*. *Kenapa* di tempat Pak Ridwan, dari pasar terbakar, malah *ndak* muncul di sini? Ini kan aneh, kita ini. Apa kita *ndak* tahu ke pasar itu terbakar? *Ndak* mungkin. Api itu membesar, tidak ada yang tahu? Pasti tahulah Kepala Balainya. *Kenapa* tidak diusulkan, *kenapa* tidak menjadi prioritas? Atau ada kekuatan besar yang mengatur ini semua.

Pertanyaan kita, harus kita sepakati kah kalau kita nyusun anggaran seperti ini? Kan balik lagi kita tanya, bisakah Ibu-Ibu, Bapak-Bapak kerja, tanpa persetujuan kita? Aturan tidak membolehkan. Mulai dari Undang-Undang Dasar sampai undang-undang yang mengatur tentang penganggaran, tidak membolehkan tanpa persetujuan kita, *gitu loh*.

Nah, jadi yang seperti ini menurut saya, Bu, sebenarnya rapat kita ini *ndak* perlu lama-lama tiap kali rapat, sebetulnya. Teman-teman hampir setiap kali rapat menyerahkan catatan, betul kan? Hampir setiap kali rapat. Mulai dari per anggaran sampai hari ini. Tapi ketika yang muncul di sini tidak menggambarkan apa yang di sampaikan, itu tadi, Bu, rapat *ndak* pernah pendek, panjang terus, karena kita berjalan dengan pikiran kita masing-masing, kita berjalan dengan *kengototan* kita masing-masing, "Ini wewenang saya, terserah kalian mau setuju atau *ndak*". Nah kalau cara berpikarnya seperti itu, repot kita, Pak, akhirnya kita menangkapnya seperti itu, *gitu loh*, menangkapnya seperti itu.

Jadi maunya kita sebagai mitra ini kan harus saling menghargai, saling menghormati, kita tahu diri juga. Makanya saya bilang tadi, *ndak* pernah kita permasalahan. Pernahkah kami permasalahan IKN? Saya sampai tanya-tanya sampai hari ini, haruskah soal IKN kita bahas di sini? Saya kalau bicara soal kelembagaan, saya pertanyakan dulu forum ini memutuskan soal IKN itu. Sudah ada *loh* itu, keppres, ada kepala otoritanya, saya aja *ndak* kenal sampai hari ini kepala otoritanya, tapi tiap hari kita bahas di sini. Bu, Bapak Dirjen, Pak Dirjen sama Bu Dirjen, kalau ada proyek di otorita ini bermasalah, kami yang baris di depan ini kena periksa *loh*, Pak, percaya omongan saya. *Kenapa*? Karena ditetapkan di sini anggarannya, kan *gitu* Pak Ridwan? Kena ini. Pimpinan pasti ditanya juga, bagaimana proses penganggarannya, *kenapa* sampai bisa persetujuan dan seterusnya? Ada *ndak* persetujuan? Ada. Di kesimpulan rapat, *udah* muncul di rapat-rapat yang dulu. Tapi Pernahkah kita diajak *ngomong* soal ini secara komprehensif? Tidak pernah.

Pertanyaan berikutnya lagi, ada menghambat *ndak* Komisi V? *Ndak* juga, Pak, kita setuju terus, *kok*. Tapi maksud saya ya, saya terpaksa harus bicara begini, kadang-kadang *anu* juga *gitu loh*, sudah sampai pada apa ya, iya titik nadir, ya harusnya *enggak* perlu *ngomong* saya, Pak, tapi ini jalan terus, jalan terus, *gitu loh*. Jalan terus, sudah lelang *loh*, Pak, kemarin 5 triliun lebih, IKN itu, iya, sudah mau kontrak sekarang. Percaya omong saya, Pak. Kalau suatu hari ada masalah di proyek ini, ada ketangkap KPK misalnya, diperiksa kita ini, Pak, jangan *ndak* percaya. Kan ditanya, diurut nanti, *gimana* penganggarannya, di mana ditetapkan, siapa yang menyetujui? Saya pasti, Pak, siapa yang pimpin rapat sudah pasti, rekamannya ada, kita rapat kan

direkam. Contoh yang kemarin, waktu kasus, saya *ndak* perlu sebutlah beberapa waktu lalu di Komisi V. Begitu kena, itu habis itu, betul *ndak* Bu Nunik? Rekaman rapat habis *ndak*? Copot semua *toh*, diangkut habis rekaman rapat kita, Pak, disita semua. Saya diperiksa dua hari, Pak Hamka, yang pertama 12 jam saya, Pak, sampai naik dokter periksa tensi darah, sudah mau pingsan juga, Pak. Ini saya cerita apa adanya, Pak, karena ini pernah kita alami, *gitu loh*. Jadi mungkin *ndak* itu terjadi? Mungkin, Pak, siapa bilang *ndak* mungkin. Mungkin *aja* nanti suatu hari bermasalah paket proyek yang di IKN, mungkin *aja*, yang kerja kan manusia semua Pak, di situ.

Jadi maksud saya, kita antisipasi ini secara proses, prosesnya kita antisipasi, legal formalnya kita jalankan, aturan main bernegara kita jalankan, sehingga nanti yang salah, biar yang bersangkutan yang salah, bukan salah kita semua, ini kalau tidak kita dudukkan pada tempatnya, bisa menjadi salah kita semua, *gitu loh*.

Ini saya harus sampaikan, jadi kesimpulan rapatnya tidak kita muat angka-angka, karena memang belum bisa kita muat angka-angka, *ndak* masalah juga itu, tidak kita masukkan angka-angka seperti yang Pak Hamka tadi sampaikan, kita beri kesempatan dulu kepada dirjen-dirjen dengan Pak Menteri, untuk menyepakati lebih lanjut. Karena per hari ini, Pak Menteri, mohon maaf teman-teman, dalam kondisi yang masih kurang sehat ya, jadi beliau masih beristirahat, sehingga antara dirjen-dirjen dengan Pak Menteri belum ada kesimpulan dari hasil penajaman di masing-masing direktorat jenderal.

Saya rasa demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, ya. Nanti saya juga ada catatan yang mau saya serahkan, Bu, ya sebelum nanti bubar ya. Demikian Pak Ridwan, lebih kurangnya, saya mohon maaf.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua,

KETUA RAPAT:

Makasih, Pak Ketua.

Baik, sebelum kita dengarkan tanggapan dari Pak Dirjen maupun Ibu Dirjen, mungkin kita persilakan dulu kesempatan bagi.

F- PG (Drs. HAMKA BACO KADY, MS):

Interupsi dulu, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Silakan.

F- PG (Drs. HAMKA BACO KADY, MS):

Makasih.

Sebelum Ibu Dirjen dan Pak Dirjen menjelaskan, tolong dijelaskan kepada kami Bu, Pak, tadi yang saya sampaikan, Inpres Nomor 44 ya, di mana alokasi anggarannya termasuk di situ. Yang kedua, tolong dijelaskan kepada kami, *kenapa* tidak dianggarkan KOTAKU pada saat ini? Saya tidak melihat program ini di sini, tolong dijelaskan.

Dan yang selanjutnya, mau diapakan lagi tim-tim yang sudah ada mulai dari program bantuan Bank Dunia sampai sekarang masih ada, mau diapakan semua itu? Tolong dijelaskan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Iya nanti, nanti kan dijelaskan sebentar itu, Pak Hamka.

Baik, sebelum tanggapan Pak Dirjen dan Bu Dirjen, saya persilakan kepada yang terhormat para Anggota yang menyerahkan map-map, silakan usulan. Silakan, Pak, waktunya untuk menyerahkan usulan. Iya, Pimpinan sekaligus, Pak, sekalian. Di sana, Pak, langsung, Pak. Silakan, silakan, ayo. Sudah foto, pasti sudah ya, sudah semua, foto semua ya?

F- P. GERINDRA (Ir. SUMAIL ABDULLAH):

Izin, Ketua, ke belakang, Ketua.

KETUA RAPAT

Ndak apa-apa, ndak apa-apa, Pak Sumail, silakan.

F- P. NASDEM (Drs. H.TAMANURI, M.M.):

Jangan lama-lama, jangan lama-lama.

F- PDIP (LASARUS, S.Sos., M.Si.) – KETUA KOMISI V DPR RI:

Pak Sumail, bisa dipercepat, bilang.

KETUA RAPAT:

Iya, iya, Pak Sumail, silakan Pak, sudah selesai fotonya Pak Sumail kan? Sudah ya.

F- P. NASDEM (Drs. H.TAMANURI, M.M.):

Ketua, saya minta waktu sedikit *aja*.

KETUA RAPAT:

Silakan Pak, silakan, silakan, Pak.

F- P. NASDEM (Drs. H.TAMANURI, M.M.):

Karena saya tidak menyerahkan map, Pak, jadi saya hanya minta catatan saja.

KETUA RAPAT:

Silakan, silakan, Pak.

F- P. NASDEM (Drs. H.TAMANURI, M.M.):

Pak Dirjen Perumahan, Pak Iwan,

Saya hanya ingin mengingatkan, Pak, yang sudah saya sampaikan dulu, mengenai rumah susun mahasiswa, tolong diingatkan, sebab di sini *enggak* ada, Pak, jadi saya *enggak, enggak* bikin-bikin lagi itu.

Terima kasih, Pak.

KETUA RAPAT:

Sudah diingat, Pak, iya. Baik, karena tadi yang duluan memberikan paparan adalah Ibu Dirjen, maka sekarang kita berikan kesempatan yang duluan memberikan tanggapan adalah Pak Dirjen, silakan.

Serahkan *aja* sekarang, Pak, silakan, Pak, ayo. Silakan, Pak, silakan, Pak, sambil berdoa, sambil berdoa, ayo. Disarankan cepat, Pak, ya. Oh iya, silakan, Pak Dirjen.

DIREKTUR JENDERAL PERUMAHAN KEMENTERIAN PUPR RI (IWAN SUPRIJANTO, S.T., M.T.):

Baik, terima kasih, Pimpinan dan Bapak-Ibu sekalian.

Mungkin tanggapan saya mungkin tidak, apa namanya, kami upayakan untuk bisa menjawab semua, *gitu*, tapi tidak per masing-masing begitu.

Pertama, terkait dengan capaian Renstra tahun 2021 khususnya yang di rumah swadaya yang tadi disampaikan oleh Bu Sri Rahayu. Yang tidak tercapai, ini sebenarnya karena target itu ada tambahan, Bu, di, di pertengahan tahun terkait dengan dukungan untuk penanganan kemiskinan ekstrem. Jadi ini karena penugasan baru, kemudian alokasi anggaran, ini kebetulan karena tidak ada ruang alokasi yang lain, kita memanfaatkan alokasi dari *loan* NAHP.

Nah, tapi karena membutuhkan waktu koordinasi, karena kegiatan ini tidak bisa dieksekusi sendiri oleh Kementerian PUPR, karena ini di bawah koordinasi Kemenko apa namanya, Kemenko PMK, dan ini juga ada kolaborasi dengan beberapa kementerian/lembaga, maka kegiatan tersebut memang di tahun 2021 tidak terserap. Itulah yang membuat implikasi, yang saya laporkan tadi, dan evaluasi di dalam RDP di awal waktu itu, sehingga kinerja dari Dirjen Perumahan hanya 82%, ini salah satu kontribusinya tidak tercapai. Tetapi karena ini *loan* ini kita *carry over*, Bu, jadi waktu kita perpanjang dan kemudian alokasinya kita manfaatkan di tahun 2022. Sehingga untuk alokasi pendanaan penghapusan kemiskinan ekstrem ini, kita bisa lakukan di tahun 2022. NAHP sendiri ini *closing date*-nya di 28 Februari 2023, jadi tahun depan ini sudah sudah berakhir dan ini *Alhamdulillah* bisa di-*extend* di tahun 2022 ini, dan bisa kita manfaatkan. *Nah*, kemudian,

F-PDIP (Hj. SADARESTUWATI, S.P., M.MA.):

Pimpinan, izin.

KETUA RAPAT:

Silakan.

F- PDIP (Hj. SADARESTUWATI, S.P., M.MA.):

Terima kasih, Pimpinan.

Mohon izin, Pak Dirjen, tadi ada yang kurang, saya ada titipan dari Universitas Airlangga untuk mengingatkan bahwa Universitas Airlangga sudah mengirimkan proposal untuk permohonan rusun mahasiswa, jadi mohon untuk bisa dicek. Dan juga satu lagi dari Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Ibrahimiyah, Desa Bantal, Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo. Ini dulu memang sudah pernah dijanjikan oleh Pak Dirjen yang lama dan usulannya juga sudah masuk, tetapi sampai hari ini belum ada pembangunan, pelaksanaan pembangunan. Mohon, ini sejak tahun 2020, Pak Dirjen, kalau bisa mohon di apa, prioritaskan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Makasih, Bu Estu.

Silakan, Pak Dirjen, disingkat-singkat saja yang penting ya, yang tidak penting nanti ditulis secara tertulis.

DIREKTUR JENDERAL PERUMAHAN KEMENTERIAN PUPR RI (IWAN SUPRIJANTO, S.T., M.T.):

Oke, baik, Pak.

Kemudian mungkin terkait dengan, masih dengan capaian tadi, target rusun juga turun di tahun ini, *gitu* ya. *Nah*, ini tidak terlepas, jadi kami lebih memprioritaskan, tadi untuk pemenuhan terkait dengan program Padat Karya, khususnya yang program kerakyatan. Karena di awal 2022, saya melihat alokasinya hanya memenuhi sekitar 75% dari alokasi itu, yang sudah disepakati. Sehingga karena ini merupakan komitmen dan waktu itu saya baru bergabung di Perumahan, ini yang prioritas kita dahulukan, sehingga memang mengurangi target dari pembangunan rumah susun. Jadi mungkin prioritas kepada Bapak-Ibu sekalian ini, yang membuat target secara keseluruhan untuk di rumah susun berkurang.

Bapak-Ibu sekalian,

Perlu kami sampaikan pula bahwa di dalam seluruh pelaksanaan kegiatan kami, kami terus melakukan evaluasi. Jadi khusus untuk BSPS, ini kami juga lakukan evaluasi terkait dengan tadi, mungkin yang telah Bapak/Ibu sampaikan kaitan dengan bank penyalur. Jadi mungkin proses mekanismenya ini memang terbuka, baik itu bank nasional yang anggota Himbara, maupun bank daerah. Dan ini dilakukan seleksi dan *beauty contest*. *Nah*, ini secara terbuka. Dan memang kadang-kadang ini juga masalah minat dan sebagainya ya, sehingga membuat hanya bank itu yang terpilih begitu, tapi ini menjadi evaluasi kami.

Jika tadi yang Bapak-Ibu sampaikan ini menjadi hambatan, kendala, maka ini untuk penetapan bank penyalur berikutnya, ini akan kita tunjuk yang yang lain, yang relatif sesuai dan bisa lebih cepat. Walaupun kalau sementara dari evaluasi kami, dari proses penyaluran dan sebagainya, dengan tadi progres sudah sampai 90%, relatif sebenarnya tidak ada masalah, tetapi kaitan dengan kepuasan Bapak-Ibu sekalian, ini menjadi perhatian kami.

Kemudian untuk untuk PSU juga demikian, Pak Irwan, ini di Kaltim sebenarnya sudah ada 317 ini, Pak, yang sudah dibantu *gitu* ya. Dan kriterianya sebenarnya juga tidak sulit itu dan relatif cukup gampang *gitu* ya. Nanti mungkin secara teknis ini memang sudah ada payung Permentannya, ya. Jadi ini memang sangat tergantung dari mungkin pengembang itu sendiri dan memang yang kita targetkan yang, mungkin ada jumlah tertentu ya, Pak, ya, yang itu. Jadi kalau *kayak* mini *cluster* cuma sedikit, lah ini kan mungkin itu berbeda.

Dan mungkin yang ingin saya tekankan, sebenarnya PSU ini nanti di langkah selanjutnya, mohon dibantu juga kesadaran dari pemerintah daerah untuk selanjutnya menerima aset ini. Karena ini bukan kita serahkan kepada pengembang, tapi ini menjadi aset yang kemudian dilanjutkan dan dikelola oleh pemerintah daerah, ini yang perbaikan yang terus kita evaluasi juga.

Untuk rumah susun, Bapak-Ibu sekalian, kami juga melakukan upaya-upaya. Pertama, saat ini sudah melakukan revisi perbaikan terhadap desain dan *prototype*-nya, dan ini mungkin lebih efisien, lebih, dan ini nanti kemudahan

pekerjaannya. Dan tadi Bapak-Ibu sekalian, tadi yang mungkin disampaikan juga oleh Bu Sri, kaitan dengan tender, tadi yang penawarannya dari 4,8 menjadi 3,8, memang ya ini ranah pengadaan, memang tidak di kami ya, tapi kami terpaksa menerima hasil tersebut. Tetapi itulah yang menjadi atensi kami, mengapa saya menyegerakan apa namanya, *prototype* dan sebentar lagi akan saya terbitkan SE-nya dan kemudian pengadaannya ke depan itu dengan e-katalog, jadi untuk menghindari ini, Bu.

Dan kemudian nanti dalam pengendaliannya, ini saat ini SE-nya juga sedang kami siapkan, jadi nanti ada proses semacam *milestone certificate*, jadi memastikan tahapan pekerjaan ini sesuai. Sehingga tidak *ujug-ujug* di akhir, nanti bangunan yang mungkin dialami oleh Pak Ishak Mekki, sudah selesai bangunannya, tetapi ini mohon maaf Bapak-Ibu sekalian, saya menerapkan SOP kaitan dengan kelaikan fungsi bangunan. Bangunan ini bukan hanya selesai kemudian Bapak-Ibu langsung memanfaatkan.

Jadi terus-terang, kalau Satker dan Balai menerima, tetapi saya selaku dirjen, selaku penanggung jawab dari pekerjaan tersebut, saya harus memastikan bahwa pekerjaan itu memang layak untuk diserahkan, layak untuk dimanfaatkan. Karena itu ada beberapa rumah susun yang, mohon maaf, dengan berat hati juga kami evaluasi terlebih dahulu, untuk memastikan hal tersebut, agar penerima manfaat ini tidak, tidak kecewa dan ada timbul masalah di kemudian hari, karena tanggung jawab konstruksi masih melekat di kami. Tapi kami memberikan atensi untuk percepatan serah terima aset.

Jadi kami upayakan agar secepatnya serah kelola kita bisa lakukan. Dan kemudian selanjutnya kami juga telah berkoordinasi dengan DJKN dan Setneg agar serah terima aset terutama kepada daerah, kepada lembaga penerima dan sebagainya, untuk bisa dilakukan cepat dan di rentang masa pemeliharaan. Sehingga secara tanggung jawab konstruksi tidak melewati itu dan kemudian berlanjut membutuhkan pemeliharaan atau OPOR selanjutnya.

Kemudian mungkin terakhir, selain yang mungkin hal-hal lain yang nanti akan kami sampaikan secara tertulis, tadi mungkin Pak Ketua sudah menyampaikan, terkait dengan alokasi mungkin Bapak-Ibu sekalian yang, yang tadi kami sampaikan. Jadi yang saat ini kami sampaikan memang masih, masih sama dengan turunan dari yang disampaikan oleh Bapak Menteri kemarin, ya itu. Tetapi kami sudah membuat *exercise* ya, *exercise* ini artinya ada yang kita punya skenario di mana tadi kalau saya sampaikan, di luar yang IKN yang memang sudah *dedicated* dan sudah terkontrak, ada alokasi tambahan yang untuk strategis tadi, itu yang kita alokasikan untuk tambahan program Padat Karya atau kerakyatan. Tetapi apabila hanya jumlah itu, itu belum memenuhi ekspektasi yang Bapak-Ibu sampaikan kemarin, apabila usulan Bapak-Ibu yang disampaikan pada raker kemarin itu harus diakomodir, maka, maka kebutuhan anggarannya melebihi alokasi anggaran yang ditetapkan kepada kami. Itu yang, yang menurut kami ada potensi adanya pergeseran, berpotensi adanya pergeseran antar program, antar UNOR. Dan ini sepenuhnya *exercise*-nya, ini masing-masing telah melakukan dan konsolidasi antar UNOR ini juga sudah dilakukan oleh Pak Sekjen, semoga besok Pak Sekjen juga bisa

melaporkan. Dan inilah menjadi bahan yang akan menjadi dasar keputusan Bapak Menteri, begitu. Jadi mohon maaf, kalau hari ini kami belum sepenuhnya bisa memenuhi harapan Bapak-Ibu sekalian.

Kemudian terkait dengan pelaksanaan itu Bapak-Ibu sekalian, kami terus-terang karena memang ruang alokasi anggaran yang terbatas, salah satu efisiensi yang kami lakukan adalah biaya-biaya pendamping, biaya *safe guard*. Jadi saya meminta teman-teman untuk kita bicara tentang untuk apa, kemiskinan ekstrem, untuk masyarakat yang tidak layak huni *gitu* ya, saya minta rapat-rapat tidak dilakukan di hotel, misalnya *gitu*, kan, membahas kemiskinan di hotel mewah dan sebagainya, itu adalah biaya-biaya yang.

Kemudian juga di dalam pelaksanaan, *kenapa* waktu pelaksanaan pendampingannya juga kami batasi. Sebenarnya ini lebih men-*challenge* agar pelaksanaan ini bisa berlangsung lebih cepat. *Nah*, buktinya, Pak, ya, dengan waktu yang kami perpendek karena ini konsekuensinya kepada efisiensi biaya, pelaksanaannya hasil evaluasi kami ini bisa berlangsung dengan baik. Faktanya, kalau saya dapat laporan yang sudah selesai kurang lebih ada 50.000. Jadi artinya kurang lebih hampir 50% progresnya bisa berjalan, jadi itu. Karena kalau saya lihat yang kemarin, malah progres pelaksanaannya itu jadi lama *gitu*, yang seharusnya bisa diselesaikan cepat, pendamping bisa bekerja lebih efektif, *gitu* ya, tetapi menjadi lebih lama, sehingga biaya menjadi tidak efisien lagi, *gitu* menurut saya. Sehingga secara *cost*, kalau tadi 20 juta, kemudian nanti ada biaya pendampingnya, ini yang kami kurangi, agar jumlah pakatnya bisa lebih lebih banyak, itu salah satu strategi.

Dan kemudian mungkin terkait dengan beberapa wilayah, jadi perlu saya sampaikan, mungkin Pak Roberth Rouw dan Pak Willem Wandik, bahwa untuk Papua kan memang harga satuannya sudah berbeda, Pak. Di Papua sendiri juga kami bedakan antara yang di pegunungan sama yang di pantai ya, atau di darat yang bukan pegunungan, begitu, itu berbeda *gitu* ya. Jadi ini yang mungkin kami sudah sudah upayakan, begitu.

Dan Bapak-Ibu sekalian, mungkin terkait dengan program bantuan ini, saat ini pun kami sedang, BPK juga sedang melakukan audit pemeriksaan terhadap, ini terutama saya melihat ini perlu menjadi perhatian kita semua bahwa, saya melihat dalam tanda petik, fokus dari pemeriksaan dari auditor ini lebih kepada bukan terhadap misalnya rumah susun terhadap proses konstruksi atau hasil konstruksinya, tetapi tampaknya lebih difokuskan kepada proses usulannya. Usulannya dari siapa, bagaimana, kemudian mengapa ini yang dipilih, bukan yang itu, *gitu* ya, kemudian di proses pengadaan barang dan jasanya. Jadi tata kelola inilah, yang tampaknya menjadi objek dan *sampling* dari ini, yang membuat kita juga lebih hati-hati, ini bagian dari manajemen risiko yang kami pikirkan.

Begitu pula Bapak-Ibu sekalian, terkait dengan bantuan-bantuan yang lain misalnya terutama yang terkait dengan padat karya. Jadi kami kebetulan 2-3 kali, ya, Pak Arsyad, ya, kebetulan, kita sudah sudah audiensi, diminta audiensi dengan dengan KPK, kaitan dengan strategi pencegahan KPK. *Nah*,

ini mereka juga fokusnya adalah usulannya. Jadi apakah masuk SIP baru, kemudian SIP baru mekanisme *treatment*-nya, mengapa ini, dan sebagainya.

Nah, ini juga termasuk penanganan kemiskinan ekstrem, ini juga demikian, *gitu*. Jadi data *by name by address* itu seperti apa? Apakah terjadi tumpang-tindih bantuan dengan bantuan yang lain yang dilakukan Kemensos dan yang lain, ini juga menjadi perhatian. Kemudian sinerginya dengan Cipta Karya, kemudian dengan yang lain, ini juga menjadi pembahasan, sehingga ini yang saya berharap, Pak Pimpinan, untuk bisa menjadi atensi kita bersama.

Dan satu lagi, kemarin jujur saya juga ditegur Pak Menteri, *gitu*, ya, walaupun kami menerima usulan dari Bapak-Ibu sekalian, tetapi saya mohon maaf, *enggak* sebutkan satu wilayah, tapi ternyata usulan itu, mohon maaf, bertumpuk ada beberapa di wilayah tertentu, Pak. Jadi, *nah*, karena Pak Menteri bilang, "Ini *kok enggak* di dapil", *gitu*, tapi *kenapa kok* ada yang, *nah*, ini mungkin juga menjadi catatan kita semua. Jadi ketika kita kumpulkan, kita rapihkan, ternyata ini menumpuk di satu wilayah tertentu. Mohon kiranya ini di ke depan bisa kita perbaiki bersama.

Mungkin hal-hal lain, mohon maaf, karena keterbatasan waktu, mungkin kami akan sampaikan secara tertulis.

Demikian, terima kasih.

F- PG (Drs. HAMKA BACO KADY, MS):

Izin, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Silakan, Pak Hamka.

F- PG (Drs. HAMKA BACO KADY, MS):

Pak Dirjen, saya ingin tanya tadi itu mengenai apa namanya, Inpres nomor 4 ya, terkait dengan alokasi BSPS. Apa yang Pak Dirjen sampaikan itu menjadi *warning* tadi, itu menjadi perhatian kami juga, ya, tolong dijelaskan itu tadi yang saya minta.

Makasih.

KETUA RAPAT:

Pak Dirjen, silakan.

DIREKTUR JENDERAL PERUMAHAN KEMENTERIAN PUPR RI (IWAN SUPRIJANTO, S.T., M.T.):

Mohon izin.

Jadi begini, Pak, jadi kalau yang 103.000 itu kan posisi eksisting yang yang sama dengan kemarin ya, Pak, ya, sama dengan tahun ini. Kemudian tadi yang kita sampaikan, bahwa kami ada tambahan anggaran yang di luar IKN ada 500 miliar, *nah*, ini sebenarnya yang kami alokasikan untuk penanganan kemiskinan ekstrem, Pak, sesuai dengan Inpres tad , karena kami *enggak* punya ruang fiskal lagi untuk itu, di luar 103. Itu yang, ini yang kami usulkan, agar ini kita jadikan satu, Pak, kita jadikan satu. Dan kami mohon ketika ini digabungkan 103 nanti ditambah yang 500 miliar ini, kemudian itu kurang lebih ada 20 ribuan yang bisa ditambahkan, menjadi kurang lebih 120.000, begitu. *Nah*, ini yang kemudian yang kita harapkan, saya tidak memisahkan lagi, Pak, BPS reguler dengan PKE. *Nah*, karena tidak ada ruang lagi, apa, alokasi anggaran lagi untuk itu, kami mohon, jadi ini saya serahkan ke Bapak/Ibu sekalian, tapi kemudian kami mohon dibantu 20% alokasi yang seluruhnya tadi, 103 plus tadi, Pak, untuk bisa 20% nya mendukung program PKE kami, itu *aja*, Pak.

F- PG (Drs. HAMKA BACO KADY, MS):

Izin, tambahan Pak, Ketua.

KETUA RAPAT:

Silakan.

F- PG (Drs. HAMKA BACO KADY, MS):

Memang agak menyulitkan lagi nanti kita itu, Pak Dirjen. Ini apa yang saya bayangkan, belum ada penambahan dari *exercise* yang kemarin, ditambah lagi beban ini, saya kira akan menjadi rumit lah nanti. Dan akan menjadi beban di bawah atau beban kami nanti di dalam pengusulan-pengusulan itu. Harus mengambil data dari BKKBN, dan sebagainya, sebagainya. *Nah*, oleh karena itu mekanismenya nanti tolong di disimplifikasikan dengan baik, supaya semua usulan itu terkoneksi dengan dengan apa yang Bapak inginkan, termasuk keinginan Inpres no 4 tadi, karena itu akan menyulitkan kalau digabung itu, Pak, ya.

Makasih.

DIREKTUR JENDERAL PERUMAHAN KEMENTERIAN PUPR RI (IWAN SUPRIJANTO, S.T., M.T.):

Mohon izin.

KETUA RAPAT:

Silakan, silakan.

DIREKTUR JENDERAL PERUMAHAN KEMENTERIAN PUPR RI (IWAN SUPRIJANTO, S.T., M.T.):

Karena ini nanti ada mekanisme teknis, Pak ya, jadi apabila nanti masalah alokasi nanti telah ditetapkan ya, tentunya dapat persetujuan Pak Menteri, maka kami sebenarnya akan menyelenggarakan, Pak. Ini yang forum teknisnya, Pak. Data ya kami sampaikan, kemudian mekanisme pengusulan, kemudian mekanisme yang 20% ini seperti apa, datanya di mana, begitu, itu akan kami sampaikan. Nanti mohon izin, nanti mungkin melalui tenaga ahli-tenaga ahli yang Bapak percaya, kami akan siapkan forum untuk memfasilitasi itu, Pak. Jadi ini agar nanti bisa masuk langsung di dalam rancangan DIPA, Pak, yang kita harapkan, sebagaimana skenario pelaksanaan yang kami usulkan.

KETUA RAPAT:

Oke, jelas ya, Pak?

F- PDIP (SRI RAHAYU):

Izin, sedikit, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Silakan, silakan, Bu Sri, silakan.

F- PDIP (SRI RAHAYU):

Pak Dirjen, yang tahun ini, mau tahun-tahun kemarin, BSPS itu kan juga dibagikan kepada kepala daerah-kepala daerah. Maksudnya, di daerah-daerah *gitu* ya, kan ada di luar aspirasi dari kita, BSPS, tahun-tahun kemarin ada kan?

DIREKTUR JENDERAL PERUMAHAN KEMENTERIAN PUPR RI (IWAN SUPRIJANTO, S.T., M.T.):

Tahun sebelumnya, saya kurang tahu, tapi tahun ini tidak ada.

F- PDIP (SRI RAHAYU):

Soalnya *kok* kalau selain saya, yang punya saya, ada lagi,

DIREKTUR JENDERAL PERUMAHAN KEMENTERIAN PUPR RI (IWAN SUPRIJANTO, S.T., M.T.):

Yang *anu*, Bu, ini terkait dengan yang penanganan kemiskinan ekstrem tadi, Pak, tapi bukan urusan pemerintah daerah, tapi data tadi, konsolidasi dari Kemenko PMK, Bu. Jadi misalnya di daerah tertentu yang menjadi target penanganan kemiskinan ekstrem, tapi bukan usulan pemda, Bu.

F- PDIP (SRI RAHAYU):

Berarti penanganan yang ekstrem itu tahun 2021 ada, sudah?

DIREKTUR JENDERAL PERUMAHAN KEMENTERIAN PUPR RI (IWAN SUPRIJANTO, S.T., M.T.):

2021 itu di akhir ya,

F- PDIP (SRI RAHAYU):

Eh 22, 22,

DIREKTUR JENDERAL PERUMAHAN KEMENTERIAN PUPR RI (IWAN SUPRIJANTO, S.T., M.T.):

2022, yang masif di 2022.

F- PDIP (SRI RAHAYU):

Nanti saya tanyakan kembali, oke.

KETUA RAPAT:

Pak Roberth, silakan, Pak Roberth.

F- P. NASDEM (ROBERTH ROUW) – WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:

Saudara Dirjen, kan apa yang Bapak sampaikan bahwa ini ada pemerintah melihat bahwa ada program tentang penanganan kemiskinan ekstrem. Dari, dari kata-kata itu saja, sudah harus memisahkan dengan BSPS itu. Nilainya, karena ekstrem, berarti itu betul-betul tidak seperti yang biasa yang kita sampaikan, bahwa itu pasti rumahnya ekstrem betul dia, miskin. Maka nilainya tidak boleh sama, Pak. Itu, itu yang harus diberikan. Bahwa yang namanya kemiskinan ekstrem, dibantu, itu nilainya beda sama yang biasa, ini yang harus kita berikan ya, tidak boleh disamakan. Sekarang Bapak bilang, "Oh iya sudah itu masuk satu kali bantu itu", lah berarti bukan masuk ekstrem, biasa-biasa saja, ya kan? Ekstrem, maka dia lain, biayanya harus lebih, Bu, lebih, tidak boleh biasa, karena memang mereka sangat susah. Kalau kita kasih sama saja sama yang lain, bukan ekstrem, biasa saja, Pak, ya. Ini yang membuat saya minta supaya kita sepakat untuk itu, itu *kenapa* saya selalu minta, kita beda? Karena betul-betul kami di Papua itu ekstrem betul, ya Pak Willem ya? Ekstrem betul itu, ya. Jadi kita harus lain, *gitu*, ya kan. Perbedaan dengan yang atas sama yang bawah cuman 3,5 juta, Pak, nilainya, padahal di bawah juga ekstrem, Pak. Ada di pesisir, ada di pulau-pulau ya kan? Kami tidak bisa masuk ke sana karena anggarannya cuma kecil, akhirnya kami *cuman* dapat berikan yang di pinggir-pinggir kota, sebenarnya harusnya ke sana. Harapan saya dengan ekstrem ini, kami bisa masuk ke sana.

Terima kasih, Pimpinan.

F- PKS (H. SYAHRUL AIDI MAAZAT, L.c., M.A.):

Pimpinan, interupsi, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Siapa? Silakan, Pak Syahrul.

F- PKS (H. SYAHRUL AIDI MAAZAT, L.c., M.A.):

Iya, saya menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Roberth, kemiskinan ekstrem ini perlu kita samakan persepsinya. Menurut saya, ini kan tidak juga, selain daerah yang tertinggal, ini juga harus lihatnya bukan daerah saja, tetapi adalah orangnya. Kalau saya baca dalam terminologi yang disampaikan oleh pemerintah, pertama *gini*, yang sekarang kita buat program BSPS ini kan swadaya, ada swadaya dari masyarakatnya. Sementara kemiskinan ekstrem itu tentu adalah masyarakat yang memang tidak punya penghasilan atau jauh sekali penghasilannya.

Nah, saya setuju yang disampaikan oleh Pak Roberth, bahwasanya harganya harus beda. Kalau kita, saya kemarin di Kementerian Desa menyampaikan contoh, yang saya bayangkan, kemiskinan ekstrem itu adalah dia miskin, dia cacat, dengan cacatnya dia tidak mampu bekerja. Dia miskin, dia tua renta, dengan tua rentanya dia tidak mampu bekerja, dia miskin, dia sakit kronis, kanker, tumor, stroke, *nah*, ini harus perlu didefinisikan secara jelas Pak. Karena saya takut nanti, justru ini akan merembet kemana-mana juga.

Nah, program BSPS kita itu kalau tidak salah, bahasanya untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Tapi ada masyarakat kita betul-betul tidak punya penghasilan, Pak, tanahnya ada. Saya setuju, sepakat, ini program ini sepakat, Pak, karena mohon maaf, program kita ini ada kemudian ketika verifikasi, karena tidak ada swadaya, masyarakat ini akhirnya tidak dapat.

Nah, untuk menampung ini, ini programnya untuk kemiskinan ekstrem, tapi tolong dibuatkan definisinya, terminologinya, indikator-indikatornya, saya usulkan di antaranya, empat kategorinya, Pak. Dia miskin dia cacat, dia miskin sakit menahun, dia miskin dia tua renta, kemudian dia miskin dia anak-anak, mungkin janda, segala macam dengan anak-anak yang banyak, tidak punya penghasilan.

Ini, Pak, supaya nanti apa yang menjadi target pemerintah, menjadi isu nasional semua kementerian/lembaga, kemudian bagaimana mengentaskan kemiskinan ekstrem ini bisa terwujud. Programnya bagus, Pak, kita lanjutkan, tapi saya sepakat, nilainya itu perlu dibedakan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Tolong dijawab, Pak Dirjen, cukup saja ini bahwa nilainya beda atau tidak? Silakan, Pak.

DIREKTUR JENDERAL PERUMAHAN KEMENTERIAN PUPR RI (IWAN SUPRIJANTO, S.T., M.T.):

Nilainya sama Pak, begini konsepsinya. Jadi dalam penanganan kemiskinan ekstrem ini, ini penanganannya bukan hanya Kementerian PUPR. Jadi ini ada Kementerian Sosial, kementerian yang lain, termasuk dukungan pemerintah daerah. Sehingga secara infrastruktur, sebenarnya objeknya sama, sehingga bentuk bantuan nilainya kami anggap sama. *Nah*, kemudian bentuk kontribusinya tadi, Pak, yang misalnya *ndak* ada penghasilan dan sebagainya, *nah*, ini nanti dibantu oleh Kemensos, Pak, ya. Kemudian ada yang, *loh* ini program kolaborasi, Pak, ini yang *lead* adalah Kemenko PMK, Pak. Kemenko PMK. Jadi Kementerian PUPR hanya salah satu bagian dari penanganan ini, jadi bukan, bukan kami sendiri dan kementerian

F- PDIP (SRI RAHAYU):

Enggak usah diperdebatkan itu.

DIREKTUR JENDERAL PERUMAHAN KEMENTERIAN PUPR RI (IWAN SUPRIJANTO, S.T., M.T.):

Kementerian PUPR, kami juga, BPIW dan Cipta Karya, juga kaitan air minum, sanitasi di-*support* oleh Cipta Karya. *Nah*, secara rumah, fisiknya sama, yang BPS itu kan juga peningkatan kualitas, yang ini juga sama. Untuk hal-hal yang lain, non teknis, dilakukan oleh Kementerian lain.

KETUA RAPAT:

Saya kira, Pak Dirjen, sudah tidak perlu diperdebatkan itu, ya? Sudah di mengerti ya? Cukup ya?

Baik, kita persilakan, Bu Dirjen, singkat-singkat saja, Bu Dirjen, yang penting-penting. Tapi tunggu dulu, Pak Dirjen, Bapak tadi belum menjawab yang 64 tadi itu, Pak, nanti suratnya itu, Pak, ya, jangan lupa, Pak, ya, yang 64 apa namanya rumah BNBA itu, iya tolong itu, Pak, ya, Pak Dirjen ya, *enggak* usah dijawab, cukup kita sampaikan saja.

Silakan, Bu Dirjen.

DIREKTUR JENDERAL CIPTA KARYA KEMENTERIAN PUPR RI (IR. DIANA KUSUMASTUTI, M.T.):

Baik, terima kasih, Bapak, atas kesempatan yang diberikan kami, untuk merespon dari pertanyaan-pertanyaan ataupun masukan-masukan dari Pimpinan maupun Anggota DPR Komisi V.

Mohon izin, Bapak, saya sedikit menambahkan apa yang disampaikan oleh Pak Iwan, ya, terkait dengan masalah penanganan kemiskinan ekstrem. Saya, jadi ceritanya dulu untuk penanganan kemiskinan ekstrem itu sebenarnya adalah munculnya dari BKKBN, karena kita akan melakukan penanganan untuk masalah stunting, ya. Stunting ini sebenarnya salah satunya adalah masalah air dan sanitasi, tetapi setelah kita lihat secara keseluruhan, masalah stunting anak yang kurang gizi dan sebagainya, itu disebabkan banyak hal. Misalnya dari pernikahan dini ataupun tidak mengertinya masyarakat yang mempunyai anak dan bagaimana masalah perkawinan yang belum siap dan sebagainya, itu akan menjadi masalah, hal yang banyak, sehingga itu akan menimbulkan anak-anak itu stunting. Sehingga untuk penanganan kemiskinan ekstrem ini, karena BKKBN ini belum siap, maka dilaksanakan oleh kementerian/lembaga yang lainnya.

Namun nantinya Bapak Presiden tidak berkenan dengan hal ini, kemarin pada saat kita ratas, kami diajak oleh Pak Menteri, nanti akan disatukan masuk di dalam semuanya itu BKKBN. Tapi BKKBN memang saat ini belum siap, Pak. Sehingga untuk air minum ya tetap dilakukan oleh Cipta Karya, untuk rumah dilaksanakan oleh Perumahan, kemudian juga masalah sanitasi oleh Cipta Karya, ini masih terus digodok, tapi intinya adalah untuk menurunkan stunting atau masyarakat yang miskin ini, sampai dengan tahun 2024 itu sudah selesai, nol ini nya, itu Bapak, saya menambahkan sedikit.

Kemudian untuk Cipta Karya. Jadi perlu kami sampaikan, Bapak, mungkin saya akan secara acak masalah prasarana olahraga, yang tadi memang kami sampaikan di dalam bahan paparan kami. Prasarana olahraga ini di Cipta Karya *kenapa* ada, karena ada Perpres-nya. Kalau tidak ada Perpres-nya, kami juga tidak berani untuk menangani, karena ini sebenarnya adalah yang ditangani oleh Kemenpora. Sehingga, apapun yang kita lakukan berdasarkan dari Perpres tersebut, dan ini juga bukan merupakan usulan-usulan dari Balai, sehingga kita melakukan penanganan untuk pertama itu adalah Asian Games, kemudian PON Papua, kemarin terakhir dengan ini FIFA, yang sedang kita kemarin sudah kita lakukan juga, dan terakhir kemarin itu untuk Asian Para Games, ini semuanya adalah perpres-perpres yang ini kan. *Nah, saya enggak* tahu nanti untuk yang PON Aceh, ini memang belum ada perpres-nya, kami jadi belum menangani untuk hal tersebut.

Kemudian IBM ya, masalah infrastruktur yang berbasis masyarakat tadi yang disampaikan, memang setelah kemarin kita raker, kami melakukan rapim bersama dengan Bapak Menteri dan seluruh dirjen-dirjen, dan kemudian kami diminta untuk melakukan *exercise*. Dan Pak Menteri menyampaikan bahwa kita harus memperhatikan usulan dari DPR. Yang pertama adalah masalah infrastruktur yang berbasis masyarakat yang Padat Karya, kemudian kunjungan-kunjungan dari reses, ini juga harus kita perhatikan, dan juga usulan-usulan dari dapil-dapil ini, yang nantinya tentunya akan dilihat ya, bagaimana *exercise* dari masing-masing dirjen. Kemudian nanti Bapak Menteri akan melakukan arahan terkait dengan hal tersebut dan karena Bapak Menteri

memang sedang kurang sehat, sehingga kami mohon waktu untuk hal tersebut, setelah kami berkoordinasi dengan Bapak Menteri.

Kemudian, Bapak, usulan-usulan yang lainnya, terkait dengan masalah IBM ini, tadi Pak Fauzi menyampaikan *kenapa* progresnya masih 17,28. Mohon izin, Bapak, sebenarnya itu secara fisik, namun secara keuangan, sebenarnya kami sudah 50,15. Memang kami melaksanakan ini tidak langsung melakukan pembangunan, tapi bertahap, kami melakukan sosialisasi terlebih dahulu, kami melakukan koordinasi dulu dengan masyarakat, seperti apa yang ada di dalam gambar ini, sosialisasi, kemudian kampanye, terus kita juga ada kontrak kerja dengan teman-teman masyarakat di sana, baru kita melakukan pelaksanaan pembangunannya, jadi kita bertahap. Namun karena uangnya ini diserahkan kepada masyarakat untuk dikelola masyarakat, maka uang ini diserahkan dulu kepada BKM ataupun pengelola masyarakat di sana. Sehingga kita melakukan, berproses, setelah semuanya jadi masuk, kita nanti akan termin selanjutnya, setelah, ketika akan melakukan pembangunan. Demikian, Bapak, yang terkait dengan masalah, untuk IBM sehingga progres kita sudah 50,15, berarti pelaksanaannya sudah berjalan di masyarakat.

Kemudian terkait juga dengan masalah usulan-usulan dari Bapak-Ibu sekalian, misalnya untuk yang Bontang, masuk, Pak Irwan, oh Pak Irwan-nya *udah enggak* ada, oh ada ya? Sudah masuk, Pak, ini sudah kami ini kan di 2023. Memang kami tidak masukkan di situ, karena di situ kan “antara lain”, *nah*, “antara lain” itu masih ada yang lain-lainnya, *gitu* ya, mudah-mudahan ini. Kemudian Mahakam Hulu yang tadi Bapak sampaikan, ini sebenarnya masih ada masalah, Bapak, masih ada masalah yaitu kami harus memerlukan pembenahan dari kelembagaannya terlebih dahulu. Yang terpenting itu adalah masalah operator, yang kami usulkan nanti ditangani bersama dengan Balai Teknik Air Minum terlebih dahulu untuk kelembagaannya, iya.

Kemudian, ini pertanyaan yang tadi, masalah aset Suramadu. Aset Suramadu ini sebenarnya tidak semuanya ke Cipta Karya, jadi aset itu ada yang ke kami, Balai kami, di BPIW Jawa Timur dan ada juga yang ke Bina Marga ya, ke Bina Marga. *Nah*, saat dengan Balai,

KETUA RAPAT:

Bu, Bu.

DIREKTUR JENDERAL CIPTA KARYA KEMENTERIAN PUPR RI (IR. DIANA KUSUMASTUTI, M.T.):

Balai Bina Marga

KETUA RAPAT:

Ibu Dirjen, kan di luar sudah ada juga Dirjen Bina Marga, mungkin Ibu jawabnya secara menyeluruh *aja*, ya.

DIREKTUR JENDERAL CIPTA KARYA KEMENTERIAN PUPR RI (IR. DIANA KUSUMASTUTI, M.T.):

Iya baik. *Nah*, untuk lahan yang tadi ditanyakan juga untuk yang diproses sertifikasinya. Kami memang ada surat dari pemerintah provinsi Bapak terkait dengan lahan untuk *Islamic Center*. *Nah*, lahan untuk *Islamic Center* ini tentunya masalah aset, mungkin nanti dengan Bapak Sekjen, bukan dengan kami, tapi kami sudah koordinasikan dengan Bapak Sekjen, terkait hal tersebut.

Nah, kemudian untuk PKE, tadi sudah kami jelaskan, namun demikian di dalam pelaksanaannya, tentu kami harus berkolaborasi, tidak hanya Cipta Karya saja, tadi Pak Iwan juga sudah menjelaskan, bahwa Cipta Karya, Perumahan, dan juga Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, hal ini mestinya harus kita ini kan. Bersama-sama dan kita sedang membuat semacam konsep ya, SE, untuk pelaksanaan PK ini, yang PK ini yang dilaksanakan sesuai dengan tipe swakelola satu atau satu ataupun empat, ya.

Kemudian sebenarnya air minum, air minum ini merupakan prioritas dari Cipta Karya, Bapak. Jadi kami memang melaksanakan air minum ini agar 100% di tahun 2030, sehingga hal ini tentunya kami akan melakukan ya. Kalau memang misalnya belum lengkap seperti PAMSIMAS, memang PAMSIMAS ini dari 85.000 desa kami baru menangani 35.000 desa itu pun juga selama 14 tahun dari tahun 2006. *Nah* ini kami akan terus-menerus. Kalau kemarin kita menggunakan dana bantuan luar negeri, sekarang kita menggunakan rupiah murni dan ini akan lebih kami fleksibelkan, untuk pelaksanaan. Namun di dalam persyaratan-persyaratannya, tentunya kami juga harus melihat agar pengelolaan air dan juga air yang dikelola masyarakat ini, tentunya harus berkelanjutan, seperti IKK Pelalawan. IKK Pelalawan sebenarnya sudah masuk, Pak, namun sampai dengan saat ini kan DJSDA masih menyelesaikan intakenya. *Nah*, kalau Sukarame ya belum bisa, karena ini belum selesai, Bapak, belum selesai untuk penanganan dari SDA.

Pak Eddy Santana, Palembang, sebenarnya, tahun 2023 untuk Pelalawan, kami bisa masukkan, Pak, untuk yang Pelalawan. Tetapi yang Sukarame, ini masih ada konstruksi *intake* yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, airnya kan belum bisa *ngocor*, Pak, *nah*, ini kalau sudah selesai baru kami bisa masuk, Pak, mohon izin ya.

Kemudian Palembang, Pak Eddy, sebenarnya PDAM Palembang daerah Musi ini, sudah mendapatkan *reward* ya dengan program NUWSP. Dan ini tentunya kami juga alokasikan untuk pemanfaatan perbankan, Bapak, pinjaman perbankan, kami sudah dorong untuk ke sana. Palembang banyak, Pak, *sewage* pun juga banyak, Pak, di sana, Pak, di sana, Pak, *sewage* nya.

Kemudian Aceh, Aceh ini juga mohon maaf, Bapak, ini masalahnya izin air baku yang belum ada, sehingga kami juga belum bisa melaksanakan untuk SPAM di Aceh Gayo.

KETUA RAPAT:

Bu Dirjen, Bu Dirjen. Kalau Ibu jawab satu-satu itu lama, *Ioh*, Bu.

DIREKTUR JENDERAL CIPTA KARYA KEMENTERIAN PUPR RI (IR. DIANA KUSUMASTUTI, M.T.):

Oke baik. Satu lagi yang mungkin yang Tarnus, masih kita *value engineering*, kemudian yang lain-lainnya, kami akan jawab secara tertulis. *Nah*, permasalahan yang tadi masalah KOTAKU ya, KOTAKU, ini mohon maaf, kami memang ada sedikit perubahan, Pak, ada sedikit perubahan. Jadi Kotaku yang kita lakukan saat ini, terlalu kecil-kecil dan mungkin tidak terlalu membuat perubahan di kawasan tersebut. Sehingga kami diminta untuk melakukan evaluasi terhadap KOTAKU, sehingga Kotaku yang kita lakukan saat ini adalah Kotaku yang skala kawasan. Skala kawasan ini juga lebih besar, lebih kompleks, dan ini nanti kami sudah punya datanya. Dan data-data ini tentunya akan kami sampaikan, ya sama dengan PKE, ya. PKE, data dari BKKBN akan kami sampaikan, sehingga nanti kita bisa memilih. Kemudian untuk skala Kawasan, kami nanti juga akan sampaikan, kira-kira mana yang sesuai dengan dapil atau aspirasi Bapak-Ibu sekalian, sehingga ini nanti bisa diakomodir melalui dapil-dapil ya, bersama-sama dengan dapil.

Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, kalau tanah miring dan sebagainya, saya *enggak* usah *jelasin* sini sebenarnya sudah ada, ya. Jadi sebetulnya, SPAM Minasata (suara kurang jelas) juga sebenarnya kami lakukan juga, sudah kami lakukan ya.

Makasih.

F- PG (Drs. HAMKA BACO KADY, MS):

Izin Pimpinan, Pimpinan.

DIREKTUR JENDERAL CIPTA KARYA KEMENTERIAN PUPR RI (IR. DIANA KUSUMASTUTI, M.T.):

Mungkin demikian.

KETUA RAPAT:

Iya, silakan.

F- PG (Drs. HAMKA BACO KADY, MS):

Iya. Ibu, data mengenai skala kawasan itu, siapa yang *ngusulin*? Mohon penjelasannya.

KETUA RAPAT:

Silakan, Bu.

DIREKTUR JENDERAL CIPTA KARYA KEMENTERIAN PUPR RI (IR. DIANA KUSUMASTUTI, M.T.):

Baik. Data skala Kawasan, sebenarnya kita lakukan evaluasi *assessment*, Bapak, di kami dan itu juga tentunya berdasarkan usulan dari SK kabupaten/kota, Bapak, iya dari kabupaten/kota. Namun demikian, saya pikir seperti Parit Nanas, kemudian juga untuk Kedawung, kemudian yang di Kalimantan Selatan, itu juga ada, ini yang tentunya ini sangat berdampak kelihatan perubahannya ya. *Nah*, ini nanti perlu kami koordinasikan bersama-sama, nanti kami akan tunjukkan semuanya data-datanya, dan ini nanti kita bisa kolaborasikan, Bapak.

Mohon izin.

F- PG (Drs. HAMKA BACO KADY, MS):

Izin, Pimpinan. Masalahnya belum ada *plotting* anggaran di sini, Bu, terhadap kuota kawasan yang berskala kawasan, di mana diletakkan itu?

DIREKTUR JENDERAL CIPTA KARYA KEMENTERIAN PUPR RI (IR. DIANA KUSUMASTUTI, M.T.):

Iya. Begini, Bapak, dari kebutuhan atau dari masing-masing provinsi tadi, kami sudah melakukan *exercise*. *Nah*, dari *exercise* ini tentunya kami kan tadi sudah sampaikan, kami sedang melakukan *exercise*, sehingga ini yang nanti akan kami sampaikan kepada Bapak Menteri. *Nah*, ini saya bocorkan dikit *aja* apa yang kita lakukan. Nanti kurang ini, Pak, kalau dikit-dikit kan agak penasaran.

F- PG (Drs. HAMKA BACO KADY, MS):

Oh iya, setuju.

DIREKTUR JENDERAL CIPTA KARYA KEMENTERIAN PUPR RI (IR. DIANA KUSUMASTUTI, M.T.):

Iya, *gitu*. Jadi, Bapak, ada beberapa lokasi-lokasi dari lokasi itu, nanti kan akan kita jumlahkan, nanti kita akan masukkan, ya kita sesuaikan dengan alokasinya. *Nah*, mungkin kita akan berhitung, dari sisanya itu sebagian kita akan masukkan ke PISEW, itu rencana kami seperti itu. *Nah*, ini mudah-mudahan Bapak Menteri setuju, ya, mudah-mudahan beliau setuju, tapi kami, kan ini namanya juga bocoran, satu *aja*, Pak, yang kami bocorkan tapi,

F- PKS (H. SYAHRUL AIDI MAAZAT, L.c., M.A.):

Izin, Pak Ketua, izin, Pak Ketua, sebelah kanan.

KETUA RAPAT:

Silakan, Pak.

F-PKS (H. SYAHRUL AIDI MAAZAT, L.c., M.A.):

Sebenarnya masalahnya bukan di *exercise* bagaimana anggaran dan alokasi, *problem* utamanya itu adalah di penetapan kriteria, ya. Karena kami tahu bagaimana pemda bekerja, yang sebetulnya juga akan menimbulkan nanti permasalahan di daerah. Karena penetapannya bisa jadi, karena memang maunya itu sehingga itu, disebut sebagai kota kumuh *gitu*, padahal dengan daerah lainnya yang sebetulnya kalau kita lihat di lapangan lebih parah, tapi karena faktor politis, akhirnya tidak ditetapkan.

Oleh karena itu sebetulnya kita membuat kriteria sendiri, karena ini anggaran pusat, jangan ditetapkan oleh pemerintah daerah, begitu. Jadi mungkin masalahnya di kriteria itu, Pak Ketua, bukan di *exercise* anggarannya.

KETUA RAPAT:

Baik, silakan, jawab, Bu.

DIREKTUR JENDERAL CIPTA KARYA KEMENTERIAN PUPR RI (IR. DIANA KUSUMASTUTI, M.T.):

Baik Bapak-Ibu sekalian,

Nanti sebelum kami ke daerah, tentunya kami akan undang Bapak, ya, apa TA-TA. Jadi Bapak yang nanti di bulan September ke depan ya, nanti kami akan sekaligus jelaskan untuk hal ini, mana kota-kota saja, *nah*, ini yang kita diskusikan bersama. Ini, mohon izin, arahan kira-kira strategi kami seperti itu.

Makasih.

KETUA RAPAT:

Baik, cukup ya, Bu, ya?

DIREKTUR JENDERAL CIPTA KARYA KEMENTERIAN PUPR RI (IR. DIANA KUSUMASTUTI, M.T.):

Iya baik, mungkin itu, Pak, yang dari kami, terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh,

KETUA RAPAT:

Saya kira kita cukup semua ya, kita segera ke kesimpulan sekarang, tolong kesimpulannya, tolong ditampilkan, kesimpulan.

F- P. NASDEM (Drs. H.TAMANURI, M.M.):

Pak Ketua, sebentar, Pak Ketua, sebelum sampai kesimpulan, Pak Ketua, bisa *nambahin* sedikit.

KETUA RAPAT:

Pak Tamanuri, silakan.

F- P. NASDEM (Drs. H.TAMANURI, M.M.):

Begini Pak Ketua, kalau apa yang disampaikan oleh Ibu tadi, itu yang kita harapkan ini adalah banyak, kuantitasnya, bukan, bukan, bukan numpuk satu tempat, ini yang kita harapkan. Kalau hanya numpuk satu tempat, andai kata satu kabupaten ada satu kecamatan yang kita buat seperti apa yang disampaikan Ibu tadi, ini adalah merugi, mohon maaf ini, adalah merugikan kita, Pak, karena *enggak* banyak kita dapat itu, itu kira-kira, Pak.

Maaf, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Masih ada? Iya, itu kan masukan dari Pak, dari Pak Tamanuri, nanti menjadi pikiran Bu Dirjen, ya untuk disampaikan juga kepada Pak Menteri.

F- P. GERINDRA (Hj. NOVITA WIJAYANTI, S.E., M.M.):

Pimpinan, sedikit lagi.

KETUA RAPAT:

Silakan, Bu.

F- P. GERINDRA (Hj. NOVITA WIJAYANTI, S.E., M.M.):

Ini saya mau sebelum kesimpulan, Pak, contohnya seperti PISEW ini, di sini ada 450 titik, *gitu*, 450 titik apa ini sudah *fix* segitu? Karena kalau 450 titik dengan kita besok mau pemilu ya, 2023 tahun pemilu *gitu*, kayaknya dibagi dengan jumlah kita itu sangat minim. Ini contoh satu program *aja*, belum yang lainnya. Itu, Pak, minta evaluasi.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Iya menjadi pikiran Bu Dirjen ya, mau jawab atau bagaimana? Mau jawab, silakan, silakan, Bu Dirjen.

DIREKTUR JENDERAL CIPTA KARYA KEMENTERIAN PUPR RI (IR. DIANA KUSUMASTUTI, M.T.):

Kan kita belum *ketemu* lagi dengan Pak Menteri, itu akan kami lakukan *exercise* kembali, Bapak.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Kan banyak masukan dari anggota sekarang.

F- PKS (H. SYAHRUL AIDI MAAZAT, L.c., M.A.):

Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Masih ada lagi?

F- PKS (H. SYAHRUL AIDI MAAZAT, L.c., M.A.):

Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Silakan, silakan, Pak.

F- PKS (H. SYAHRUL AIDI MAAZAT, L.c., M.A.):

Mohon maaf, saya sedikit ingin hanya mengingatkan tadi program yang BSPS tadi yang diperuntukan untuk kemiskinan ekstrem. Saya khawatir, saya punya beban moral akhirnya, kita sahkan ini, bahasanya judulnya untuk menangani kemiskinan ekstrem, tapi masuk dalam BPS. Saya khawatir nanti, yang miskin ekstrem tidak dapat, jadi mohon dikaji lagi oleh kementerian, oleh dirjen, dikaji lagi ini program ini masuk, sampai *ndak* tujuannya nanti, kalau polanya, anggarannya, sama dengan BPS. Karena kita tahu BPS itu, 20 juta itu 17.500.000 itu bahan, 2.500.000 itu upah tukang, *nah*, upah tukang ini tidak cukup 2.500.000. Kalau kita ambil, minta partisipasi, swadaya dari miskin ekstrem, mereka tidak punya pendapatan, Pak. *Nah*, pertanyaannya kalau ini nanti bisa dikolaborasikan dengan Kementerian Sosial, dipastikan bahwasanya Kementerian Sosial yang akan memberikan swadayanya, itu oke. *Nah*, itu yang perlu dipastikan, kalau tidak, tolong dibuat kriterianya yang jelas akurat, itu saja.

KETUA RAPAT:

Baik, saya kira persoalan ekstrem ini tidak ditentukan sendiri, secara cara apa koordinasi, dengan kementerian lain, mereka. Oleh karena itu, kalau ekstrem, berarti sudah masuk situ ke apa namanya, PKH masuk di situ,

kemudian dari, dari kementerian lain juga masuk, jadi semua, semua aktivitas ada penambahan di situ. Beda dengan BSPS biasa dia, BSPS biasa memang khusus 20 juta saja dia, tanpa, apa namanya, tanpa dari kementerian yang lain. Tapi saya pikir sudah didengarkan oleh Pak Dirjen tadi masukkannya, untuk menjadi pikiran Pak Dirjen.

Saya kira, terima kasih, sampailah sekarang kita, masih ada lagi?

F- P. NASDEM (ROBERTH ROUW) – WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:

Dua puluh persen itu dikeluarkan untuk ekstrem, berarti bagian kita itu masuk ke situ ekstrem, ya Pak Menteri, ini kan Pak Dirjen tadi bilang begitu, ini hilang.

KETUA RAPAT:

Benar, benar. Artinya untuk penambahan kita itu dimintakan lah kita untuk masukkan data di situ, tetapi bahwa tambah untuk mendapatkan dari keterlibatan dari departemen yang lain, tetap juga masuk di dalamnya, *gitu* maksudnya, data dikasih kita, *gitu*.

F- P. NASDEM (ROBERTH ROUW) – WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:

Cuman kan bahasanya tadi bahwa tolong kita berikan 20% yang masuk ke tempat beliau, *gitu*, ekstrem. Pemikiran saya, berarti hak saya 1.000 ini harus 20%, apakah dari 1.000 ini ekstrem di tempat saya? Kalau dari beliau ekstrem *tuh* masuk ke tempat saya, oke, saya senang, saya terima, *gitu*. Tapi kalau yang saya punya, terus bilang, Andi belum, ini untuk ekstrem, beliau, kan hak saya berkurang.

KETUA RAPAT:

Oke, oke, silakan ditambahkan sedikit, Pak Dirjen.

DIREKTUR JENDERAL PERUMAHAN KEMENTERIAN PUPR RI (IWAN SUPRIJANTO, S.T., M.T.):

Iya saya ulangi lagi, tadi kan begini, kalau yang 103 tadi, memang kan sama dengan tahun ini, mungkin Bapak menganggap ini sebagai hak, begitu ya. *Nah*, nanti kan ini ada tambahannya ini ya, Pak, ya, tambahannya ini, Pak. Jadi maksud saya, ketika sudah di *blended* ini dua-duanya, baru itu 20%-nya dari situ, Pak, bukan dari yang original yang asli ini *gitu*, setelah keseluruhan ditambahkan itu.

F- P. GERINDRA (Hj. NOVITA WIJAYANTI, S.E., M.M.):

Pimpinan, boleh dikit, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Silakan.

F- P. GERINDRA (Hj. NOVITA WIJAYANTI, S.E., M.M.):

Jadi harapan kita *nih*, Pak Dirjen, kita punya hak, kemudian kalau ada yang miskin ekstrem untuk daerah tersebut dan itu ada di dapil kita, nanti menurunkannya berkoordinasi dengan kita, sehingga kita sama-sama menyampaikan ke mereka juga.

Makasih.

F- PDIP (LASARUS, S.Sos., M.Si.) – KETUA KOMISI V DPR RI:

Coba, coba, *gini*, ini saya sudah *ngomong* yang ketiga *loh* ini. Coba didengar baik-baik, dari tadi itu yang saya maksud, sebenarnya *udah ndak* perlu diulang lagi. Apakah yang tadi saya sampaikan di awal, salah, Pak Dirjen, betul kan? Begitu kan maksudnya?

DIREKTUR JENDERAL PERUMAHAN KEMENTERIAN PUPR RI (IWAN SUPRIJANTO, S.T., M.T.):

Betul, iya.

F- PDIP (LASARUS, S.Sos., M.Si.) – KETUA KOMISI V DPR RI:

Nah, ndak usah dibahas lagi, Pak, cukup ya.

KETUA RAPAT:

Kesimpulan sekarang, kesimpulan, silakan.

F- PD (drh. JHONNI ALLEN MARBUN, M.M.):

Pimpinan, Pimpinan, sedikit *aja*, ini masukan di luar itu.

KETUA RAPAT:

Aduh, masih ada lagi, silakan, silakan.

F- PD (drh. JHONNI ALLEN MARBUN, M.M.):

Ini untuk ini *aja*, ini ke Bu Dirjen, masukan *aja*, soal KOTAKU yang Ibu bilang tadi, soal kawasan. Dalam konteks ini, Bu, sebetulnya kan berapapun anggaran itu kan dalam konteks akuntabilitas anggaran, tapi dalam konteks anggota dewan adalah penyebaran daripada konstituen. Jadi kalau Ibu berbicara soal kawasan, kawasan yang bagaimana? Enggak akan mungkin juga tuntas. Sehingga program yang dibuat Ibu, KOTAKU itu kan dari awal, itu

sebetulnya sudah bagus, tinggal Ibu apakah mempertahankan nilai daripada rupiahnya atau menambah? Oh *enggak* boleh dong, *kenapa nurun*, *enggak* boleh, minimal mempertahankan atau menambah, *nurun* tidak boleh.

Jadi jangan ada konstilasi, dikaji supaya kawasan, *enggak* akan ada kawasan ini bisa tuntas, Bu. Tapi dari sisi politisnya kita sebagai anggota dewan, adalah perlu penyebaran di berbagai konstituen. Saya kira ini masukan untuk Ibu, supaya *enggak*, *enggak debatable* kita ya, *udah* bagus, tapi jangan buat membuat jadi perdebatan yang menjadi pemikiran yang bisa kemana-mana.

Saya kira itu *aja*, Pimpinan, *makasih*.

KETUA RAPAT:

Saya kira Ibu Dirjen sudah dengarkan semuanya dengan baik dan sudah dicatat itu, dan menjadi bahan pembicaraan nanti bersama Pak Menteri *gitu* ya, cukup ya?

Baik, silakan tampilkan itu, kesimpulan, baik.

DRAF KESIMPULAN RDP KOMISI V DPR RI DENGAN DIRJEN CIPTA KARYA DAN DIRJEN PERUMAHAN KEMENTERIAN PUPR RABU, 31 AGUSTUS 2022

1. Komisi V DPR RI meminta Dirjen Cipta Karya dan Dirjen Perumahan Kementerian PUPR untuk meningkatkan capaian serapan APBN tahun anggaran 2022 sesuai saran dan masukan Komisi V DPR RI, di mana capaian per bulan Agustus 2022 sebagai berikut :
 - Dirjen Cipta Karya, 45,65% realisasi keuangan, sementara fisik adalah 48,88%.
 - Dirjen Perumahan, realisasi keuangan 57,31%, fisik 52,14%.
2. Komisi V DPR RI bersama Dirjen Cipta Karya dan Dirjen Perumahan Kementerian PUPR sepakat bahwa Program dan Kegiatan pada Tahun Anggaran 2023 diprioritaskan antara lain dari hasil kunjungan kerja dan masukan serta usulan Komisi V DPR RI.
3. Terkait dengan peningkatan alokasi Anggaran dan Nota Keuangan RAPBN Tahun 2023, Komisi V DPR RI meminta Dirjen Cipta Karya dan Dirjen Perumahan untuk menambah alokasi program infrastruktur berbasis masyarakat.

Komisi V, setuju? Setuju? Masih ada? Silakan.

F- PD (drh. JHONNI ALLEN MARBUN, M.M.):

Enggak, ini, ini selalu saya komentar ya. Biasanya, realisasi uang lebih banyak daripada realisasi fisik, *masak*, apa, *udah* dibayar terus tidak

dilakukan? Biasanya dilakukan dulu, baru dibayar. Sehingga realisasi uang, harusnya lebih kecil daripada fisik, atau minimal sama, begitu loh.

KETUA RAPAT:

Benar ini, Pak, realisasi keuangan 45%,

F- PD (drh. JHONNI ALLEN MARBUN, M.M.):

Bukan, perumahan.

KETUA RAPAT:

Iya

F- PD (drh. JHONNI ALLEN MARBUN, M.M.):

Perumahan.

KETUA RAPAT:

Realisasi keuangan Perumahan 57% keuangannya, oh iya, *kenapa* begini ini?

DIREKTUR JENDERAL PERUMAHAN KEMENTERIAN PUPR RI (IWAN SUPRIJANTO, S.T., M.T.):

Iya, mohon izin, menyampaikan. Jadi ini menunjukkan bahwa memang, ini kan banyak program kerakyatan, Pak, yang disalurkan dulu, kemudian progresnya kan baru mengikuti, Pak. Berarti kan beban, apa namanya, ini menunjukkan kalau alokasi untuk yang aspirasi lebih besar, itu, Pak, jadinya.

F- PDIP (LASARUS, S.Sos., M.Si.) – KETUA KOMISI V DPR RI:

Termasuknya, termasuk BSPS tadi.

KETUA RAPAT:

Termasuk BSPS di dalamnya ya?

DIREKTUR JENDERAL PERUMAHAN KEMENTERIAN PUPR RI (IWAN SUPRIJANTO, S.T., M.T.):

Iya, karena realisasi keuangannya keluar dulu, Pak, progres mungkin masih nol, ini.

KETUA RAPAT:

Iya, karena BSPS itu, Pak, uangnya masuk dulu ke tabungan masyarakat, Pak, fisik belum jalan, begitu Pak Dirjen, ya?

DIREKTUR JENDERAL PERUMAHAN KEMENTERIAN PUPR RI (IWAN SUPRIJANTO, S.T., M.T.):

Iya.

KETUA RAPAT:

Bisa dimengerti ya?

F- PD (drh. JHONNI ALLEN MARBUN, M.M.):

Tunggu dulu, Pak. Bahwa mengimplementasi uang daripada katakanlah dari tabungan masyarakat itu, kan berdasarkan daripada belanja. Apakah mereka bisa mengimplementasikan uang itu tanpa belanja?

KETUA RAPAT:

Tidak, kalau, kalau pengalaman di lapangan itu, Pak, biasa uang keluar dulu, Pak, ke masyarakat, iya ke masyarakat, dan kalau sudah keluar, mereka tidak harus melaporkan, Pak, keluar uangnya, *gitu*.

DIREKTUR JENDERAL PERUMAHAN KEMENTERIAN PUPR RI (IWAN SUPRIJANTO, S.T., M.T.):

Begitu keluar, Pak, ini realisasi kita catatkan, begitu uang keluar, Pak.

KETUA RAPAT:

Sementara fisik lapangan belum jalan, Pak, masih uang itu ada di tangan masyarakat.

F- PD (drh. JHONNI ALLEN MARBUN, M.M.):

Oke, sebentar. Siapa penanggung jawab pengontrol daripada uang yang ada di tabungan masyarakat? Apa *udah* lepas apa, Departemen Perumahan, sudah lepas? *Loh iya dong, lah* masih dalam kontrol mereka, Pak, sehingga apa? Belum terealisasi.

KETUA RAPAT:

Ini hanya keluar, Pak.

F- PD (drh. JHONNI ALLEN MARBUN, M.M.):

Betul. tetapi hanya pemindahan buku, buku, Pak. Artinya kan belum dibayar, artinya apa?

KETUA RAPAT:

Sudah di tangan di tangan *anu*, Pak, pemilik rumah.

F- PD (drh. JHONNI ALLEN MARBUN, M.M.):

Setuju, Pak, tetapi pemilik rumah tidak akan bisa membayar itu, kalau tidak sepersetujuan daripada apa, Perumahan atau orang ditugaskan, apabila belum direalisasi, saya kira harus *clear*.

F- PDIP (LASARUS, S.Sos., M.Si.) – KETUA KOMISI V DPR RI:

Sebentar, sekarang begini, Pak Ridwan.

KETUA RAPAT:

Silakan, Pak, silakan, silakan, Pak.

F- PDIP (LASARUS, S.Sos., M.Si.) – KETUA KOMISI V DPR RI:

Ini sebetulnya soal cara, cara pencatatan, Pak Dirjen, jelaskan cara pelaporan. Bapak sampaikan *aja* cara pelaporannya, *enggak* ada yang salah ini.

Silakan, silakan, Pak Dirjen.

DIREKTUR JENDERAL PERUMAHAN KEMENTERIAN PUPR RI (IWAN SUPRIJANTO, S.T., M.T.):

Laporan ini ketika, jadi masuk ke bank tadi, Pak, memang betul belum dicairkan, belum sampai ke masyarakat. Tetapi ketika, ini kan kita bicara dengan Keuangan juga, Pak. Ketika SPM kami dikirim ke KPPN, diterbitkan SP2D sebagai dasar ini masuk ke rekening, ke rekening, ini baru ke rekening, Pak, belum ke masyarakat, itu terjadi realisasi keuangan negara, Pak, itu Pak, sudah terjadi, tetapi belum sampai kepada masyarakat. Ceritanya begitu, Pak. Sehingga ini, ini hanya mungkin cara pandang pelaporan, Pak, cara pandang pelaporan. Sedangkan fisik adalah *real*, karena kami pantau, masih nol misalnya, uang sudah keluar misalnya sebesar 20 juta masuk ke rekening, tetapi progres masih nol. *Nah*, progres ini yang terus kita pantau. Penyaluran juga sesuai dengan ini ketika 30%,

F- PDIP (LASARUS, S.Sos., M.Si.) – KETUA KOMISI V DPR RI:

Oke *clear* lah ini, *clear* lah, *clear*, *clear*. Saya di lapangan, begitu, mengamati.

F- PD (drh. JHONNI ALLEN MARBUN, M.M.):

Oke, setuju, dari penjelasannya setuju. Tetapi dari segi akuntabilitas penyelenggaraan keuangan negara, coba Pak Adrian, apa begitu? Tolong tanyakan. Karena begini, Pak, kalau ini katakan, ini kan keluar, kita harus ini juga *clear* juga, *kok gimana sih*. Saya dari dulu, dari segi akuntabilitas, coba

dari akuntabilitas daripada pertanggungjawaban keuangan negara. Apa iya sementara masih dalam kontrol mereka *kok*, betul dalam konsep pelaporan, karena ini kita membuat kesimpulan. Tapi terserah, terserah, tapi yang saya tahu, yang saya tahu adalah, bahwa selalu fisik itu lebih minimal sama atau itu.

Makasih.

F- PDIP (LASARUS, S.Sos., M.Si.) – KETUA KOMISI V DPR RI:

Jadi *gini*, jadi *gini*, Pak Dirjen, Pak Dirjen, *gini*. Saya kebetulan, Pak, mengamati, kadang-kadang ikut masyarakat *ngangkut* pasir, kita, angkut semen, angkut kayu, memang begitu, Pak, barang itu masuk rekening dulu, kan kalau belum masuk rekening, mereka *enggak* bisa belanja, Pak. Tetapi ketika barang ini masuk rekening, Bapak sudah masuk progres, itu *loh*, Pak, Pak Jhonni. Tapi di lapangannya itu, fisik belum jalan. Memang untuk BSPS *ndak* bisa, *ndak* begini, Pak, maka ada pengecualian, ada kesepakatan yang dibangun dengan Kementerian Keuangan, kan begitu Pak ya? *Udahlah*, saya rasa *clear* lah ini, biar tanggung jawab mereka.

Oke, *makasih*.

KETUA RAPAT:

Clear, *clear*, ya, *clear*, oke. Berarti Komisi V, setuju ya? Saya pukul memang ah.

(RAPAT: SETUJU)

Bagaimana Pemerintah, setuju?

DIREKTUR JENDERAL PERUMAHAN KEMENTERIAN PUPR RI (IWAN SUPRIJANTO, S.T., M.T.):

Setuju, Pak.

KETUA RAPAT:

(RAPAT: SETUJU)

Selesai.

Baik, kalau begitu, Pak, silakan, Pak, dari, Pak, kata-kata penutup dari Bu Dirjen atau Pak Dirjen, silakan.

DIREKTUR JENDERAL PERUMAHAN KEMENTERIAN PUPR RI (IWAN SUPRIJANTO, S.T., M.T.):

Baik.

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh,

Bapak/Ibu sekalian, Pimpinan dan seluruh anggota Komisi V, yang kami hormati kami banggakan,

Kami, baik Dirjen Perumahan maupun Dirjen Cipta Karya, pada prinsipnya, memahami tadi seluruh aspirasi Bapak-Ibu sekalian dan menindaklanjuti hasil raker kemarin dan kami telah melakukan *exercise*, upaya penyesuaian anggaran ini *gitu*, ya. Dan tadi seluruh masukan, dan harapan Bapak-Ibu sekalian, baik yang disampaikan secara lisan maupun disampaikan secara resmi tertulis pada kami, ini menjadi masukan kami untuk kami perhatikan.

Sebagaimana arahan, sekali lagi saya tekankan, sebagaimana arahan Bapak Menteri, pada prinsipnya, kami, pemerintah, mendukung. Jadi Bapak-Ibu sekalian, dan untuk itulah Bapak Menteri menugaskan kepada kami untuk melakukan *exercise* dan ini kami telah melakukan *exercise* tersebut ya melakukan beberapa skenario ya, Bu Dirjen, ya, sesuai dengan apa ruang fiskal yang ada, kemudian keselarasan dengan program yang ada, begitu.

Dan karena implikasi dari usulan tadi, meskipun secara ruang fiskal itu memungkinkan, tetapi ini membutuhkan, punya potensi dilakukan pergeseran anggaran antar unor. Karena itu, ini masih membutuhkan persetujuan Bapak Menteri, semoga dalam waktu tidak terlalu lama, ini akan sudah ada keputusan yang bisa disampaikan kepada Bapak-Ibu sekalian. Harapan kami *sih* sebelum raker ya di waktu mendatang dengan Bapak Menteri, sudah ada keputusan dan ini memang menjadi jalan yang terbaik untuk kita semua.

Yang kedua, mungkin kami mengingatkan, tadi Bapak-Ibu sekalian, terkait dengan beberapa, karena mungkin ini Cipta Karya dan Perumahan, mungkin juga Bina Marga dan unit yang lain juga, saat ini ada, baik itu pemeriksaan BPK, kemudian juga atensi dari aparat penegak hukum yang lainnya, maka kami juga mengingatkan, bahwa usulan-usulan, mungkin aspirasi dan sebagainya, mungkin fokus di dapil, karena, dan mungkin di pelaksanaannya, mohon kita sama-sama bisa menjaga akuntabilitas dan tata kelola sebagaimana mestinya.

Mungkin demikian saja yang bisa kami sampaikan, terima kasih atas dukungan dan kerja sama Bapak-Ibu selama ini dan masukan-masukan yang telah kami terima.

Akhir kata,

Wabillahi taufiq wal hidayah,

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

KETUA RAPAT:

Walaikumsalam,

Terima kasih, sambutan akhirnya.

Maka Rapat Dengar Pendapat pada hari ini, kita tutup dengan ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh,

(RAPAT DI TUTUP PUKUL 15.50 WIB)

JAKARTA, 31 Agustus 2022

a.n. KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT,

TTD

NUNIK PRIHATIN BUDIASTUTI, S.H.
NIP. 196912021998032002